

# LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN SUMBA BARAT



**KERJASAMA LPPM UNDANA DENGAN  
DPMPTSP KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN 2021**




## Halaman Pengesahaan

1. Judul : Peta Potensi Kabupaten Sumba Barat
2. Tim Peneliti :
  - Ketua : Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum (Ahli Hukum)
  - Anggota : Dr. Simplexius Asa, SH.,MH (Ahli Hukum)
  - Dr. Hamza H. Wulakada, M. Si (Ahli Lingkungan)
  - Darius Mauritsius, SH., M.Hum (Ahli Hukum)
  - Yohanes Fisher Keon, S. Fil, MPA (Kebijakan Publik)
  - Ir. Melkianus Tiro M. Si (Ahli Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa)
3. Lama Penelitian : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kelender
4. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sumba Barat
5. Biaya Penelitian : Rp. 240.370.000  
(Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tuju Puluh Ribu Rupian)

Kupang, 29 November 2021

Mengatahui  
LPPM UNDANA  
Ketua,



  
Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum  
NIP. 19580312 198601 1 002

Ketua Peneliti,

  
Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum  
NIP. 19580312 198601 1 002

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Sumba Barat telah dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan suatu dokumen dalam bentuk “Buku Peta Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat”.

Kabupaten Sumba Barat dengan luas wilayah daratan 737,42 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 441 km<sup>2</sup>, memiliki berbagai jenis potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan untuk investasi yang tersebar pada 6 (enam) kecamatan, yang terdiri dari 63 desa dan 11 kelurahan dan dengan penduduk seluruhnya 145,097 jiwa. Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Kabupaten Sumba Barat memiliki banyak peluang dan potensi investasi untuk dikembangkan, terutama bagi para pengusaha/pihak ketiga yang berminat menanamkan modalnya, diantaranya adalah disektor; pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Untuk itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek dan manajemen yang profesional, transparan serta akuntabel sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan/ekonomi masyarakat.

Terkait potensi yang ada di Kabupaten Sumba Barat yang kemudian disusun dalam dokumen peta potensi Investasi yang dimulai dari tahap mengidentifikasi kemudian menganalisa peluang dan ancaman dari potensi dimaksud hingga membidangi kebijakan rencana pengembangannya. Analisis peluang pengembangan yang memperhatikan kondisi eksisting sumberdaya alam serta sumberdaya manusianya dalam berbagai sector pembangunan akan diintegrasikan dengan konsep keterpaduan yang keberlanjutan sehingga analisis akan semakin komprehensif untuk dipaparkan.

Kegiatan ini merupakan hasil Kerjasama DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat dengan LPPM Undana. Hasil kajian dari kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan peta potensi investasi dari berbagai sektor unggulan di beberapa wilayah Kabupaten Sumba Barat. Gambaran potensi yang berpeluang untuk dikembangkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan Berbagai pendekatan yang disajikan dalam proses penelitian diserahkan kepada pihak Peneliti namun hasilnya menjadi rujukan bersama yang disajikan sebagai salah satu referensi bagi segenap stakeholder dalam penyelarasan rencana pengembangan investasi di Kabupaten Sumba Barat. Luarannya adalah Buku Peta Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat yang menjadi salah satu media promosi investasi.

Demikian pengantar ini disampaikan, namun tentunya masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan senantiasa diharapkan demi penyempurnaan kedepannya. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi hingga dokumen ini dihasilkan, taklupa permohonan maaf disampaikan atas berbagai kekeliruan yang belum sempat diperbaiki. Semoga semua ikhtiar membangun daerah terus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diberkati Yang Maha Kuasa.

**Tim Peneliti**

# Daftar Isi

Lembaran Pengesahaan.....	ii
Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Permasalahan.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	4
1.5 Target dan Luaran.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB 2- KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
2.1 Investasi/ Penanaman Modal.....	7
2.2 Peluang Investasi ( <i>Investment Opportunities</i> ).....	11
2.3 Peta Potensi Investasi.....	13
2.4 Sektor Unggulan Daerah.....	14
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Daerah/ Wilayah.....	18
2.6 Daya Saing Daerah.....	21
<b>BAB 3 - METODOLOGI</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	25
3.3 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Metode Pemetaan.....	27
3.6 Populasi dan Sample.....	28
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.8 Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB 4 - GAMBARAN UMUM DAERAH</b>	
4.1 Kondisi Geografi.....	32
4.2 Kondisi Demografi.....	33
4.3 Kondisi Ekonomi.....	34
4.4 Kondisi Sosial.....	36
4.5 Kondisi Infrastruktur.....	38
4.6 Kondisi Sumberdaya Alam.....	40

## **BAB 5 - SEKTOR POTENSIAL PENGEMBANGAN INVESTASI**

5.1	Profil Investasi Kabupaten Sumba Barat.....	<b>51</b>
5.2	Analisi Potensi dan Keunggulan Daerah.....	<b>53</b>
5.3	Sektor Potensial Daerah.....	<b>56</b>
5.4	Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat.....	<b>83</b>

## **BAB 6 – FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT**

6.1	Faktor Interen.....	<b>90</b>
6.2	Faktor Ekstern.....	<b>97</b>

## **BAB 7 – SEKTOR DAN KAWASAN INVESTASI PRIORITAS**

7.1	Investasi Sektor Primer.....	<b>103</b>
7.2	Investasi Sektor Sekunder (Industri Pengolahan).....	<b>119</b>
7.3	Investasi Sektor Tersier (Akomodasi Makan dan Minum).....	<b>127</b>

## Daftar Tabel

Tabel		
3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	24
4.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Sumba Barat.....	30
2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018-2020 .....	31
4.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	33
4.4.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	34
4.5	Angka Kematia Ibu, Bayi dan Balita di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	34
4.6	Kondisi Bayi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	35
4.7	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat (km) Tahun 2018-2020.....	35
4.8	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sumba Barat (km) Tahun 2018-2020.....	35
4.9	Kondisi Irigasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	36
4.10	Tanaman Pangan, Luas Lahan dan Produktifitas di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	37
4.11	Produk Tanaman Perkebunan dan Sebaran Per Kecamatan Tahun 2020.....	38
4.12	Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	39
4.13	Populasi Ternak di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	40
4.14	Produktivitas Hasil Perikanan Tahun 2020.....	41
4.15	Obyek Wisata Kabupaten Sumba Barat.....	42
4.16	Realisasi Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	45
5.1	Jumlah dan nilai investas Kabupaten Sumba Barat tahun 2017-2020.....	46
5.2	Nilai PDRB Kabupaten Sumba Barat berdasarkan harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018-2020.....	48
5.3	Kriteria penentuan sektor Unggulan, Andalan, dan Potensial.....	50
5.4	Klasifikasi sektor Unggulan, Andalan, dan Potensial di Kabupaten Sumba Barat.....	51
5.5	Luas Lahan dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	54
5.6	Jenis komoditi, luas lahan, dan produktivitas tanaman perkebunan per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020.....	56
5.7	Jenis tanaman, luas panen, dan luas produksi tanaman hortikultura di kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	58
5.8	Desa Yang Mempunyai Potensi Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 .....	61

5.9	Sebaran sektor industri per kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	65
5.10	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) pada Ranting Waikabubak Menurut Kecamatan di Kabupaten sumba Barat, 2020.....	67
6.1.	Realisasi Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020.....	86
6.2	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sumba Barat (Km) Tahun 2018-2020.....	88
7.1	Luas lahan Tanaman pangan per komoditi per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (Ha).....	70
7.2	Produktivitas Tanaman pangan per komoditi per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (Ton).....	105
7.3	Luas lahan tanaman perkebunan per komoditi per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 (Ha dan rumpun).....	107
7.4	Produktivitas Tanaman Perkebunan per Kecamatan per komoditi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (Ton).....	108
7.5	Jumlah populasi ternak per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	110
7.6	Jumlah rumah tangga perikanan, produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan per Kecamatan di Kabupaten sumba Barat Tahun 2020.....	112
7.7	Jumlah Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2018-2020.....	121

## Daftar Gambar

Gambar		
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Sumba Barat.....	31
4.2	PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Sumba Barat Untuk Tahun 2015 – 2019.....	32
4.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi NTT Tahun 2015 – 2019.....	33
5.1	Populasi ternak besar per Kecamatan di kabupaten Sumba Barat Tahun 2020	59
5.2	Populasi ternak unggas per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020.....	60
5.3	Jumlah sektor perdagangan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020.....	74
5.4	Jumlah sektor akomodasi makan minum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 .....	77
7.1	Peta sebaran Tanaman Pangan Kabupaten Sumba Barat.....	107
7.2	Peta sebaran Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sumba Barat.....	109
7.3	Peta sebaran ternak di kabupaten Sumba Barat Daya .....	111
7.4	Peta potensi perikanan Kabupaten Sumba Barat.....	113
7.5	Jumlah Industri pengolahan per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	118
7.6	Peta sebaran industry pengolahan di Kabupaten Sumba Barat.....	119
7.7	Jumlah fasilitas penyedia akomodasi makan minum di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	122
7.8	Sebaran Destinasi Wisata kabupaten Sumba Barat tahun 2020.....	123
7.8	Peta Potensi wisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.....	124

# BAB I PENDAHULUAN





## **I.1 Latar belakang**

Konsep dasar dalam rangka mempercepat proses bangkitnya perekonomian daerah adalah semua pemanfaatan sumber daya termasuk aset-aset baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta, memegang peranan penting dan menjadi tumpuan utama. Untuk mewujudkan transformasi sumber daya menjadi kekuatan ekonomi riil, maka kegiatan investasi merupakan kata kunci.

Menurut pendapat Keynes, faktor yang mempengaruhi besarnya investasi tergantung pada tingkat bunga, keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan di masa yang akan datang, luasnya perkembangan teknologi yang berlaku, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Apabila tingkat kegiatan ekonomi, pada masa kini adalah mengalami kemajuan dan dimasa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun tingkat bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Dengan kata lain, *marginal efficiency of Capital (MEC)* yang diharapkan masih lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku (Sukirno, 1994). Sebaliknya, walaupun tingkat bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan yang maksimal. (Sukirno, 1994].

Keberhasilan kinerja investasi di dalam negeri, terutama pada masa krisis ekonomi, yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tentunya akan memberi kontribusi yang positif bagi pemulihan kondisi ekonomi daerah. Hal ini tergantung sejauh mana berbagai kendala ekonomis yang menghambat pemulihan investasi dapat diatasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi investasi adalah:

- a. Kondisi Ekonomi Makro, yang terdiri dari: Korupsi/ KKN, Kestabilan, Harga Kurs, Perpajakan, Kinerja sector keuangan, Suku Bunga dan Pertumbuhan ekonomi;
- b. Lingkungan Hukum, terdiri dari; Kepastian Hukum dan Kriminalitas;
- c. Kelembagaan terdiri dari; Biaya birokrasi, Konsistensi peraturan pemerintah, Lamanya mengurus birokrasi, Hubungan DPRD dan Pemda, dan Kepastian UU dan kebijakan;



- d. Ketenagakerjaan, terdiri dari: Kuantitas tenaga kerja, Kualitas tenaga kerja, Penguasaan IPTEKS, Upah minimum, dan Peraturan ketenagakerjaan;
- e. Infrastruktur, terdiri dari: Ketersediaan infrastruktur darat, laut dan udara, serta Kualitas Infrastruktur darat, laut dan udara
- f. Stabilitas Politik dan Sosial, terdiri dari: Keamanan dan Konflik social politik.

Bank Dunia yang baru saja merilis prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yakni minus 2% - minus 1,6% *year on year*, pun juga menjadi bukti bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah selama dua dekade terakhir. Jika melihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan kuartal II, bisa dilihat bahwa angka pertumbuhannya masih berada dalam level minus.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai minus 5,32% di kuartal II dan diperkirakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai minus 2,9% - minus 1%. Data ini menandakan Indonesia sudah dipastikan akan masuk ke jurang resesi. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih optimis, melihat dari data-data yang sudah didapat di kuartal I dan II, bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi yang positif menjelang Oktober sampai akhir tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] besaran nilai investasi dan jumlah proyek investasi di Provinsi NTT pada periode triwulan IV-2020 dimaksud hanya 0,9% dari total capaian nilai investasi di Indonesia yang mengandalkan sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi untuk urusan PMDN dan sektor pertambangan untuk urusan PMA.

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Kondisi perekonomian Indonesia yang makin membaik meningkatkan minat investasi yang masuk baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama 3 tahun terakhir terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tercapainya target investasi tersebut merupakan tantangan bagi semua pihak untuk meningkatkan nilai investasi yang pada tahun 2017. Peningkatan investasi tersebut tidak terlepas dari pesatnya kemajuan perkembangan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia akibat aktifitas masyarakat yang terus berbenah dan membangun



wilayahnya, serta mengelola potensi sumber daya alam dan aset manusia yang dimilikinya.

Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan dari berbagai aspek yang secara umum membuat gambaran tentang keadaan geografi, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta lokasi dimana kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan aset manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.

Mengingat potensi sumberdaya alam dan aset manusia merupakan hal yang dinamis, maka data dan informasi terkini yang akurat dan valid tentang potensi dan peluang investasi daerah dan keberadaannya menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan investasi di daerah. Ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya tersebut sangat membantu para calon investor dalam memilih dan memutuskan minat rencana investasinya sesuai dengan bidang investasi dan wilayah/daerah yang diminatinya.

Salah satu upaya membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi investasi, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang investasi daerah. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah juga merupakan upaya penting dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah yang *ready to invest* yang sesuai ketersediaan sumberdaya alamnya, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan daerah dan pusat. Adanya peta potensi dan peluang investasi daerah tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong penting dalam meningkatkan investasi di Indonesia.

Untuk meningkatkan arus investasi yang masuk ke Indonesia dan membantu daerah dalam meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi daerahnya, BKPM sejak tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah di 32 provinsi di Indonesia secara mendalam.

Selanjutnya untuk melengkapi ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang



Investasi Daerah yang dalam pelaksanaannya dititikberatkan pada potensi dan peluang investasi dengan satuan administratif level kabupaten/kota. Kajian mendalam ini dilakukan pada kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu wilayah di NTT yang kaya akan potensi lokal. Selain kajian mendalam, dilakukan pula kajian secara umum yang difokuskan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah Kabupaten Sumba Barat.

## **1.2 Dasar hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penelitian Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Sumba Barat adalah;

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

## **1.3 Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian penyusunan peta potensi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sebaran potensi investasi di Kabupaten Sumba Barat?
- b. Bagaimana tantangan Investasi di Sumba Barat?
- c. Apa saja peluang investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Sumba barat?

## **1.4 Tujuan Kegiatan**

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat adalah untuk:

- a. Melakukan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi terhadap potensi ekonomi, infrastruktur, Ketersediaan Tenaga kerja, dan para pelaku investasi di Kabupaten Sumba Barat;
- b. Melakukan identifikasi terkait berbagai permasalahan investasi di Kabupaten Sumba Barat.
- c. Menganalisa peluang investasi di Kabupaten Sumba Barat.

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat memberi manfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah sebagai basis data yang berisi informasi tentang potensi ekonomi, infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, dan para pelaku investasi dan



- pedoman dalam menentukan kebijakan perencanaan tata ruang serta pembangunan prasarana fisik,
- b. Bagi Pelaku usaha, sebagai bahan informasi peluang investasi dan referensi untuk menentukan lokasi atau tempat berinvestasi.
  - c. Bagi Masyarakat, mendapatkan informasi tentang sebaran potensi sumberdaya dan potensi investasi di Kabupaten Sumba Barat.

### **I.5 Luaran Kegiatan**

Kegiatan penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat akan menghasilkan dokumen ilmiah yang menyajikan sebaran potensi investasi di Kabupaten Sumba Barat dan analisis peluang dan kendala serta peluang investasinya di Kabupaten Sumba Barat.

### **I.6 Sistematika laporan**

Sistematika laporan yang disajikan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- |          |   |
|----------|---|
| Bab I    | : Pendahuluan;                            |
| Bab II   | : Tinjauan Konseptual                     |
| Bab III  | : Metodologi                              |
| Bab IV   | : Gambaran Umum Daerah                    |
| Bab V    | : Sektor Potensial Pengembangan Investasi |
| Bab VI   | : Faktor Pendukung dan Penghambat         |
| Bab VII  | : Sektor dan Kawasan Investasi Prioritas  |
| Bab VIII | : Penutup                                 |

# BAB II

# TINJAUAN

# KONSEPTUAL





## **2.1 Investasi/ Penanaman Modal**

Investasi adalah tentang bagaimana uang kita dapat tumbuh. Ini tidak dapat terjadi jika instrumen yang kita gunakan tidak tumbuh dan tidak memberikan imbal hasil. Hal ini sangat berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat berinvestasi. Premis ekonomi paling sederhana adalah jika konsumen membelanjakan uangnya, ekonomi dapat tumbuh. Jika konsumen tidak membelanjakan uangnya maka ekonomi tidak akan tumbuh. Ketika ekonomi sedang mengalami penurunan, belanja konsumen akan berkurang, dan secara keseluruhan perusahaan akan mencatatkan pertumbuhan yang stagnan, dan tentunya investor akan menerima imbal hasil yang kecil. Sebaliknya ketika ekonomi sedang *booming*, orang-orang akan membelanjakan uangnya, secara keseluruhan perusahaan akan mencatatkan keuntungan dan investasi tentunya akan tumbuh. Investasi merupakan jalan yang membantu kita untuk mencapai tujuan dalam hidup. Sebagai contoh untuk membayar biaya pendidikan di masa yang akan datang, jalan-jalan keliling dunia untuk mendapatkan pengalaman baru, ataupun untuk menjamin hidup di masa tua. Salah satu tempat investasi yang memberikan peluang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita adalah pasar modal.

Pasar modal adalah sebuah instrumen keuangan yang didalamnya terdapat kegiatan jual beli surat-surat berharga (efek) berupa saham dan obligasi untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun pemerintah. Sedangkan, saham itu sendiri adalah jenis surat berharga yang menandakan kepemilikan di perusahaan dan merupakan klaim atas sebagian aset dan pendapatan perusahaan. Pasar modal berperan penting dalam perkembangan negara berkembang. Studi dari Agarwal pada tahun 2001 menunjukkan bahwa perkembangan bursa di sembilan negara Afrika memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi lain dari Mohtadi dan Agarwal pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pengembangan pasar modal pada 21 negara berkembang meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa pasar modal berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan menstabilkan produktivitas dan guncangan likuiditas. Salah satu tantangan besar di banyak negara berkembang adalah pembentukan permodalan usaha. Ketika perusahaan berkembang, perusahaan membutuhkan sejumlah uang untuk mengekspansi bisnisnya. Pasar modal dapat mempertemukan antara investor dan



perusahaan yang butuh modal usaha. Para eksekutif perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk modal dengan menjual saham baru di bursa efek. Setiap bagian saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjadi bagian dari keuntungan perusahaan di masa depan. Membeli sebuah saham sama seperti membeli sebuah bisnis. Ini merupakan cara pandang salah satu investor tersukses di dunia yaitu Warren Buffett. Ketika kita membeli sebuah saham, sebenarnya kita sedang membeli bagian dari sebuah perusahaan, kita harus berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk membeli saham. Penting untuk mengetahui detail dari perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Apa produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, apa lini bisnis perusahaan tersebut yang menghasilkan pemasukan yang besar, apakah perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan, siapa kompetitornya dan lain sebagainya. Sebelum kita paham secara menyeluruh apa yang dikerjakan dan bagaimana bisnis proses perusahaan tersebut bekerja. Alangkah bijaknya untuk menunda keputusan investasi.

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.

Ida Bagus Wyasa Putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, dimana dikatakan “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di



wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.” Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undangundang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang. Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang. Selain pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi



penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Investasi langsung (*direct investment*) diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 1. Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana dan suatu risiko usaha. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan material maupun dengan memberikan lisensi.
2. Investasi Tak Langsung (*Portofolio Investment*) diartkan sebagai kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:
  - a) Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari.
  - b) Pada investasi langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak di lindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.



Menurut william F.S. investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu investasi dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya, jenis investasi dibagi 2 macam yaitu:

1. Investasi nyata (*real invesment*), yaitu investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.
2. Investasi finansial (*financial invesment*), yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito.

Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu :

1. Penanaman modal secara langsung (*Direct Investment*)  
Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
2. Penanaman modal tidak langsung (*Portfolio Investment*)  
Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.

## **2.2 Peluang Investasi (*Investment Opportunities*)**

Peluang investasi adalah kemungkinan untuk melakukan investasi guna mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang melalui suatu produk yang terdapat pada lembaga keuangan yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Peluang investasi juga dimaksud untuk mencari instrumen investasi apa yang bisa memberikan keuntungan lebih dari instrumen investasi lainnya. Peluang investasi biasanya dipengaruhi oleh tren, profit, dan risikonya.

Untuk melakukan investasi perusahaan membutuhkan kesempatan, suatu rencana yang bisa dipilih untuk mewujudkan tujuannya untuk menghasilkan lebih banyak profit. Peluang investasi merupakan pilihan investasi yang tersedia bagi individu atau perusahaan yang dapat dilakukan perusahaan. Kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan mempengaruhi cara pandang manajer, pemilik dan investor tentang nilai



perusahaan tersebut. Myers (1997) menjelaskan bahwa peluang investasi merupakan komponen yang memberikan nilai bagi perusahaan. Dengan adanya sejumlah peluang investasi yang dimiliki perusahaan, mereka memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Peluang investasi yang besar dan dimiliki perusahaan tentu akan membutuhkan sumber dana yang besar pula. Dalam penelitian Hassanpoor et al., (2014) menjelaskan perhitungan peluang investasi yang diukur dengan *ratio book value of fixed asset to market value of fixed asset*, *ratio market value of common stock to book value of common stock*, dan *ratio of earning per share to price per share*.

1. *Ratio Book Value of Fixed Asset to Market Value of Fixed Asset (PPE/MVA)* Rasio *book value of fixed asset to market value of fixed asset* merupakan proksi peluang investasi berdasarkan harga pasar saham dan untuk mengukur prospek pertumbuhan perusahaan berdasarkan aktiva tetapnya (Skinner, 1992). Proksi ini digunakan untuk mengukur prospek pertumbuhan perusahaan berdasarkan aktiva tetap yang produktif, komposisi PPE (Property, Plant and Equipment) yang besar pada struktur aktiva dapat menunjukkan adanya potensi pertumbuhan perusahaan.
2. *Ratio Market Value of Common Stock to Book Value of Common Stock (MVE/BVE)* Rasio *market value of common stock to book value of common stock* merupakan proksi berdasarkan harga pasar saham dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modalnya dengan baik (Akhtaruddin, 2008). Rasio ini adalah perbandingan yang mengalikan harga saham dipasar bursa dengan jumlah lembar saham beredar dan dibagi dengan *common stock equity*.
3. *Ratio of Earning per Share to Price per Share (EPS/P)* Rasio *earning per share to price per share* atau rasio laba per lembar saham terhadap harga pasar per saham merupakan ukuran peluang investasi untuk menggambarkan seberapa besar *earning power* yang dimiliki perusahaan (Anugrah, 2009).
4. *Ratio of Capital Expenditure to Market Value of Asset (CA/MVA)* Rasio ini digunakan untuk melihat besarnya aliran tambahan modal saham perusahaan, dengan tambahan modal saham ini perusahaan dapat memanfaatkannya untuk tambahan investasi aktiva produktifnya.
5. *Ratio of Capital Expenditure to Book Value of Asset (CA/BVA)* Rasio ini digunakan untuk melihat besarnya suatu aliran tambahan modal dalam saham perusahaan.



Dengan bertumbuhnya tambahan modal saham, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk tambahan investasi aktiva produktifnya.

### **2.3 Peta Potensi Investasi**

Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu (Mulyani 2018: 9). Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala, yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas.

Peta potensi investasi adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berisikan potensi investasi yang berada di suatu wilayah atau daerah.

Peta mempunyai beberapa fungsi di berbagai bidang, antara lain untuk:

- a. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain) di permukaan bumi. Dengan membaca peta kita dapat mengetahui lokasi relatif suatu wilayah yang kita lihat.
- b. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi (misalnya bentuk benua, atau gunung) sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta,
- c. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya:
  1. Peta potensi Pertanian
  2. Peta potensi perkebunan
  3. Peta Potensi peternakan
  4. Peta Potensi perikanan, dan lain-lain
- d. Memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Jarak sebenarnya 2 lokasi dapat dihitung dengan membandingkan skala petanya.



Tujuan pembuatan peta investasi:

1. Mengidentifikasi sebaran lapangan usaha dan komoditas unggulan per sektor yang menjadi potensi investasi
2. dapat mendorong peningkatan dan pemerataan investasi di Indonesia
3. Menganalisa faktor pendukung dan kendala dalam kegiatan investasi.
4. Menganalisa peluang usaha dan investasi.
5. Mendesai peluang investasi
6. Sebagai komunikasi informasi ruang untuk berinvestasi

## **2.4 Sektor Unggulan Daerah**

Sektor unggulan adalah suatu sektor/ subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan suatu daerah.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006). Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sector unggulan apabila sektor di



wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000:146). Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

#### **2.4.1 Sektor Primer**

Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Sektor ini umumnya meliputi bidang pekerjaan pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan (Prasetyani, P. dan Sumardi 2020: 27). Sektor primer merupakan lapangan pekerjaan yang paling awal dan salah satu lapangan pekerjaan yang utama Fatihudin, Didin (2019: 53). Penentuan sektor pertanian didasarkan kepada bahan yang digunakan untuk proses produksi beserta dengan produk yang dihasilkan. Sektor primer menghasilkan produk yang akan diolah pada sektor sekunder. Hasil produksi sektor primer umumnya digunakan dalam industri pengolahan, energi listrik, gas, air bersih dan konstruksi (Badan Pusat Statistik 2012: 12). Industri sektor primer umumnya merupakan bagian



terpenting pada suatu negara berkembang. Pembangunan ekonomi dalam sektor primer menurun tingkat kepentingannya seiring dengan perkembangan suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju.

#### **2.4.2 Sektor Sekunder**

Sektor sekunder adalah salah satu sektor ekonomi bersama dengan sektor primer dan sektor tersier (Fatihudin, Didin 2019:53). Kegiatan ekonomi dalam sektor sekunder ialah mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (Badan Pusat Statistik 2012:12). Bidang pekerjaan yang umum pada sektor sekunder ialah manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses produksinya, industri pada sektor sekunder umumnya memerlukan konsumsi energi dalam besar memerlukan pabrik dan mesin, serta menghasilkan limbah.

Sektor sekunder umumnya dilaksanakan dalam bidang manufaktur dan konstruksi. Bentuk kegiatannya umumnya adalah pengolahan bahan baku dan pengadaan barang setengah jadi. Sektor sekunder berpusat pada industri pengolahan, pengadaan listrik, gas dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah hasil daur ulang (Prasetyani, P. dan Sumardi 2020: 27).

Pengelolaan sektor sekunder secara tepat bersama dengan sektor primer dan sektor tersier dapat menghasilkan sistem perekonomian yang mengarah pada pembangunan ekonomi. Sektor sekunder yang berdaya saing dan memiliki kemampuan produksi yang tinggi dapat dikelola melalui agribisnis. Pembangunan ekonomi bersifat saling berhubungan satu sama lain di antara wilayah-wilayah dalam suatu negara (Sinaga, Obsatar 2010:)

#### **2.4.3 Sektor Tersier**

Sektor tersier (juga dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa) adalah satu dari tiga sektor ekonomi. Dalam ekonomi, sektor tersier merupakan lapangan pekerjaan yang saling berkaitan dengan dua sektor ekonomi lainnya yaitu sektor sekunder (manufaktur) dan sektor primer (pertambangan, pertanian dan perikanan) (Fatihudin, Didin 2019:53). Definisi umum mengenai sektor tersier adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan suatu jasa.



Sektor tersier tidak mengutamakan produksi terhadap produk akhir seperti halnya pada sektor sekunder. Terkadang sebuah sektor tambahan yaitu sektor kuartener, diartikan sebagai berbagi informasi. Perolehan informasi secara normal berasal dan dimiliki oleh sektor tersier.

Bisnis sektor jasa yang semakin meningkat berfokus pada ide ekonomi pengetahuan. Kegiatan ekonomi berlangsung dengan memahami apa yang diinginkan konsumen dan cara memenuhi kepuasan konsumen dengan kondisi yang efektif dan efisien. Satu contoh baik dari hal ini ialah industri perbankan yang telah mengalami perubahan besar beberapa tahun belakangan ini. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bank dengan cepat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Banyak komunitas bank dan bangunan telah bergabung untuk membentuk bisnis yang lebih mudah yang mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dari basis pengguna luas. Kunci proses ini adalah memperoleh informasi mengenai pengguna jasa dan memberikan mereka produk-produk baru.

Pengelolaan sektor tersier secara tepat bersama dengan sektor primer dan sektor sekunder dapat menghasilkan sistem perekonomian yang mengarah pada pembangunan ekonomi. Sektor tersier yang berdaya saing dan memiliki kemampuan produksi yang tinggi dapat dikelola melalui agribisnis. Pembangunan ekonomi bersifat saling berhubungan satu sama lain di antara wilayah-wilayah dalam suatu negara (Sinaga, Obsatar 2010: 72).

## **2.5 Pertumbuhan Ekonomi Daerah/ Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991: 125).



Menurut Sirojuzilam (2008:26) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayahwilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta *interrelasi*.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004:47):

1. Teori Ekonomi Klasik, sistim ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalam kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan.
2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor



dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu dalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercemrin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya.

3. Teori pertumbuhan Neo-klasik, teori ini sering disebut dengan teori SolowSwan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna marginal productivity of labour (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari marginal productivity of capital (MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja.
4. Teori Jalur Tepat (Turnpike), setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah lebih mengacu pada sektor regional ada dua, yaitu (Tarigan, 2004:53):

- a. Teori Basis Ekspor Richardson, Teori ini murni dikembangkan dalam kerangka ekonomi regional, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan untuk yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan dan dapat



dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran. Teori ini sebenarnya sangat sederhana namun lebih condong pada multiplier regional, jadi teori ini tidak hanya memasukan ekspor murni saja namun juga ekspor dalam arti mencakup barang dan jasa yang dijual keluar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Asumsi pokok teori ini adalah bahwa ekspor adalah satu satunya unsur independen dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap pendapatan. Asumsi lainnya ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (intercept).

- b. Model Pertumbuhan Interregional Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerah lain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga. Itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah yang bersangkutan terikat pada suatu sistim yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

## **2.6 Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya



dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara. Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

- a. untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
- b. untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
- c. untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja.

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002).

Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran<sup>4</sup> dalam penelitiannya menetapkan factor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:



1. Perekonomian daerah
2. Keterbukaan
3. Sistem Keuangan
4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Sumber Daya Manusia
7. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
8. Manajemen ekonomi mikro.

Sedangkan WEF menyebutkan ada beberapa faktor penting yang membentuk daya saing nasional antara lain: (1) institusi; (2) Infrastruktur; (3) Kondisi Makroekonomi; (4) Pendidikan dasar dan kesehatan; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pembangunan pasar keuangan; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Luas pasar; (11) Kemudahan berusaha; (12) Inovasi.

Menurut *World Economic Index*, terpuruknya daya saing disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol di antaranya:

- a) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
- b) Buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan.
- c) Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas.
- d) Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan.
- e) Lemahnya iklim persaingan usaha. Sementara itu, *Institute for Management Development (IMD)* juga menempatkan Indonesia jauh di bawah

Menurut catatan *Institute for Management Development (IMD)* bahwa rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a) Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.



- b) Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
- c) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- d) Keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.





### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut jenis data dan analisis (Sugiyono 2008: 13) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal yang utama yaitu kualitatif, kuantitatif dan gabungan keduanya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gabungan keduanya yaitu penelitian yang menggunakan jenis data dan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana metode pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Sumba Barat.

### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif baik itu kualitatif maupun kuantitatif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi secara lengkap sesuai temuan di lapangan

### **3.3 Waktu Dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender di mulai dari tanggal 28 Oktober 2021 sampai 12 Desember 2021. Rincian jadwal kegiatan dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.1  
Jadwal Kegiatan Penelitian

KEGIATAN	OKTOBER	NOVEMBER				DESEMBER	
	Minggu IV	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu I	Minggu II
Penandatanganan kontrak							
Penyusunan Proposal/KAK							
Penyusunan instrument							
Seminar awal							
Pengambilan data primer dan sekunder							
Analisis data							
Penyusunan laporan							
Pembuatan buku profil							
Seminar Hasil							
Penyerahan dokumen							
Penyerahan buku profil							

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakuakn melalui wawancara dan FGD (*focus group diskusi*) terstruktur.

b. Data Sekunder Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:

- Profil Kabupaten Sumba Barat
- RPJMD Kabupaten Sumba Barat
- Renstra dan Renja SKPD Kabupaten Sumba Barat
- Provil investasi di Kabupaten Sumba Barat



- e. RTRW Kabupaten Sumba Barat
- f. Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2020
- g. Kecamatan Dalam Angka 2020
- h. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Sumba Barat
- i. Potensi ekonomi Kabupaten Sumba Barat
- j. Tutupan Lahan
- k. Sebaran jaringan Telekomunikasi
- l. Sebaran elektivikasi
- l. Studi terdahulu

Data tersebut diantaranya diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sumba Barat, BPS Kabupaten Sumba Barat, SKPD Terkait serta berbagai literatur dan internet.

### 3.5 Metode Pemetaan

Metode pemetaan mengikuti standar analisis spasial dengan proses SIG yang digunakan

adalah;

- a. *Buffering*; analisis spasial yang akan menghasilkan unsur–unsur spasial (di dalam *layer* lain) yang bertipe poligon. Unsur–unsur ini merupakan area atau *buffer* yang berjarak (yang ditentukan) dari unsur–unsur spasial yang menjadi masukannya (ditentukan atau terpilih sebelumnya melalui salah satu mekanisme *query*).
- b. Klasifikasi (*Reclassify*) merupakan pemetaan suatu besaran yang memiliki interval tertentu ke dalam interval yang lain berdasarkan batas–batas atau kategori yang ditentukan.
- c. Interpolasi merupakan metode untuk mendapatkan data berdasarkan beberapa data yang telah diketahui. Interpolasi dalam ruang lingkup pemetaan adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah.
- d. *Scoring*; Teknik ini sering digunakan dalam SIG. *Scoring* adalah proses pemberian bobot atau nilai terhadap poligon – poligon peta yang mempresentasikan



fenomena tertentu dalam suatu rangkaian analisis spasial. *Scoring* sering digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tertentu dalam proses analisis spasial. Kriteria Skoring berdasar SNI 03-1733- 2004.

### 3.6 Populasi dan Sample

#### Populasi

Ridwan dan Kuncoro (2011) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu, yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Erlina 2011: 80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Birokrasi Kabupaten Sumba Barat sebanyak 12 Kepala SKPD, pelaku usaha yaitu sebanyak 15 orang dan Camat sebanyak 6 orang, kepala desa Tokoh dan Masyarakat sebanyak 17 orang. Maka total populasi adalah sebanyak 50 orang.

#### Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah Teknik Proportionate Random Sampling yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono 2008: 93).

Teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang ada, ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar 2000: 47). Sehingga jumlah populasi yang digunakan dalam Rumus Slovin adalah sebanyak 50 orang yaitu jumlah Birokrasi (kepala SKPD), Pedagang (Pengusaha), Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Rumus dimaksud adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan:

- n = Ukuran Sampel
- N = Jumlah Populasi



e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat di tolerir atau diinginkan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan dalam memberikan jawaban maka diambil keputusan bahwa digunakan ambang batas kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir atau diinginkan sebesar 5 % sehingga jumlah minimal sampel penelitian ini adalah:

$$n = \frac{50}{1 + 50 (0.05)^2}$$
$$N = 45$$

Jumlah minimal sampel yang dapat diambil adalah 45 orang. Dengan pertimbangan untuk mempermudah penelitian maka jumlah sampel yang diambil adalah 45 orang. Maka jumlah seluruh sampel adalah 45 orang

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam tahapan pengumpulan data, diantaranya;

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Yakni mewawancarai narasumber ahli yang memiliki pemahaman, pengetahuan dan berpengalaman dibidang urusan terkait objek/variabel kajian.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

c. Study kepustakaan

Study kepustakaan yaitu mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini.



### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam kajian ini meliputi:

- (1) Analisis Deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif dari hasil diskusi kelompok terfokus.
- (2) Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang berupa pernyataan atau data yang tidak berupa angka.
- (3) Analisis Kuantitatif, yaitu analisis terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan yang berupa data kuantitatif dengan bantuan analisis statistik, untuk menghitung kecenderungan (tren), grafik dan diagram maupun persentase (%).

Analisis data potensial menggunakan pendekatan Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang hasilnya dapat dirujuk pada berbagai sumber analisis sebelumnya. Berbagai data terkait potensi yang telah dipublikasikan oleh lembaga berkompeten juga akan dijadikan perbandingan dan penopang data ekunder dan primer yang telah dianalisis potensinya.

Adapun untuk menentukan sektor unggulan dilakukan melalui alat analisis *Location Quotient* (LQ). LQ merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor tertentu. Dengan analisis LQ dimaksudkan untuk melihat sektor yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis, sehingga dapat terlihat keunggulan sektor yang dikembangkan untuk mendorong perekonomian suatu wilayah. Model Analisis LQ merupakan perbandingan relative antara pendapatan relatif suatu sektor dalam suatu daerah dengan total pendapatan relatif sektor yang sama pada daerah yang lebih luas, dengan formulasi sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

LQ = besarnya kuosien lokasi sektor i

Si = PDRB dari sektor i Kabupaten

S = PDRB total Kabupaten

Ni = PDRB dari sektor i pada tingkat yang lebih luas

N = PDRB total pada wilayah yang lebih luas



Jika hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan nilai  $LQ > 1$ , maka sektor tersebut termasuk kedalam sektor basis, yang berarti bahwa sektor tersebut memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu Kabupaten dibandingkan daerah atasnya (Provinsi). Selain itu, nilai  $LQ$  yang lebih besar dari satu memperlihatkan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan memiliki keunggulan komparatif. Namun apabila nilai  $LQ < 1$ , berarti sektor tersebut termasuk kedalam sektor non-basis, yang berarti produksi sektor tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

# BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH





#### 4.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada 9°22'–9°47' Lintang Selatan dan 119°07'–119°33' Bujur Timur dengan posisi geografis yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
4. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba.

Kabupaten Sumba Barat memiliki luas wilayah daratan 737,42 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 441 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan dengan kecamatan terluas ialah Kecamatan Laboya Barat dengan luas daratan seluas 161,23 km<sup>2</sup> dan yang terkecil ialah Kecamatan Kota Waikabubak dengan luas daratan seluas 44,71 km<sup>2</sup>. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 63 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Tana Righu sebanyak 18 desa dan yang terkecil berada di Kecamatan Laboya Barat sebanyak 4 desa. Adapun luas wilayah dan jumlah desa untuk masing-masing kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

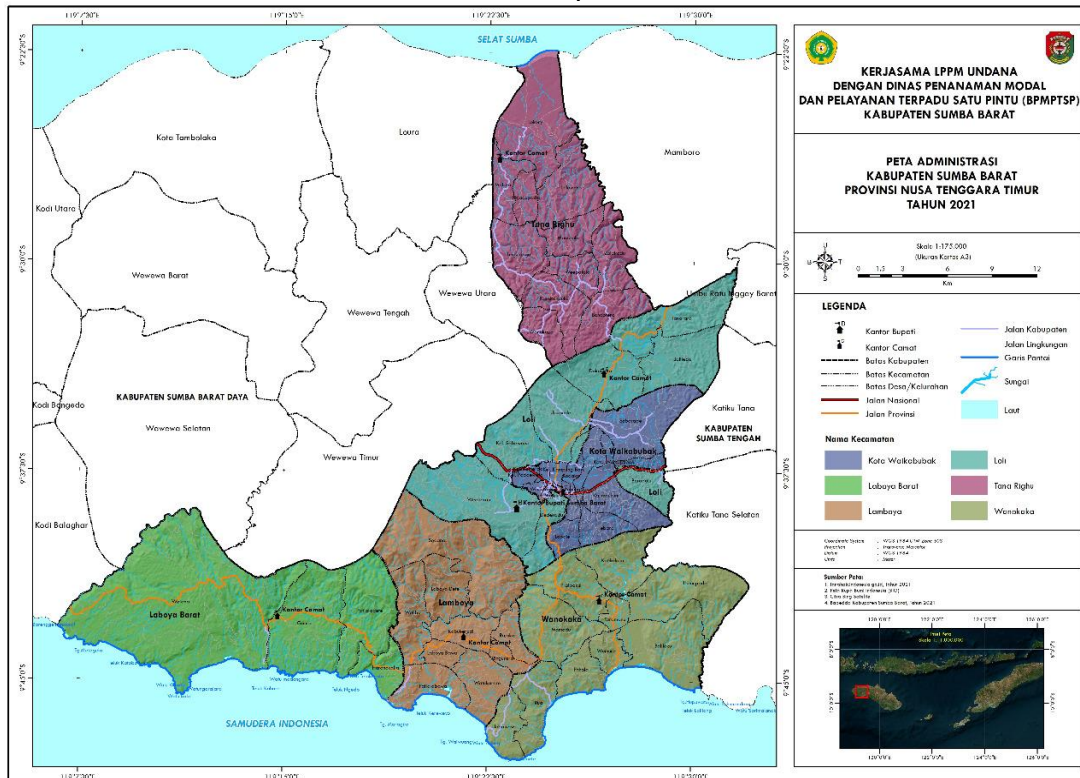
Tabel 4.1  
Wilayah Administratif Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah Km2
1	Lamboya	Kabukarudi	11	125,65
2	Wanokaka	Pogu Katoda	14	133,68
3	Laboya Barat	Hodi	4	161,23
4	Loli	Dokakaka	14	132,36
5	Kota Waikabubak	Waikabubak	13	44,71
6	Tana Righu	Malata	18	139,79
Total			74	737,42

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2021



Gambar 4.1  
Peta Administrasi Kabupaten Sumba Barat



Sumber Data: Dokumen RTRW Kabupaten Sumba Barat 2021

## 4.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020 yaitu 145,097 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 1,37 % (persen) pada tahun 2020. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Sumba Barat hingga tahun 2020 mencapai 196,76/ Km<sup>2</sup>. Wilayah terpadat berada pada Kota Waikabubak dengan kepadatan penduduk 739,52/ Km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah dengan kepadatan terlenggang adalah 54,67/ Km<sup>2</sup> sebagaimana dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2  
Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )
1	Lambuya	22.059	1,33	175,76
2	Wanokaka	18.811	1,44	140,72
3	Laboya Barat	8.815	1,30	54,67
4	Loli	38.932	1,25	294,14
5	Kota Waikabubak	33.064	1,34	739,52
6	Tana Righu	23.416	1,64	167,51
<b>Total Sumba Barat</b>		<b>145.097</b>	<b>1,37</b>	<b>196,76</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumba Barat 2020



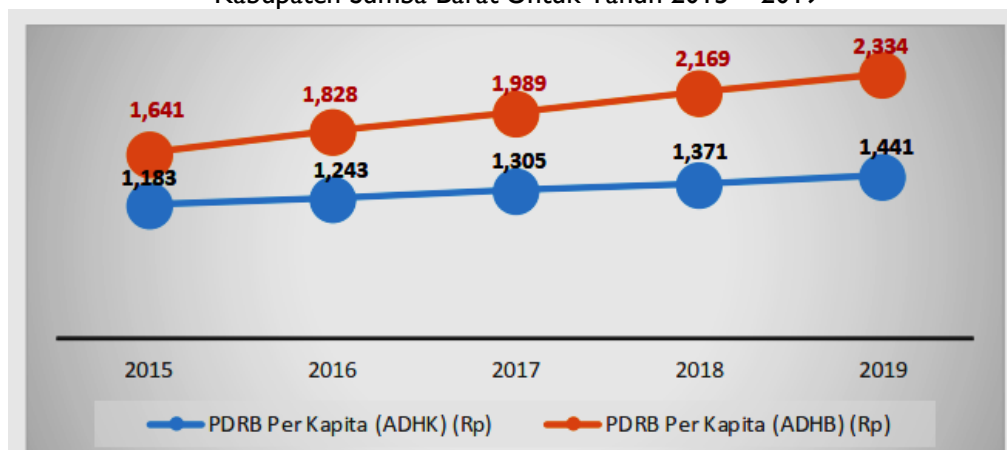
### 4.3 Kondisi Ekonomi

Sejak tahun 2015, nilai PDRB Kabupaten Sumba Barat berada di bawah level provinsi dimana nilai tersebut lebih rendah 0,08 basis poin sejak tahun 2017. Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maka nilai PDRB Kabupaten Sumba Barat menunjukkan hasil yang membaik dimana sejak tahun 2016-2020 nilai PDRB nasional berada di atas Kabupaten Sumba Barat dan di tahun 2019 nilainya berada di atas tingkat nasional.

Sementara itu, PDRB tertinggi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019 diperoleh dari kontribusi Industri Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan dengan nilai di atas 25 basis poin selama 5 tahun terakhir sedangkan yang terendah dengan nilai di bawah 1 basis poin diperoleh dari 4 sektor yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Perusahaan.

Selain itu, PDRB per kapita juga menunjukkan adanya tren yang konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baik yang diukur berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Tren berdasarkan harga konstan tahun 2017 dengan nilai 1.305, tahun 2018 dengan nilai 1.371, dan tahun 2019 dengan nilai 1.441 dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2  
PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan  
Kabupaten Sumba Barat Untuk Tahun 2015 – 2019

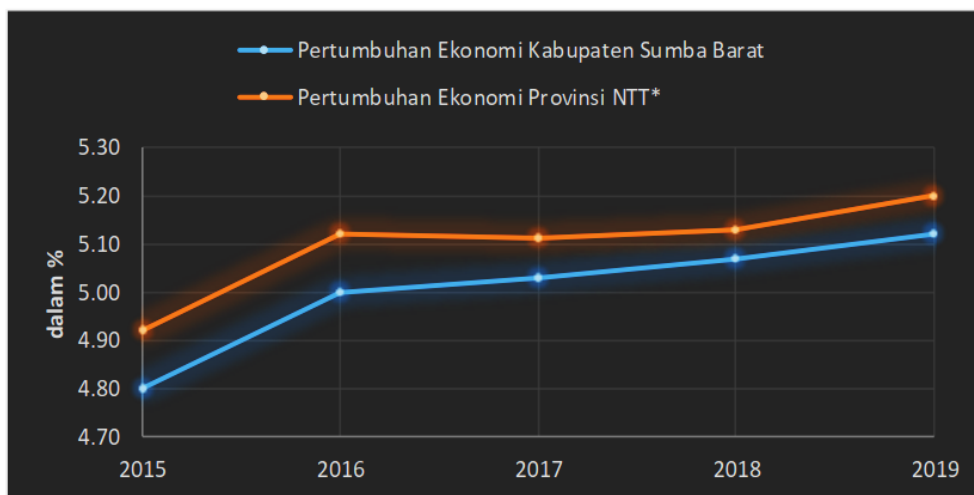


Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2021-2026



Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Barat secara konsisten terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana tahun 2019 terjadi kenaikan paling tinggi sebesar 0,05 basis poin dan yang terendah terjadi di tahun 2016 dengan kenaikan sebesar 0,02 basis poin. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi dimana sejak tahun 2015 pertumbuhan ekonomi provinsi secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat.

Gambar 4.3.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi NTT  
Tahun 2015 – 2019



Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2021-2026

#### 4.4 Kondisi Sosial

##### 4.4.1 Pendidikan

APK di Kabupaten Sumba Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren yang fluktuasi hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Kabupaten Sumba Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sekolah Dasar</b>	116,47	117,69	114,94	116,97	113,24
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	100,89	99,32	98,12	97,30	92,69
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	69,06	68,56	80,82	79,11	90,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai APK untuk level SD, SMP dan SMA cenderung mengalami tren yang fluktuasi, sementara pada level SD dan SMP cenderung



mengalami penurunan persentase pada lima tahun terakhir. Namun demikian, jika nilai APK Kabupaten Sumba Barat pada level SMA cenderung mengalami peningkatan persentase APM di Kabupaten Sumba Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga cenderung berfluktuasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4  
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Kabupaten Sumba Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sekolah Dasar</b>	95,00	94,20	96,78	97,93	97,14
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	73,82	69,47	67,66	69,87	69,87
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	53,45	54,21	56,54	55,44	56,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir nilai APM di Kabupaten Sumba Barat cenderung berfluktuasi baik dari level SD sampai SMA. Di tahun 2020 sendiri nilai APM untuk level SD dan SMP mengalami peningkatan sementara untuk level SMA juga terjadi penguatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan program pendidikan di bawah 12 tahun masih sedikit lebih baik.

#### 4.4.2 Kesehatan

Angka kematian ibu, bayi, dan balita merupakan salah satu komponen dalam melihat tingkat kesehatan di Kabupaten Sumba Barat. Adapun angka kematian bayi ibu, bayi, dan balita di Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut.

Tabel 4.5  
Angka Kematia Ibu, Bayi dan Balita  
di Kabupaten Sumba Bara Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ibu</b>	4	2	1	2	-
<b>Bayi</b>	7	8	27	4	-
<b>Balita</b>	4	7	5	3	-

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir angka kematian bayi menjadi yang tertinggi dengan total kematian sebanyak 46 kasus dan berturut-turut sebanyak 19 kasus kematian balita serta 9 kasus untuk kematian ibu. Untuk kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2018, tahun 2017.



Tabel 4.6  
Kondisi Bayi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

Kondisi Bayi	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah Bayi Lahir</b>	2 287	2 283	1.453	1.507	2.306
<b>Bayi Berat Badan Lahir Rendah</b>	94	92	67	12	57
<b>Gizi Buruk</b>	65	66	67	69	166
<b>Stunting (%)</b>	-	47	25,5	32,2	27

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Sumba Barat sempat mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 dan kembali naik di tahun 2019 dan 2020. Selain itu, tren yang hampir serupa terjadi pada komponen Bayi Berat Badan Lahir Rendah dimana sejak tahun 2016 terus mengalami penurunan sampai 2019 dimana di tahun 2019 hanya terdapat 12 kasus. Namun demikian, untuk kasus gizi buruk trennya dibandingkan dengan keadaan di tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Sedangkan angka stunting yang semula 47 persen ditahun 2017 berkurang menjadi 27 persen pada tahun 2020.

#### 4.5 Kondisi Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur berupa jalan di Kabupaten Sumba Barat yang terbagi menjadi jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.7  
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan  
di Kabupaten Sumba Barat (km) Tahun 2018-2020

Tingkat Kewenangan Pemerintah	2018	2019	2020
<b>Negara</b>	15,00	15,00	15,00
<b>Provinsi</b>	87,70	87,70	87,70
<b>Kabupaten</b>	444,81	444,81	444,81
<b>Total</b>	<b>547,51</b>	<b>547,51</b>	<b>547,51</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2021

Tabel kondisi jalan di atas menunjukkan tidak adanya penambahan panjang jalan baik itu jalan negara, jalan provinsi dan jalan Kabupaten, sedangkan kondisi jalan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.8  
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan  
di Kabupaten Sumba Barat (km) Tahun 2018-2020

Kondisi Jalan	2018	2019	2020
Baik	205,92	205,92	205,92
Sedang	97,13	97,13	97,13
Rusak	134,56	134,56	134,56



Rusak Berat	109,90	109,90	109,90
Jumlah	<b>547,51</b>	<b>547,51</b>	<b>547,51</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Sumba Barat sebagian besar dalam kondisi tidak baik. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, jalan yang dalam kondisi baik tidak pernah mencapai 50% dibanding total panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat. Meskipun masih banyak jalan yang dalam kondisi tidak baik, akan tetapi telah ada upaya perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan rehabilitasi/derekonstruksi jalan sebesar 8% pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel. 4.9  
 Kondisi Irigasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
I	Presentase Irigasi dalam Kondisi Baik	57,86%	58,97%	59,17%	63,90%	67,96%

Sumber Dinas PUPR Sumba Barat 2021

Kondisi irigasi di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan angka yang cukup baik. Mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 67,96% irigasi yang dalam kondisi baik, angka tersebut masih harus dioptimalkan agar irigasi yang baik dapat mencapai 100% sehingga dapat mengairi seluruh lahan pertanian warga masyarakat.

## 4.6 Kondisi Sumberdaya Alam

### 4.6.1 Sektor Pertanian

#### a. Tanaman Pangan

Luas lahan sawah yang digunakan untuk pertanian sebesar 9.589 hektare dan sebagian besar lahan sawah bertempat pada Kecamatan Loli dengan luas lahan sebesar 3.937 hektare dengan produktivitas 8.621,74 ton sementara yang terendah berada di Kecamatan Tanah Righu dengan luas lahan sebesar 75 hektar dengan produktivitas 1.521,98 ton.

Luas lahan ladang yang digunakan untuk menanam Jagung berada di kecamatan Tana Righu yakni 1.950,0 Ha dengan produktivitas sebesar 5.869,5 ton sementara yang terendah berada di Kecamatan Waikabubak dengan luas 502,0 ha dan produktivitas 1.423,7 ton.



Luas lahan ladang yang digunakan untuk menanam Ubi Kayu berada di Kecamatan Wanukaka dengan luas 226 ha dan produktivitas 2.165,1 ton sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Waikabubak 14 ha dengan produktivitas 131,0 ton.

Sedangkang luas lahan lading untuk Ubi Jalar dan Kacang Hijau hanya tersebar di beberapa kecamatan, seperti untuk Ubu Jalar hanya berada di kecamatan Loli, Waikabubak dan Tana Righu sedangkan Kacang Hijau hanya tersebar di Wanokaka, Lamboya Barat, Waikabubak dan Tana Righu. secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10  
 Tanaman Pangan, Luas Lahan dan Produktifitas  
 di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas
1	Lamboya	Padi	1.045	2.987,92
		Jagung	580,0	1699,4
		Ubi Kayu	56	553,8
		Ubi Jalar	-	-
		Kacang Hijau	-	-
2	Wanukaka	Padi	1.554	5658,23
		Jagung	650,0	1.911,0
		Ubi Kayu	226	2.165,1
		Ubi Jalar	-	-
		Kacang Hijau	2	14,40
3	Lamboya Barat	Padi	757	6.388,61
		Jagung	933,0	2.836,3
		Ubi Kayu	34	329,5
		Ubi Jalar	-	-
		Kacang Hijau	1	7,30
4	Loli	Padi	3.937	8.621,74
		Jagung	1.395,9	4.076,0
		Ubi Kayu	165	1562,6
		Ubi Jalar	42	303,24
		Kacang Hijau	-	-
5	Wikabubak	Padi	2.222	7.081,78
		Jagung	502,0	1.423,7
		Ubi Kayu	14	131,0
		Ubi Jalar	6	43,32
		Kacang Hijau	2	14,3
	Tana Righu	Padi	75	1.521,98
		Jagung	1.950,0	5.869,5
		Ubi Kayu	53	513,0
		Ubi Jalar	15	108,30
		Kacang Hijau	3	21,60

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020



b. Tanaman Perkebunan

Untuk hasil perkebunan di Kabupaten Sumba Barat dikelompokkan menjadi 4 jenis hasil perkebunan yaitu hasil perkebunan kelapa, kopi, kakao, dan lainnya. Adapun hasil perkebunan dari masing-masing kecamatan tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 4.11  
Produk Tanaman Perkebunan dan Sebaran Per Kecamatan Tahun 2020

Jenis Tanaman	Uraian	Kecamatan					
		Lamboya	Wanokaka	Laboya Barat	Loli	Waikabubak	Tana Righu
<b>Kelapa</b>	Luas Area (ha)	660	3.370	730	669	476	1.691
	Produksi (ton)	80	680	67	11	35	180
	Produktivitas (ha/ton)	12,12%	20,18%	9,18%	1,64%	7,35%	10,64%
<b>Kopi</b>	Luas Area (ha)	121	120	1.426	288	358	45
	Produksi (ton)	18	5	52	10	10	14
	Produktivitas (ha/ton)	14,88%	4,17%	3,65%	3,47%	2,79%	31,11 %
<b>Kakao</b>	Luas Area (ha)	241	11	1.573	6	56	46
	Produksi (ton)	8	2	41	2	5	6
	Produktivitas (ha/ton)	3,32%	18,18%	2,61%	33,33%	8,93%	13,04%
<b>Lainnya</b>	Luas Area (ha)	353	4.068	296	1.072	16	2.675
	Produksi (ton)	65	339	32	148	3	475
	Produktivitas (ha/ton)	18,41%	8,33%	10,81%	13,81%	18,75%	17,76%
<b>Total (1+2+3+4)</b>	Luas Area (ha)	<b>1.375</b>	<b>7.569</b>	<b>4.025</b>	<b>2.035</b>	<b>906</b>	<b>4.457</b>
	Produksi (ton)	<b>171</b>	<b>1.026</b>	<b>192</b>	<b>171</b>	<b>53</b>	<b>675</b>
	Produktivitas (ha/ton)	<b>12,44%</b>	<b>13,56%</b>	<b>4,77%</b>	<b>8,40%</b>	<b>5,85%</b>	<b>15,14%</b>

Sumber: Sumba Barat dalam angka tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk perkebunan dan hasil produksi yang terbesar berada di Kecamatan Wanokaka yaitu 7.569 Ha dan hasil produksi 1.026 Ton, sementara yang terendah berada pada Kecamatan Kota Waikabubak yakni 906 Ha dengan hasil produksi 53 Ton. Namun jika dilihat dari aspek produktivitas hasil perkebunan maka Kecamatan Tana Righu menjadi yang tertinggi yakni 15,14% ha/ ton dan yang terendah Kecamatan Laboya Barat yakni 4,77% ha/ton. Hasil ini menunjukkan bahwa potensi perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat sebenarnya cukup besar namun disisi lain hasil produksi kebun yang diperoleh relatif masih sangat kecil dimana nilai produktivitas dari



hasil-hasil perkebunan tersebut tidak ada yang sampai 20% dari total lahan yang digunakan.

c. Tanaman Hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Barat dengan luas kurang lebih 7.185 (tujuh ribu seratus delapan puluh lima) hektar.

Luas panen tanaman sayuran terbesar di Kabupaten Sumba Barat dengan jenis keragaman tanaman sayuran yang terbesar pada sayur bayam dengan luas 42 ha, sayur kangkung 52 ha dan sayur pitsai 64 ha sedangkan luas produksi tanaman sayuran terdiri dari sayur kangkung 3.099,20 ton, Labu Siam 3.199 ton dan pitsai 33.088 ton.

Keseluruhan luas panen dan produksi tanaman sayuran secara lengkap dapat dilihat pada table 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12  
Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

Jenis Tanaman	Tahun 2020	
	Luas Panen (Ha)	Luas Produksi (Ton)
Bawang Daun	7	324,1
Bawang Merah	6	0
Bawang Putih	0	217,2
Bayam	42	1.184,4
Buncis	23	1.198,30
Cabe Besar	4	146
Cabe Rawit	21	768,6
Kacang Merah	0	0
Kacang Panjang	17	554,2
Kangkung	52	3.099,20
Kembang Kol	0	0
Ketimun	8	752,8
Kubis	4	358,4
Labu Siam	10	3.199,00
Lobak	0	0
Pitsai	64	33,088
Terong	23	2.134,40
Tomat	14	938
Wortel	7	597,8

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021



d. Peternakan

Kabupaten Sumba Barat mempunyai potensi untuk pengembangan kawasan peternakan di masing-masing kecamatan. Adapun populasi ternak di Kabupaten Sumba Barat untuk masing-masing kecamatan ditunjukkan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 4.13  
Populasi Ternak di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

Keterangan	Uraian	Kecamatan					
		Lamboya	Wanokaka	Lamboya Barat	Loli	Waikabubak	Tana Righu
Sapi Potong	Populasi	266	414	233	289	143	523
Kerbau	Polulasi	2.995	2.570	1.503	2.408	1.762	1.120
Kuda	Populasi	1.434	405	616	592	353	488
Kambing	Populasi	1.828	720	528	303	279	1.515
Domba	Populasi	11	0	0	0	0	0
Babi	Populasi	1.066	411	253	1.229	602	2.809
<b>Total Populasi Ternak</b>		<b>7.600</b>	<b>4.520</b>	<b>3.133</b>	<b>4.812</b>	<b>3.139</b>	<b>6.455</b>
Ayam Kampung	Populasi	58.789	54.854	28.088	49.495	47.189	34.612
Ayam Pedaging	Populasi	1631	4.372	1.336	26.601	25.584	15.857
Itik	Populasi	370	1.095	317	1.654	1.671	958
<b>Total Populasi Unggas</b>		<b>60.790</b>	<b>60.321</b>	<b>29.741</b>	<b>77.750</b>	<b>74.444</b>	<b>51.427</b>

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Sumba Barat tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi ternak paling besar berada di kecamatan Lamboya dengan total poulasi berjumlah 7.600 ekor, sedangkan secara terperinci populasi ternak didominasi oleh ternak Kerbau dengan jumlah 2.995 ekor yang berada di kecamatan Lamboya. Sedangkan untuk jenis unggas didominasi oleh ayam kampung yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.

e. Perikanan

Kabupaten Sumba Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dengan pengembangan Kawasan minapolitan di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka. Ketiga daerah tersebut berada pada wilayah kawasan pesisir selatan dengan luas 421



km<sup>2</sup> dan panjang pantai ± 56 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Sedangkan Kecamatan Loli, Kecamatan Waikabubak, dan Tana Rihgu mempunyai potensi untuk pengembangan ikan air tawar.

Potensi perikanan yang paling besar berada pada sektor air tawar dengan jumlah yang mencapai 36 desa. Sementara itu, untuk potensi perikanan tangkap dan laut masing-masing terdapat di 12 desa dan payau memiliki potensi sebanyak 1 desa yang telah teridentifikasi. Lebih lanjut, potensi perikanan terbesar berada di Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Laboya Barat.

Hasil produksi perikanan di kedua kecamatan ini yang memiliki nilai produksi tertinggi dari enam kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Adapun hasil produksi perikanan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 4.14  
 Produktivitas Hasil Perikanan Tahun 2020

Keterangan	Uraian	Kecamatan					
		Lamboya	Wanokaka	Laboya Barat	Loli	Waikabubak	Tana Rihgu
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Perikanan Tangkap di Laut	389	1.157	122	0	0	30
	Perikanan Perairan Umum Daratan	22	76	0	177	96	11
Produksi Perikanan (ton)	Perikanan Tangkap di Laut	490	1.582	840	0	0	106
	Perikanan Perairan Umum Daratan	0,8	7,63	0	5,63	8,08	0,27
Nilai Produksi Perikanan (Juta Rupiah)	Perikanan Tangkap di Laut	24.500	79.100	42.000	0	0	53.000
	Perikanan Perairan Umum Daratan	40	381	-	281	404	13
<b>Produktivitas Hasil Perikanan</b>		<b>1,25</b>	<b>389</b>	<b>1.157</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat empat Kecamatan sebagai penghasil perikanan di Kabupaten Sumba Barat yaitu Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya Barat dan



Kecamatan Loli untuk tahun 2020. Produksi hasil perikanan, nilai produksi perikanan, dan jumlah rumah tangga perikanan tertinggi berada di Kecamatan Wanokaka sementara yang terendah dari ketiga aspek tersebut berada di Kecamatan Tanah Righu. Namun demikian, jika ditinjau dari aspek produktivitas yang dihitung dari produksi perikanan dibandingkan jumlah rumah tangga perikanan maka Kecamatan Laboya Barat menjadi Kecamatan dengan produktivitas yang tertinggi, terendah berada Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanokaka yang memiliki jumlah hasil produksi tertinggi ternyata memiliki produktivitas hasil perikanan yang cukup rendah.

#### **4.6.2 Sektor Pariwisata**

Kabupaten Sumba Barat memiliki daya tarik wisata yang beragam baik daya tarik wisata alam (Pantai, Air Terjun, Goa, Bentang alam, Flora dan Fauna), budaya (Kampung Adat, Pasola, Kerajinan dan Kesenian) dan minat khusus. Kombinasi antara daya tarik tersebut pantas di perhitungkan oleh wisatawan sebagai destinasi wisata yang menawarkan perbedaan suasana terutama pada daya tarik kampung adat dan pasola. Keseluruhan inventarisasi Daya Tarik wisata di Kabupaten Sumba Barat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15  
 Obyek Wisata Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata		Jenis
1	Kota Waikabubak	1	Prai ijing	Wisata Budaya (Kampung Adat)
		2	Paleti Lolu	
		3	Bodo Maroto	Kampung Adat dan Atraksi Budaya (Wola Podu)
		4	Gollu	
2	Loli	5	Liang Marapu	Wisata Alam (Gua)
		6	Tarung	Wisata Budaya (Kampung Adat) dan Atraksi Budaya (wula podu)
		7	Wee Kalowo	
		8	Wee Tabar	
		9	Gella Koko	
		10	Tabera	
		11	Bodo Ede	Kampung Adat
3	Wanokaka	12	Prai Gollu	Wisata Budaya (Kampung Adat)
		13	Waikawolu	
		14	Waiwuli	
		15	Ubu Bewi	
		16	Wai Galli	
		17	Kabba	



		18	Kadoku	Kampung Adat dan Wulla Podu
		19	Pantai Wanokaka	Wisata Alam (pantai)
		20	Pantai Rua	
		21	Pantai Ngihi Watu	
		22	Pantai Nyou Rara	
		23	Pantai Pahiwi	
		24	Pantai Lai liang	
		25	Pajura dan Pantai Tetena	
		26	Lai Popu	Wisata Alam (air terjun)
		27	Danau Mau Ranni	Wisata Alam (danau)
		28	Pasola Wanokaka	Atraksi Budaya (Pasola)
		29	Kadoku	Atraksi Budaya (Wolla Podu)
		30	Bajilungu Hiu pa'ana	Atraksi Budaya
<b>4</b>	Lamboya	31	Pantai Marosi	Wisata pantai (pantai)
		32	Pantai Tanjung Mambang	
		33	Pantai Lia Madongara	
		34	Sodana	Wisata Budaya
		35	Malezu	
		36	Wora Djawa	
		37	Pasola Lamboya	Atraksi Budaya (Pasola)
		38	Sodana	Atraksi Budaya (Wulla Podu)
		39	Tebing Manu Kuku	Wisata Alam (gua dan Benteng)
		40	Dikita	Wisata Kampung Adat dan Wulla Podu
41	Homba Rade			
		42	Pantai Bina Natu	Wisata alam (pantai)

Sumber: RIPPDA Kabupaten Sumba Barat 2010

Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah potensial sebagai tujuan wisata karena memiliki banyak daya Tarik wisata baik wisata alam, budaya, sejarah dan rohani dengan beragam atraksi di dalamnya. Potensi daya tarik wisata kabupaten Sumba Barat dengan keragaman daya tarik memiliki prospek yang menjanjikan dalam pengembangan pariwisata. Dilihat dari potensi sumber daya alamnya, daya tarik yang akan dipasarkan di Kabupaten Sumba Barat adalah pemandangan alam pantai yang alami, Taman Nasional serta kebudayaan yang masih sangat kental dan dipegang oleh masyarakat. Atraksi yang dikembangkan dalam daya tarik wisata alam adalah: Fishing, diving, surfing, boating dan snorkeling. Hal ini sangat membantu untuk promosi dan menjual daya tarik wisata tersebut. Saat ini telah ada investor yang menjual atraksi tersebut namun masih dalam investasi terbatas, sehingga perlu pengembangan selanjutnya.

Kemudian dilihat dari segi sosial budaya, Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi yang tidak kalah dengan potensi alamnya. Potensi sosial budaya Kabupaten Sumba Barat memiliki peluang yang besar dalam pengembangan pariwisata dengan



segmentasi pasar adalah wisatawan mancanegara. Peninggalan bangunan bersejarah, makam, ritual adat, serta kehidupan masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang masih sangat kuno (Primitif). Beberapa hal yang menunjukkan potensi daya tarik pada kehidupan sosial budaya masyarakat Sumba Barat antara lain adalah:

**Kekhasan, keunikan.** Aspek sosial budaya dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba Barat menunjukkan bahwa kehidupan mereka memang unik, khas. Ada banyak hal dalam kehidupan masyarakat Sumba Barat yang tidak dapat ditemukan dalam masyarakat-masyarakat di Indonesia pada umumnya. Rituail-ritail adat yang dilakukan, pola perkampungan adat, rumah adat, pakaian sehari-hari, dan kehidupan sehari-hari, semuanya memperlihatkan keunikan tertentu, yang akan sangat mengesankan wisatawan asing yang bermaksud memperoleh pengayaan sosial budaya dari dan dalam kegiatannya berwisata.

**Masih relatif asli.** Kehidupan sehari-hari yang sebagian besar belum banyak mengalami perubahan akan membuat wisatawan yang ingin memperoleh pengetahuan, melihat serta mengalami sendiri kehidupan sosial budaya yang sangat berlainan dengan pola dan adat kebiasaan mereka. Sebagian besar adat istiadat masih bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

**Kebangaan pada budaya asli.** Ada kebanggaan yang kuat di kalangan warga masyarakat Sumba Barat atas kemampuan mereka mempertahankan adat istiadat lama yang diwariskan nenek moyang mereka. Hal ini tentunya akan memudahkan dan memperlancar upaya-upaya pelestarian budaya lokal, yang kemudian akan menjadi salah satu daya tarik wisata minat khusus.

Target wisatawan mancanegara belum tercapai dan mengalami tren menurun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 yang hanya sebanyak 555 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri juga mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Nilai Kontribusi PDRB pada sektor pariwisata cenderung konsisten pada capaian 0,5%. Pada indikator pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan; Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang dan tingkat hunian akomodasi juga mengalami tren penurunan.



Tabel 4.16  
 Realisasi Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penginapan (unit)	11	15	20	25	25
2	Jumlah perkembangan kunjungan wisatawan (jiwa) Mancanegara	4.744	5.705	3.711	3.432	555
3	Jumlah perkembangan kunjungan wisatawan (Jiwa) Dalam negeri	2.976	3.724	4.561	4.052	1451
4	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (%)	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	82%	83%	82%	78%	36%
6	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating	80%	80%	85%	80%	40%
7	Tingkat hunian akomodasi	75%	80%	80%	80%	30%

Sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

# **BAB V**

# **SEKTOR POTENSIAL**

# **PENGEMBANGAN INVESTASI**





### 5.1. Profil Investasi Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkup wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi target atau sasaran para investor untuk berinvestasi. Sejak tahun 2017 jumlah PMDN di Kabupaten Sumba Barat terus meningkat dari 5 unit pada tahun 2017 menjadi 16 unit pada tahun 2020. Jumlah tersebut telah melampaui target daerah yakni sebanyak 3 unit pada tahun 2017. Sedangkan jumlah nilai investasi PMD/ PMA di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 67.471 juta dolar. Sebagian besar PMDN dan PMA yang ada di Kabupaten Sumba Barat bergerak di bidang usaha jasa pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dari total jumlah unit investasi yang ada, nilai investasi terhitung sebesar 33.403 juta dolar pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi 67.471 juta dolar pada tahun 2019.

Tabel 5.1  
Jumlah dan nilai investas Kabupaten Sumba Barat tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor PMDN	5	14	14	16
2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/ PMA) (dlm Jutaan)	33.403	33.403	67.471	67.471

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi di kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari potensi lokal khususnya sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Potensi wisata di kabupaten Sumba Barat tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Total objek wisata alam di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 sebanyak 43 destinasi, wisata rohani sebanyak 17 destinasi, dan wisata buatan sebanyak 13 destinasi. Selain wisata alam dan buatan, kabupaten Sumba Barat juga memiliki sejumlah situs wisata budaya dan wisata peradaban yakni 249 kampung wisata, dan 60 kampung adat. Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat juga telah menetapkan kalender wisata dengan 33 event wisata unggulan mulai dari bulan Januari sampai Desember sebagai panduan bagi para wisatawan. Potensi sektor pariwisata juga ditopang dengan keberadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel (14 unit), rumah makan (19 unit), wisma (1 unit), resort (4 unit), home stay (9



unit), restaurant (12 unit), café, kantin (1 unit), warung makan (30 unit), depot (1 unit), catering (5 unit).

Trend kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Khusus wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami trend penurunan yakni sebanyak 5.705 kunjungan pada tahun 2017, menurun menjadi 3.711 pada tahun 2018, menurun lagi menjadi 3.432 kunjungan pada tahun 2019, dan mengalami penurunan drastis menjadi 555 kunjungan pada tahun 2020. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan domestic cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai dari 2.976 kunjungan pada tahun 2017, meningkat menjadi 4.052 pada tahun 2019, dan menurun drastic pada tahun 2020 menjadi 1.451 kunjungan. Trend penurunan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi hamper di semua wilayah di NTT. Penurunan tersebut terjadi sebagai akibat dari bencana pandemic covid 19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada menurunnya nilai investasi di Kabupaten Sumba Barat selama periode 2019-2020.

Geliat investasi di Kabupaten Sumba Barat juga tidak terlepas dari kehadiran sektor IKM sebagai basis penggerak ekonomi daerah. Kehadiran sektor IKM sebagai bagian dari sektor tersier turut berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumba Barat. Total jumlah IKM yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 169 unit yang terdiri dari jenis usaha makanan, minuman, furniture industry kayu, barang dari kayu, dan gabus, serta industry barang lainnya dari kayu, anyaman dari Jerami, rotan, bambu dan sejenisnya. Jumlah IKM terbanyak terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak.

Kehadiran Lembaga DPMPTSP yang membidangi urusan investasi dan perizinan di kabupaten Sumba Barat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Sumba Barat. Berbagai langkah strategis telah ditempuh DPMPTSP dalam rangka penciptaan iklim investasi di antaranya penataan dan penguatan sumber daya kelembagaan, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, penertiban izin, penyiapan regulasi, serta memfasilitasi berbagai urusan di bidang investasi dan layanan perizinan. Meskipun masih mengalami



keterbatasan, kehadiran DPMPTSP diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan dan kendala di bidang investasi yang sering dikeluhkan oleh para investor baik yang sudah, sedang, dan akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

## 5.2. Analisis Potensi dan keunggulan Daerah

Konsep basis ekonomi untuk mengetahui suatu sektor pembangunan ekonomi wilayah dan kegiatan basis, yang dapat melayani pasar daerah itu sendiri maupun pasar luar daerah (Kadariah, 1985). Untuk menentukan sektor atau komoditas yang menjadi unggulan di suatu wilayah digunakan pendekatan dengan metode ekonomi, yaitu Metode *Location Quotion (LQ)* menggunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diolah dalam rumus tertentu. Nilai yang dihasilkan dari olahan tersebut yang menentukan apakah komoditas tersebut menjadi unggulan, andalah, potensial atau tidak.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani mengindikasikan dominasi sektor pertanian sebagai sektor andalan. Selain pertanian, Kabupaten Sumba Barat juga memiliki sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti kehutanan, perikanan, industry pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, konstruksi dan sebagainya, sebagaimana rinciannya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.2  
Nilai PDRB Kabupaten Sumba Barat berdasarkan harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018-2020

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku			PDRB Harga Konstan		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>PRIMER</b>	<b>28,89</b>	<b>28,40</b>	<b>27,95</b>	<b>12</b>	<b>7,51</b>	<b>8,82</b>
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	27,83	27,38	26,93	5,44	2,98	3,26
2	Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,02	1,02	6,56	4,53	5,56
<b>II</b>	<b>SEKUNDER</b>	<b>8,42</b>	<b>8,50</b>	<b>8,71</b>	<b>19,69</b>	<b>29</b>	<b>24,78</b>
1	Industri Pengolahan	1,72	1,70	1,83	6,98	2,32	12,05
2	Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	1,71	12,70	0,96
3	Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	4,68	7,28	6,57
4	Konstruksi	6,63	6,73	6,81	6,32	6,70	5,20
<b>III</b>	<b>TERSIER</b>	<b>62,69</b>	<b>63,11</b>	<b>63,33</b>	<b>64,56</b>	<b>65,59</b>	<b>53,23</b>
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	16,44	16,85	17,28	5,69	7,67	6,84



2	Transportasi dan Pergudangan	2,01	2,01	1,98	6.19	6.97	4.83
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	0,43	0,46	0,48	15.17	13.86	10.35
4	Informasi dan Komunikasi	5,18	4,87	4,69	3.35	2.35	2.47
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,07	5,06	5,00	7.32	4.08	4.28
6	Real Estate	2,74	2,69	2,53	4.91	4.83	0.20
7	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,19	2.17	2.32	2.85
8	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,04	17,44	17,78	2.66	6.76	8.11
9	Jasa Pendidikan	10,28	10,25	10,14	4.43	3.34	3.54
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	1,48	1,50	7.95	7.62	6.04
11	Jasa Lainnya	1,85	1,80	1,76	4.72	5.79	3.72

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

Tabel di atas memperlihatkan nilai PDRB menurut harga konstan dan harga berlaku di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi sekaligus mengidentifikasi potensi dan keunggulan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Berdasarkan data statistik sebagaimana dapat dilihat pada table 5.2 di atas, nilai PDRB tertinggi berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 diperoleh dari sektor industri pengolahan dan penyedia jasa akomodasi, makan, dan minum dengan nilai di atas 10. Artinya, pada tahun 2020 kedua jenis usaha inilah yang memberikan kontribusi tertinggi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana pada tahun sebelumnya dikontribusikan oleh sektor listrik dan gas. Selain kedua sektor tersebut, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor; Air, Sampah, Limbah dan Daur



Ulang; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan konstruksi juga berkontribusi bagi PDRB Kabupaten Sumba Barat dengan nilai di atas 5. Sedangkan PDRB terendah berasal dari sektor real estat dan pengadaan listrik dan gas dengan nilai di bawah 1. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan.

Sementara itu, PDRB tertinggi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019 diperoleh dari kontribusi Industri Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan dengan nilai di atas 25 basis poin selama 3 tahun terakhir. Artinya, ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor basis penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati demikian, perkembangan PDRB berdasarkan harga berlaku selama tiga tahun terakhir mengalami trend penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan perlahan-lahan telah mengalami pergeseran peran ke sektor sekunder yang secara bertahap terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Sedangkan yang terendah dengan nilai di bawah 1 basis poin diperoleh dari 4 sektor yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Perusahaan.

Beragam kecenderungan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prospek pengembangan investasi berbasis sektor di Kabupaten Sumba Barat ke depannya. Berdasarkan hasil analisis *Location quotient* (LQ), sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perkebunan) yang menjadi sektor andalan dapat diarahkan pada usaha penyediaan bahan baku untuk menopang pengembangan investasi di sektor sekunder (industry pengeolahan) dan sektor tersier (penyediaan akomodasi makan minum).

Selain analisis *Location Quotient*, penentuan sektor unggulan, andalan, dan potensial/penunjang, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh Ditjen Bangda Depdagri sebagai berikut:

Tabel 5.3  
 Kriteria penentuan sektor Unggulan, Andalan, dan Potensial

Unggulan	Andalan	Potensial/penunjang
Bercirikan daerah	Nilai tambah tinggi	Tenaga Kerja lokal besar
Tenaga kerja lokal besar	Daya saing tinggpasar luas	Pasar belum tergarap
Bahan baku lokal banyak, stabil, dab berkelanjutan	TK lokal besar	Memiliki Keunggulan komparatif
Nilai tambah tinggi	Efisiensi usaha tinggi	LQ < 1
Daya saing tinggi	LQ = 1	Share PDB < 10



Pasar luas	Share PDB < 10	
Ramah lingkungan		
LQ > I		
Share PDB > 10		

Sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas maka klasifikasi sektor di Kabupaten Sumba Barat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.4  
 Klasifikasi sektor Unggulan, Andalan, dan Potensial di kabupaten Sumba Barat

Unggulan	Andalan	Potensial/penunjang
Industri Pengolahan	Pertanian, Kelautan, Perikanan	Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan
		Informasi dan Komunikasi
		Konstruksi
		Listrik dan gas
		Real estate
		Jasa

Sumber: Hasil olah data sekunder

### 5.3. Sektor Potensial Daerah

Sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Sektor Primer, yaitu Sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Sektor ini meliputi Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian saat ini sudah menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Kabupaten Sumba Barat saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian.
2. Sektor Sekunder, yaitu Sektor yang mengolah bahan baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan/konstruksi, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Sektor yang dinilai potensial untuk dikembangkan di daerah yang didominasi oleh sektor pertanian adalah sektor industry pengolahan (agroindustry) sebagai kelanjutan dari usaha di bidang pertanian khususnya pengelolaan pasca panen.



3. Sektor Tersier yaitu Sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa. Kendati demikian, penyediaan jasa tetap memerlukan sarana dan prasarana fisik sehingga investasi di sektor ini juga dinilai cukup potensial untuk dikembangkan.

### **5.3.1. Sektor Primer**

Sektor primer umumnya menjadi sektor yang potensial di negara-negara agraris termasuk Indonesia. Kondisi demikian tidak hanya disebabkan oleh kondisi geografis dan klimatologis yang cenderung mendukung aktivitas di bidang pertanian, tetapi juga karena karakteristik social budaya masyarakat yang juga masih cenderung bersifat agraris. Masyarakat agraris ditandai dengan ketergantungan terhadap sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat,

Dewasa ini, keberadaan sektor primer mulai mengalami pergeseran secara perlahan akibat revolusi industry. Munculnya revolusi industry telah merubah paradigma pembangunan yang semula berorientasi sosialis kepada orientasi kapitalis. Tuntutan dunia usaha dan pembangunan yang berbasis dan berorientasi ekonomis secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat yang sebelumnya bercorak agraris dengan memanfaatkan teknologi tradisional kepada aktivitas industry demi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi.

Peran sektor primer umumnya berkurang pada masa peralihan sistem perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Peralihan ini dikenali sebagai fenomena transformasi struktural. Kegiatan ekonomi beralih dari sektor primer menuju ke sektor sekunder hingga ke sektor tersier. Pengurangan peran ditandai dengan beralihnya tenaga kerja dan investasi dari sektor primer menuju ke sektor sekunder atau tersier. Pengurangan peran pada sektor primer merupakan salah satu metode pencapaian pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural. Tenaga kerja dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.



Dampak lain dari pergeseran tersebut adalah penggunaan dan daya serap tenaga kerja. Tuntutan tenaga kerja pada sektor primer cenderung mengutamakan jumlah daripada skill/kompetensi. Hal itu dikarenakan sektor pertanian yang bercorak tradisional lebih mengutamakan ketersediaan tenaga manusia untuk aktivitas pertanian. Selain itu orientasi pengelolaan sektor pertanian yang masih bersifat tradisional cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Barat masih didominasi oleh sektor primer. Dominasi sektor primer di Kabupaten Sumba Barat teridentifikasi melalui PDRB daerah yang masih bercorak antroposentris dengan sektor primer sebagai basis perekonomian daerah. Sektor primer yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten adalah sektor pertanian dan sektor perikanan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

#### a. Pertanian

Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi mata pencaharian utama penduduk Sumba Barat. Pada tahun 2020, sektor pertanian menyumbang PDRB sebanyak Rp2.179.620. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada tahun 2018 sebanyak 3,55 ton/ha, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 4 ton/ha. Pada tahun 2020 produktivitas turun menjadi 3,55 ton/ha dibandingkan tahun 2018. Jumlah ini juga tidak mencapai target pada tahun 2019 sebanyak 4,5 ton/ha.

Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2020 mencapai 19,23%. Sektor pertanian menyumbang kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 28,22%, tahun 2017 menjadi sebesar 27,81%, dan pada tahun 2018 sebesar 27,43%, dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,78%.



Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, di antaranya adalah sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor perikanan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Tanaman Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman (Saparinto dan Hidayati, 2006).

Sementara upaya untuk meningkatkan produksi padi dihadapkan pada ancaman utama, yaitu: 1) stagnasi dan pelandaian produktivitas akibat kendala teknologi dan input produksi, 2) instabilitas produksi akibat serangan hama-penyakit dan cekaman iklim, 3) penurunan produktivitas akibat degradasi sumber daya lahan dan air serta penurunan kualitas lingkungan, dan 4) penciptaan lahan, khususnya lahan sawah beririgasi akibat dikonversi menjadi lahan nonpertanian (Praptono B, 2010).

Statistic tanaman pangan per komoditi di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 5.5  
 Luas Lahan dan Produktivitas Tanaman Pangan di kabupaten sumba Barat  
 Tahun 2020

Komoditi	Luas Lahan (Km2)	Produktivitas	Kecamatan
Padi	1045	2987,92	Lamboya
	1554	5658,23	Wanukaka
	757	6388,61	Laboya Barat
	3937	8621,74	Loli
	2222	7081,78	Kota Waikabubak
	75	1521,96	Tana Righu
Jagung	580,0	1699,4	Lamboya
	650,0	1911,0	Wanukaka
	933,0	2,836,3	Laboya Barat
	1395,9	4076,0	Loli
	502,0	1423,7	Kota Waikabubak
	1950,0	5869,5	Tana Righu
Ubi Kayu	56	553,8	Lamboya
	226	2165,1	Wanukaka



	34	329,5	Laboya Barat
	165	1562,6	Loli
	14	131,0	Kota Waikabubak
	53	513,0	Tana Righu
<b>Ubi Jalar</b>	42	303,24	Loli
	6	43,32	Kota Waikabubak
	15	108,30	Tana Righu
<b>Kacang Hujau</b>	2	14,40	Wanukaka
	1	7,30	Laboya Barat
	2	14,3	Kota Waikabubak
	3	21,60	Tana Righu

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, 2021

Table di atas memperlihatkan sebaran komoditi di tiap kecamatan di Kabupaten Sumba Barat berdasarkan luas lahan dan produktivitasnya pada tahun 2020. Diketahui bahwa luas lahan terbesar dengan produktivitas tertinggi untuk komoditi padi terdapat di Kecamatan Loli dan Kota Waikabubak. Luas lahan dan produktivitas tertinggi untuk komoditi jagung terdapat di Kecamatan Tana Righu dan Loli, untuk komoditi ubi kayu terdapat di Kecamatan Wanukaka dan Loli, untuk komoditi ubi jalar terdapat di Kecamatan Loli dan Tana Righu, dan untuk komoditi kacang hijau terdapat di Kecamatan Tana Righu dan Wanukaka.

## 2) Tanaman Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam dictum



menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.

Sebagai daerah agraris, Kabupaten Sumba Barat memiliki sejumlah komoditi pada sub sektor tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.6  
 Jenis komoditi, luas lahan, dan produktivitas tanaman perkebunan per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020

Komoditi	Luas Lahan (Km <sup>2</sup> )	Produktivitas (Ton)	Kecamatan
<b>Kopi</b>	228	18.00	Lamboya
	217	8.00	Wanukaka
	41,11	10.00	Kota Waikabubak
	285	10.00	Loli
	328,33	16.00	Tana Righu
	170	10.00	Laboya Barat
<b>Kakao</b>	214	8.00	Lamboya
	15	3.00	Wanukaka
	56	5.00	Kota Waikabubak
	6	2.00	Loli
	46	6.00	Tana Righu
	360	10.00	Laboya Barat
<b>Jambu Mete</b>	355	28.00	Lamboya
	240	16,8	Wanukaka
	27	3.00	Kota Waikabubak
	46	3.00	Loli
	588	118.00	Tana Righu
	560	112.00	Laboya Barat
<b>Kelapa</b>	635	213,75	Lamboya
	591	189.00	Wanukaka
	34	4,4	Kota Waikabubak
	105	12.00	Loli
	540	159,5	Tana Righu
	755	217,5	Laboya Barat
<b>Kemiri</b>	33	16,5	Lamboya
	33	22.00	Wanukaka
	170	448.00	Kota Waikabubak
	395	864.00	Loli
	498	1,100.00	Tana Righu
	29	16.00	Laboya Barat
<b>Pisang</b>	13440	63,56	Lamboya



	4643	8,72	Wanukaka
	679	5,79	Kota Waikabubak
	2825	4,68	Loli
	14220	126,00	Tana Righu
	1749	24,0	Laboya Barat

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, 2021*

Table di atas menunjukkan sebaran sub sektor tanaman perkebunan per komoditi di setiap kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Luas lahan dan produktivitas tertinggi untuk jenis komoditi kopi terdapat di wilayah Kecamatan Tana Righu, jenis komoditi kakao terdapat di Kecamatan Laboya Barat, jenis komoditi jambu mete terdapat di Kecamatan Tana Righu, jenis komoditi kelapa di Kecamatan Laboya Barat, dan jenis komoditi kemiri dan pisang di kecamatan Tana Righu.

### 3) Hortikultura

Secara harfiah hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan tanaman kebun. Akan tetapi para pakar mendefinisikan hortikultura sebagai ilmu yang mempelajari budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga, dan tanaman hias. Hortikultura merupakan salah satu sub sektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Indonesia memiliki aneka produk hortikultura, dengan ragam plasma nutfah dan varietas yang memungkinkan bagi upaya pengembangan buah, sayuran dan bunga.

Komoditas hortikultura yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Pengelolaan usahatani hortikultura secara agribisnis dapat meningkatkan pendapatan petani dengan skala usaha yang kecil, karena nilai ekonomi komoditas hortikultura yang tinggi. Produk hortikultura terbesar adalah buah-buahan, diikuti sayuran dan tanaman hias.

Hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus antara lain: 1) Mudah atau cepat busuk (perishable), bila disimpan tanpa perlakuan khusus, misalnya dengan suhu rendah (4 °C) atau pelapisan lilin, karena dipanen dalam bentuk segar. Sejak panen sampai pasar memerlukan penanganan secara cermat dan



efisien karena akan mempengaruhi kualitas dan harga pasar; 2) Memiliki nilai estetika, jadi harus memenuhi keinginan masyarakat umum. Keadaan ini sangat sulit karena tergantung pada cuaca, serangan hama dan penyakit, namun dengan biaya tambahan kesulitan itu dapat diatasi; 3) Produksi umumnya musiman, beberapa diantaranya tidak tersedia sepanjang tahun.

Jenis tanaman hortikultura yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat beserta luas panen dan luas produksinya dapat dilihat secara rinci pada table berikut.

Tabel 5.7  
Jenis tanaman, luas panen, dan luas produksi tanaman hortikultura  
di kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

Jenis Tanaman	Tahun 2020	
	Luas Panen (Ha)	Luas Produksi (Ton)
Bawang Daun	7	324,1
Bayam	42	1.184,4
Buncis	23	1.198,3
Cabe Besar	4	146
Cabe Rawit	21	768,6
Kacang Panjang	17	554,2
Kangkung	52	3.099,2
Ketimun	8	752,8
Kubis	4	358,4
Labu Siam	10	3.199
Pitsai	64	33,088
Terong	23	2.134,4
Tomat	14	938
Wortel	7	597,8

Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Sumba Barat, 2021

Table tersebut menunjukkan keanekaragaman jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Sumba Barat. Kangkung, terong, bayam, dan buncis merupakan jenis tanaman hortikultura yang dinilai cukup potensial di Kabupaten Sumba Barat dengan luas lahan dan tingkat produktivitas yang tinggi.

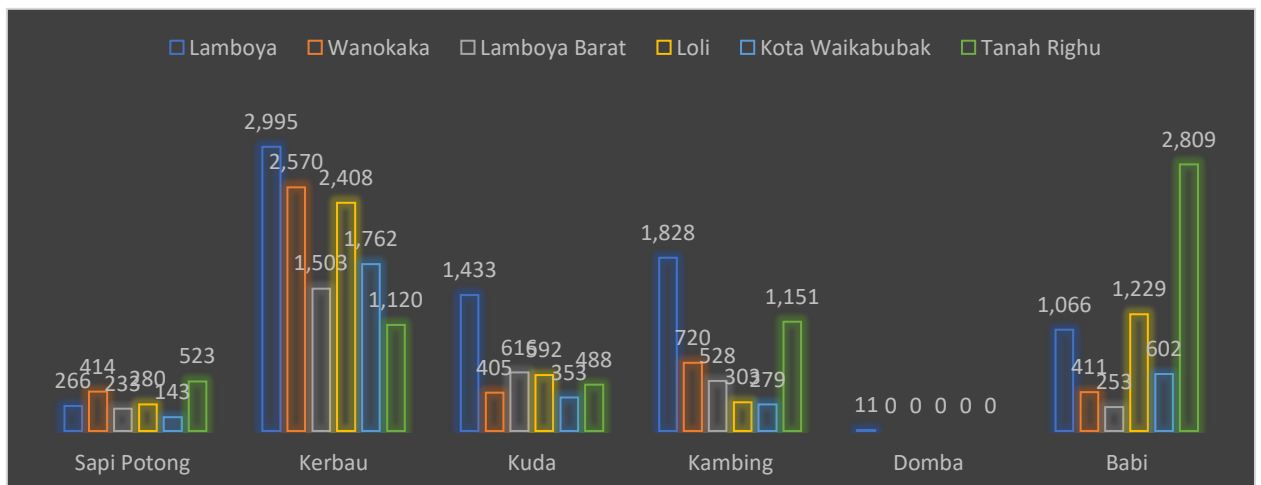
#### 4) Peternakan

Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak ditanakkan di antaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah.



Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak di antaranya pemberian makanan, pemuliaan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif, dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas, dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten yang kaya akan potensi ternak. Kondisi sosiokultural mengharuskan masyarakatnya beternak terutama ternak babi, kerbau dan kuda. Ketiga jenis hewan ternak tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk urusan adat-istiadat dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Statistic peternakan di kabupaten Sumba Barat tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut.



Grafik 5.1

Populasi ternak besar per Kecamatan di kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

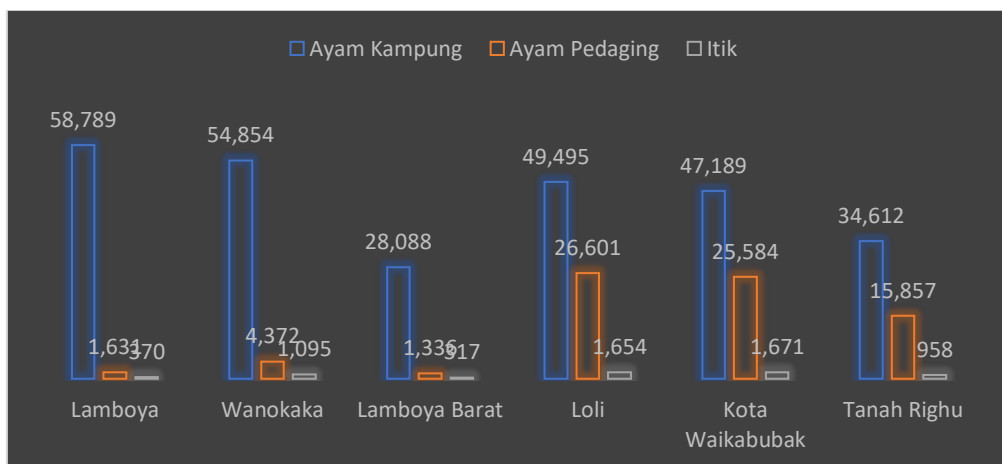
Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

Table di atas menunjukkan jumlah populasi ternak terbanyak terdapat di kecamatan Lamboya yang didominasi oleh jenis ternak kerbau, kambing, babi,



dan kuda. Tingginya populasi jenis hewan kuda di Kecamatan Lamboya erat kaitannya dengan tradisi adat pasola yang menggunakan jenis hewan kuda sebagai hewan tunggangan pada saat penyelenggaraan pasola. Selain kerbau, kambing, kuda, dan sapi juga menjadi hewan yang populasinya cukup tinggi di Kecamatan Lamboya dan Tanah Righu. Sebaran ternak jenis kerbau hampir merata di setiap wilayah kecamatan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi social budaya masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang menempatkan kerbau sebagai hewan sacral dalam urusan adat-istiadat.

Sedangkan untuk kategori ternak jenis unggas dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 5.2**

Populasi ternak unggas per Kecamatan di kabupaten Sumba Barat tahun 2020

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

**b. Perikanan**

Kabupaten Sumba Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat (RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031). Dimana arah pengembangan wilayah tersebut dijelaskan bahwa potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka. Ketiga daerah tersebut berada pada wilayah kawasan pesisir selatan dengan luas 421 km<sup>2</sup> dan panjang pantai ± 56 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.



Secara keseluruhan, potensi perikanan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.8  
Desa Yang Mempunyai Potensi Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA	Perikanan Tangkap	laut	Tawar	Payau
1	Laboya Barat	Harona Kalla				Proses Identifikasi
		Patiala Dete				
		Gaura				
		Watana				Proses Identifikasi
		<b>Jumlah Laboya Barat</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
2	Iamboya	Watu Karere			Proses Identifikasi	
		Patiala Bawa				
		Sodana				
		Weeibo				
		Laboya Bawa				
		Laboya Dete				
		Kabakarudi				
		<b>Jumlah Lamboya</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
3	Wanukaka	Waihura				Proses Identifikasi
		Baliloku				Proses Identifikasi
		Pahola				
		Rua				Proses Identifikasi
		Hobawawi				
		Hupumada				
		Praibakul				
		<b>Jumlah Wanukaka</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
4	Loli	Lapale				
		Kel.Weekaroku				
		Dedekadu				
		Beradolu				
		Kel. Sobawawi				
		Dokaka				
		Padira Tana				
		Kel. Loda Pare				
		Uburaya				
		Ubu Pede				
		Tanarara				
		Baliledo				
<b>Jumlah Loli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		
5	Kota Waikabubak	Kel.Sobawawi				
		Tebara				
		Kalimbukuni				
		Kel. Kampung Sawah				
		Kel. Kampung Baru				
		kel. Komerda				
		kel. Wailiang				
		kel. Padaeweta				
<b>Jumlah Waikabubak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		



6	Tanah Righu	Lokory	1	1		Proses Identifikasi
		Malaka			Proses Identifikasi	
		<b>Jumlah Tanah Righu</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Total</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>1</b>

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

### 5.3.2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder adalah salah satu sektor ekonomi bersama dengan sektor primer dan sektor tersier. Kegiatan ekonomi dalam sektor sekunder ialah mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi. Bidang pekerjaan yang umum pada sektor sekunder ialah manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses produksinya, industri pada sektor sekunder umumnya memerlukan konsumsi energi dalam jumlah besar, memerlukan pabrik dan mesin, serta menghasilkan limbah. Sektor sekunder umumnya dilaksanakan dalam bidang manufaktur dan konstruksi. Bentuk kegiatannya umumnya adalah pengolahan bahan baku dan pengadaan barang setengah jadi. Sektor sekunder berpusat pada industri pengolahan, pengadaan listrik, gas dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah hasil daur ulang.

Sektor sekunder umumnya mulai menggantikan peran sektor primer pada masa peralihan sistem perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Peralihan ini dikenal sebagai fenomena transformasi struktural. Kegiatan ekonomi beralih dari sektor primer menuju ke sektor sekunder kemudian berlanjut hingga ke sektor tersier. Pengurangan peran ditandai dengan beralihnya tenaga kerjadan investasi dari sektor primer menuju ke sektor sekunder atau tersier. Pengurangan peran pada sektor primer merupakan salah satu metode pencapaian pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural. Tenaga kerja dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.

#### a. Industri Pengolahan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Kerajinan, Pakan ternak)

Salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sektor industri pengolahan berbasis pertanian. Oleh karena itu, sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (*the leading sector*) terhadap perkembangan sektor perekonomian



lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya (Saragih, 2010).

Sebagai negara agraris yang bertumpu pada sektor pertanian, prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor industri pengolahan yang utama adalah untuk menopang sektor pertanian (agroindustri) dan sektor-sektor lainnya. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer (pertanian), meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan pangsa sektor tersier (jasa) dimana kontribusi sektor industri meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1998).

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu:

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor sebesar US\$111 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Capaian ini meningkat 34,12 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar US\$82,76 miliar. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar hingga 78,16 persen dari total nilai ekspor nasional selama delapan bulan pada tahun 2021 yang mencapai US\$142,01 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor industri pengolahan pada bulan Agustus 2021 sebesar US\$16,37 miliar, meningkat 20,67 persen dibanding Juli 2021 (month-to-month) dan melonjak 52,62 persen dibanding Agustus 2020 (year-on-year). Sektor industri memberikan kontribusi terbesar



hingga 76,42 persen terhadap total nilai ekspor nasional pada Agustus 2021 sebesar US\$21,42 miliar.

Industri mempunyai peranan sebagai (*leading sector*) sektor pemimpin dalam Arsyad (2010:442), maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Misalkan saja sektor pertanian dan jasa, sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Serta industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau periklanan, yang kesemuanya itu akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.

Negara-negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (*the leading sector*) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya (Dumairy, 1996:230).

Usaha percepatan pembangunan ekonomi industrialisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah. Proses industrialisasi yang dilakukan di Indonesia sejak Pelita I telah menimbulkan terjadinya transformasi struktural. Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral mengalami pergeseran. Awalnya sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar. Seiring dengan berkembang pesatnya industrialisasi serta didukung kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing ke Indonesia, maka sektor *manufaktur* ini mengalami peningkatan sehingga mulai menggeser sektor pertanian (Kuncoro, 2007:96).

Perubahan sektor industri yang pesat beberapa tahun terakhir telah menggeser peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional maupun regional. Kontribusi sektor ini memberikan nilai tambah terbesar di antara sembilan sektor ekonomi lainnya, perkembangan tersebut sejalan dengan



meningkatnya permintaan akan produk barang jadi atau setengah jadi baik domestik maupun internasional. Walaupun secara absolut sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun secara relatif sektor pertanian mengalami penurunan sejalan dengan pertumbuhan sektor industri. Hal ini menunjukkan semakin mengecilnya kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi nasional.

Pembangunan industri sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia diharapkan mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasar Pancasila dan UUD 1945 (Arsyad, 2010:453). Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai *leading sector* atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2010:442).

Salah satu sektor yang berperan penting dalam mensukseskan pembangunan nasional ialah sektor industri. Pada pemerintah daerah peran sektor industri bisa dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB. Kontribusi sektor industry (pengolahan) pada Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016 sebanyak 1,72%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi menjadi 1,70%. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 1,71%, kemudian kembali mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 1,69% tahun 2019 namun naik lagi di tahun 2020 menjadi 1,83%. Pertumbuhan industri pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,25%. Pada tahun 2019, pertumbuhan industri meningkat menjadi 5,50%. Pada tahun 2020, terdapat penambahan jumlah industri kecil di kabupaten Sumba Barat sebesar 100%. Secara rinci urusan perindustrian Kabupaten Sumba Barat terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 5.9

Sebaran sektor industri per kecamatan di kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

Jenis Industri	Kecamatan						Total
	Kota Waikabubak	Loli	Wanukaka	Tana Righu	Lamboya	Laboya Barat	
<b>Makanan</b>	37	3	14	1	23	2	80
<b>Minuman</b>	4	0	0	1	0	0	5



<b>Furniture</b>	18	14	14	0	1	1	48
<b>Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya</b>	0	6	13	2	13	0	34
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>167</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis industry yang paling banyak berkembang di Kabupaten Sumba Barat adalah jenis industry makanan, furniture, pengolahan kayu, rotan dan sejenisnya. Perkembangan sektor industry dimaksud tidak terlepas dari kondisi ketersediaan bahan baku terutama bahan baku makanan yang bersumber dari sektor pertanian.

#### b. Listrik dan Gas

Sektor ini merupakan sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi maupun untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kontribusi sektor ini dalam menyumbang pendapatan (PDB) mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan sektor lainnya, namun tanpa adanya sektor tersebut maka perekonomian tidak akan berjalan, karena pentingnya peranan listrik, gas, dan air bersih dalam kegiatan ekonomi.

Sub sektor listrik meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik, untuk dijual kepada konsumen, baik oleh PLN maupun bukan PLN. Sub sektor ini berperan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga maupun sub sektor industry.

Fluktuasi permintaan dan penawaran minyak di pasar dunia akan mendorong gas alam menjadi salah satu alternatif energi paling ekonomis. Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam dalam bentuk cair (LNG) terbesar di dunia saat ini, walaupun dari segi cadangan hanya 1,4% dari cadangan dunia. Pengguna gas bumi



di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu segmen rumah tangga, komersial, dan industri

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Sedangkan air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air juga merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA).

Kontribusi sektor listrik dan gas terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat selama tiga tahun terakhir tidak signifikan. Namun pada tahun 2019 sektor ini memberikan sumbangan cukup besar bagi PDRB Kabupaten sumba Barat. Namun Kembali menurun pada tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun 2019, sektor ini sedang dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan elektrifikasi masyarakat kabupaten Sumba Barat.

Tabel 5.10  
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) pada Ranting Waikabubak Menurut Kecamatan di Kabupaten sumba Barat, 2020

Kecamatan	Daya Terpasang	Produksi Listrik KWh	Listrik Terjual KWh	Dipakai Sendiri KWh	Susut / Hilang KWh
Lamboya	5,482	15,662,217	17,324,257	82,892	-
Wanokaka	5,482	15,662,217	17,324,257	82,892	-
Laboya Barat	5,482	15,662,217	17,324,257	82,892	-
Loli	5,482	15,662,217	17,324,257	82,892	-
Kota Waikabubak	5,482	15,662,217	17,324,257	82,892	-
Tana Righu	5,482	15,662,217	17,324,257	82,892	-
<b>Sumba Barat</b>	<b>32,892</b>	<b>93,973,302</b>	<b>103,945,542</b>	<b>497,352</b>	<b>-</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2021

c. Penyediaan Air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses



pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

Subgolongan penyediaan air mencakup kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan industri. Pengumpulan air dari berbagai sumber dan distribusi ke berbagai daerah juga termasuk subgolongan ini. Pengoperasian saluran irigasi juga termasuk dalam subgolongan ini, namun penyediaan jasa pengairan (irigasi) melalui mesin penyemprotan dan jasa penunjang pertanian sejenisnya, tidak termasuk dalam subgolongan ini. Subgolongan ini mencakup: Pengumpulan air dari sungai, danau, sumur dan sebagainya; Pengumpulan air hujan; Pemurnian air untuk tujuan suplai atau penyediaan air; Penanganan air untuk industri dan tujuan lainnya; Penghilangan zat garam dari air laut atau air tanah untuk memperoleh air sebagai produk pokok; Penyaluran air dengan alat transportasi truk atau lainnya; Pengoperasian saluran irigasi.

Pengelolaan sampah mencakup pengumpulan dan pengolahan sampah berbahaya dan tidak berbahaya. Pengumpulan sampah tidak berbahaya mencakup: Pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan; Pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang; Pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai; Pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum; Pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan; Pengumpulan dan pembersihan runtuh atau puing; Pengumpulan sampah dari pabrik tekstil; Pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya. Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha



pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

Pengumpulan sampah berbahaya mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Subgolongan ini mencakup: Pengumpulan sampah berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai. Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.

Pengelolaan sampah tidak berbahaya mencakup mencakup pembuangan, pengelolaan sampah padat dan tidak padat yang tidak berbahaya. Subgolongan ini mencakup: Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya; Pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya; Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan; Produksi kompos dari sampah organik. Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.



Pengelolaan sampah berbahaya mencakup pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Subgolongan ini mencakup: Pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya; Pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya; Pembakaran sampah berbahaya; Pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah; pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan. Subgolongan ini mencakup kegiatan pengelolaan sampah logam dan nonlogam dan bahan lainnya menjadi bahan baku sekunder, biasanya meliputi proses perubahan secara mekanik atau kimia.

Daur ulang mencakup daur ulang bahan-bahan dari kumpulan sampah, seperti: Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah yang tidak berbahaya; Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali, seperti kertas, plastik, kaleng bekas minuman dan logam bekas, ke dalam kelompok yang berbeda.

Kontribusi sektor pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang di Kabupaten Sumba Barat cukup tinggi bila dibandingkan dengan sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, dan sektor jasa. Artinya, sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan di wilayah kabupaten Sumba Barat. Dengan berkembangnya sektor industry, penyedia akomodasi makan minum, real estate, dan sektor lain yang berpotensi menghasilkan limbah dan berpotensi terhadap pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk, sektor ini dapat dikembangkan dan diarahkan untuk menopang sektor keberlanjutan sektor lainnya.

d. Konstruksi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan



gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain.

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangun(an) yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain lain.

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya). Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, perencanaan yang efektif sangatlah penting. Hal ini terkait dengan rancang-bangun (desain dan pelaksanaan) infrastruktur yang mempertimbangkan mengenai dampak pada lingkungan/AMDAL, metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan/anggaran, disertai dengan jadwal perencanaan yang baik, keselamatan lingkungan kerja, ketersediaan material bangunan, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan yang disebabkan oleh keterlambatan persiapan tender dan penawaran, dan lain-lain.



Kontribusi sektor ini terhadap PDRB kabupaten Sumba Barat selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kendati demikian, sektor ini dinilai cukup potensial untuk dikembangkan mengingat Kabupaten Sumba barat ke depannya akan berkembang seiring dengan kebijakan nasional terkait pengembangan Kawasan strategis nasional. Dengan semakin berkembangnya wilayah ini sebagai daerah tujuan wisata dan pengembangan Kawasan industry, besar kemungkinan sektor ini akan sangat dibutuhkan ke depannya.

### **5.3.3. Sektor Tersier**

Sektor tersier (juga dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa) adalah satu dari tiga sektor ekonomi. Dalam ekonomi, sektor tersier merupakan lapangan pekerjaan yang saling berkaitan dengan dua sektor ekonomi lainnya yaitu sektor sekunder (manufaktur) dan sektor primer (pertambangan, pertanian dan perikanan). Definisi umum mengenai sektor tersier adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan suatu jasa. Sektor tersier tidak mengutamakan produksi terhadap produk akhir seperti halnya pada sektor sekunder. Terkadang sebuah sektor tambahan yaitu sektor kuartener, diartikan sebagai berbagi informasi. Perolehan informasi secara normal berasal dan dimiliki oleh sektor tersier.

Bisnis sektor jasa yang semakin meningkat berfokus pada ide ekonomi pengetahuan. Kegiatan ekonomi berlangsung dengan memahami apa yang diinginkan konsumen dan cara memenuhi kepuasan konsumen dengan kondisi yang efektif dan efisien. Satu contoh baik dari hal ini ialah industri perbankan yang telah mengalami perubahan besar beberapa tahun belakangan ini. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bank dengan cepat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Banyak komunitas bank dan bangunan telah bergabung untuk membentuk bisnis yang lebih mudah yang mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dari basis pengguna luas. Kunci proses ini adalah memperoleh informasi mengenai pengguna jasa dan memberikan mereka produk-produk baru.

Sektor tersier umumnya mulai menggantikan peran sektor primer pada masa peralihan sistem perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Kegiatan ekonomi beralih dari sektor primer menuju ke sektor sekunder hingga ke sektor tersier. Pengurangan peran ditandai dengan beralihnya tenaga kerjadan



investasi dari sektor primer menuju ke sektor sekunder atau tersier. Pengurangan peran pada sektor primer merupakan salah satu metode pencapaian pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural. Tenaga kerja dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.

a. Sektor Perdagangan

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

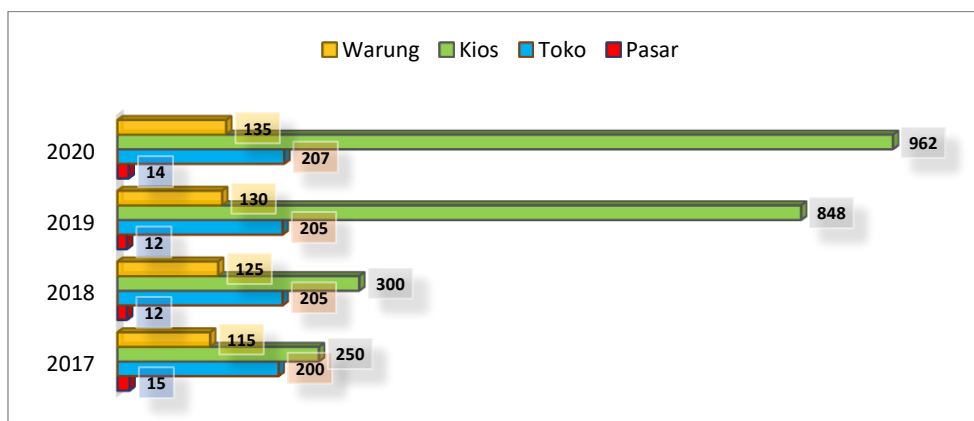
Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi



dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Perdagangan menjadi salah satu sektor yang keberadaannya selalu stabil karena berkaitan erat dengan aktivitas social ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Meski dalam skala yang sangat variative, sektor ini mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari waktu ke waktu. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi namun cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun dan sebarannya bisa menjangkau berbagai wilayah bahkan hingga ke pelosok-pelosok.



Grafik 5.3

Jumlah sektor perdagangan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka, 2021



b. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Urgensi sektor ini sangat bergantung pada pola hidup masyarakat di suatu wilayah.

Berkembangnya era digital seperti sekarang menenpatkan informasi dan komunikasi sebagai komoditi yang penting. Bahkan informasi sudah terkategori sebagai komoditi yang bernilai ekonomis manakala tidak semua orang mampu mengaksesnya dengan mudah. Tuntutan era digital mengharuskan masyarakat berlomba-lomba mendapatkan informasi baik untuk kebutuhan dasarnya maupun untuk kebutuhan sampingan.

Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat selama tiga tahun terakhir cukup rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Artinya, sektor ini belum banyak berkembang di Kabupaten Sumba Barat. Hal itu ditandai dengan minimnya ketersediaan jaringan internet sebagai prasarana penunjang komunikasi jarak jauh. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi baik melalui media televisi maupun media social masih sangat terbatas. Masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan telekomunikasi.

Kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi pengembangan sektor ini ke depannya terutama untuk menunjang sektor lain seperti sektor Pendidikan, Kesehatan, administrasi perkantoran, industry dan sektor pariwisata, dan sebagainya. Tuntutan era digital yang serba cepat dan serba ketat mengharuskan setiap orang berlomba-lomba untuk mendapat informasi terbaru. Selain itu, berbagai urusan domestic masyarakat sudah mulai digantikan perannya oleh teknologi informasi dan komunikasi.

c. Real estate

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estate, penyewaan real estate dan penyediaan jasa real estate lainnya, seperti jasa penaksir real estate



atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estate. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estate. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020 menurun jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain, sektor ini menjadi penyumbang terendah dalam postur PDRB Kabupaten Sumba Barat dengan nilai sebesar 0,20%. Artinya, sektor ini belum menjadi prioritas untuk dikembangkan saat ini. Namun ke depannya sektor ini perlu dipertimbangkan untuk aktivitas investasi mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan arus migrasi penduduk sebagai konsekuensi dari pengembangan sektor pariwisata, perindustrian dan sebagainya.

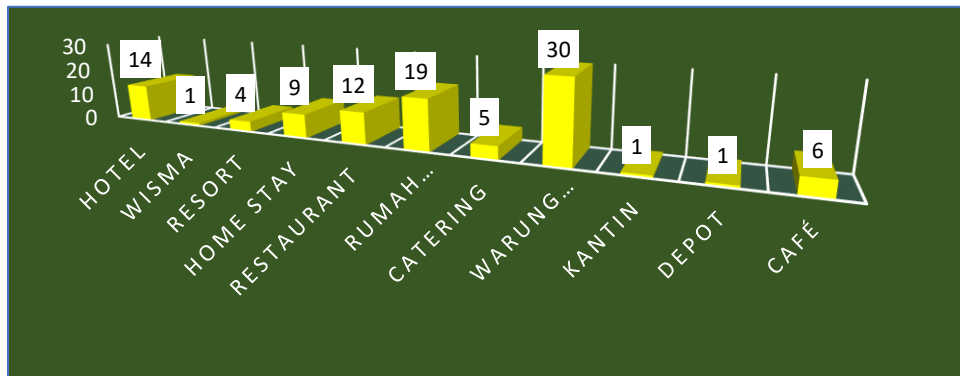
d. Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020 termasuk cukup besar. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan dengan nilai 10,35%. Nilai tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tingginya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari keberadaan Kabupaten Sumba Barat sebagai daerah tujuan wisata. Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat telah banyak menarik minat investor untuk berinvestasi di bidang penyediaan akomodasi makan minum dan berbagai jenis usaha penunjang aktivitas



kepariwisataan. Bahkan satu-satunya hotel terbaik di dunia berada di kabupaten Sumba Barat.



Grafik 5.4

Jumlah sektor akomodasi makan minum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020  
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat, 2021

#### 5.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat

Prospek pengembangan investasi salah satunya harus mempertimbangkan aspek keruangan/peruntukkan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007). Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan yang dapat memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Setiap kabupaten/kota perlu mempunyai pedoman dalam pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW pada Kabupaten merupakan rencana pemanfaatan ruang kawasan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Chapin (1979) bahwa rencana pemanfaatan ruang suatu wilayah digunakan untuk menentukan penggunaan lahan yang sesuai untuk ruang terbangun dan ditujukan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Dari fungsi



tersebut, maka hal terpenting dalam pemanfaatan ruang adalah mempertemukan penggunaan lahan yang bervariasi dengan jumlah ketersediaan lahan yang ada dimana tetap memperhatikan kesesuaian lahan untuk tiap-tiap jenis pemanfaatan.

Oleh karena itu, dalam menentukan suatu aktivitas yang akan dilakukan pada suatu ruang perlu adanya perhatian dari sisi demand dan supply yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam pemanfaatan ruang. Menurut Budihardjo (2009), umumnya konflik pemanfaatan ruang yang terjadi antara lain: 1. Peran serta maupun aspirasi masyarakat dalam proses tata ruang dan lingkungan hidup masih terbatas; 2. Kekurangpekaan para penentu kebijakan dan perencana akan keadaan lingkungan dan masyarakat setempat; 3. Penekanan perencanaan wilayah cenderung lebih mengutamakan pada aspek lingkungan binaan dan kurang memperhatikan pendayagunaan atau optimalisasi lingkungan alamiah.

Dengan adanya perubahan paradigma dan dasar hukum dalam penyusunan Penataan ruang yang sangat mendasar, maka pada tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012–2032 sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Detail dan Rencana Zonasi di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun tujuan penataan ruang Kabupaten Sumba Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing yang didukung oleh agroindustri dan ekowisata yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agroindustry dan ekowisata.
- 2) Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan Kawasan budidaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.



- 3) Terbentuknya pola dan struktur ruang wilayah yang dapat dijadikan acuan spasial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sumba Barat, termasuk di dalamnya penetapan kawasan strategis potensial dalam kawasan budidaya
- 4) Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan wilayah yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agriindustri dan ekowisata
- 5) Terkoordinasinya program antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian
- 6) Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta agroindustri dan ekowisata.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah, maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi:

- 1) Pemantapan agroindustri melalui pengembangan system agropolitan dan minapolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perikanan;
- 2) Pemantapan pusat pelayanan wilayah dalam menata distribusi penduduk sesuai daya tampung wilayah;
- 3) Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan system permukiman pedesaan;
- 4) Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah meliputi transportasi, energi, sumberdaya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
- 5) Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan;
- 6) Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, agroindustri, minapolitan dan ekowisata; dan



- 7) Pengembangan, pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai.

Kabupaten Sumba Barat memiliki beberapa lokasi yang memiliki potensi bencana seperti kebakaran, longsor, pergerakan tanah dan banjir. Kawasan rawan longsor yaitu daerah Lapale, Rua, Sodana, Raka, Dira Tana, Parimotu, Lolo Kolaka, Waibangga. Sedangkan daerah-daerah rawan banjir adalah daerah berada di sekitar daerah aliran sungai, yaitu sungai Kadengara, Lahi Kaninu, Tabaka Dana, Loko Bakul dan Loko Kalada dan wilayah pesisir antara lain Waihura, Wanokaka, Rua, Marosi dan Mambang.

Selain potensi bencana alam di Kabupaten Sumba Barat ada potensi bencana sosial berupa kebakaran kampung mengingat jumlah perkampungan sangat banyak, dimana kampung-kampung situs berjumlah 25 kampung, kampung adat berjumlah lebih dari seratus kampung. Selain itu, pola permukiman di kampung-kampung jarak antar rumah sangat berdekatan satu sama lain dan beratapkan alang-alang sehingga rawan terhadap kebakaran.

1) Rawan longsor

Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sumba Barat terdapat di Kecamatan Wanukaka; Kecamatan Laboya Barat; Kecamatan Lamboya, Kecamatan Kota Waikabubak dan Kecamatan Loli seluas kurang lebih 1.407,9 Ha. Pada lokasi ini sering mengalami gerakan tanah atau longsor terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi.

2) Rawan banjir

Kawasan rawan bencana banjir hampir meliputi seluruh wilayah sepanjang pinggir sungai yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yaitu tergenangnya areal pertanian karena terletak di dekat sungai. Kawasan rawan bencana banjir yang ada di Kabupaten Sumba Barat berada di sekitar sungai meliputi seluruh wilayah di pinggir sungai antara lain yaitu Sungai Kadengar di Kecamatan Lamboya, Sungai Loko Bakul di Kecamatan Wanukaka, Sungai Loko Kalada di Kecamatan Loli, dan Sungai Tabaka Dana di Kecamatan Kota Waikabubak.



### 3) Rawan abrasi pantai

Kabupaten Sumba Barat memiliki panjang garis pantai sekitar kurang lebih 59 km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai. Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten Sumba Barat meliputi Kawasan Pantai Rua, Pantai Wanukaka dan Pantai Karewe.

### 4) Rawan Kekeringan

Di Kabupaten Sumba Barat terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi rawan bencana, yaitu lokasi yang berada di sekitar daerah aliran sungai antara lain wilayah Kadengara, Lahi Kaninu dan wilayah pesisir antara lain Waihura, Rua, Kkere Wei, marosi dan Mambang. Selain itu, potensi bencana yang diperkirakan dapat terjadi antara lain: bencana kekeringan akibat musim kemarau yang panjang diikuti munculnya berbagai penyakit antara lain: busung lapar, kekurangan gizi, diare, dan penyakit tanaman yang dapat menurunkan produksi pertanian serta berbagai jenis penyakit ternak yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak dan menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Untuk mengatasi potensi bencana tersebut, ada berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, yakni sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan bencana alam dengan membentuk tim reaksi cepat penanggulangan bencana alam, yang juga telah melaksanakan upaya sosialisasi di tingkat kecamatan.

# BAB VI FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT





Laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EoDB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei, meskipun berdasarkan rilis terbaru untuk tahun peringkat tahun 2019 turun setingkat menjadi 73. Pada tahun 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat, sebab sebelum EoDB 2017 posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116-129. Dengan meningkatnya indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan EoDB diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional

Perkembangan yang terbaru adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission – OSS*).

Langkah Pemerintah ini merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik factor penghambat maupun factor pendukung sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan di daerah-daerah dalam implementasinya yang menjadi factor-faktor mempengaruhi investasi:



Gambar 6.1  
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi



Berdasarkan hasil analisis ditemukan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi Investasi di Kabupaten Sumba Barat yang digolongkan menjadi Faktor Interen dan Faktor Ekstern seperti di jelaskan di bawah ini:

## 6.1 Faktor Interen

### 6.1.1 Regulasi

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang sekarang ini sedang disempurnakan melalui PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan berbagai perizinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Kabupaten Sumba Barat juga harus merespons terhadap perubahan peraturan yang ada agar iklim investasi di daerah tersebut dapat terjaga dengan baik.

Faktor pendukung dari aspek regulasi adalah: Adanya kepastian hukum dalam berinvestasi di Kabupaten Sumba Barat yang mencakup: a). Kejelasan prosedur dalam mengurus persyaratan dalam berinvestasi; b). Kejelasan biaya



atau tarif yang wajib dibayar oleh para pengusaha baik tarif pengurusan awal maupun tarif pajak dan/ atau retribusi; c) Kejelasan dalam menggunakan tenaga, kerja dan d). Kejelasan informasi berinvestasi di Kabupaten Sumba Barat, dengan alasan bahwa dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat sudah dalam bentuk Peraturan Bupati.

Faktor yang menjadi penghambat adalah: a) Banyaknya regulasi turunan yang menjadi syarat berinvestasi yang harus di penuhi; dan b) Belum ketatnya penegakan aturan dalam berinvestasi.

### **6.1.2 Kelembagaan**

Kelembagaan mencakup organisasi, birokrasi, sumber daya aparatur, system dan mekanisme, serta tugas dan peran yang melekat pada setiap unit kelembagaan. Peran kelembagaan di bidang investasi melekat secara eksplisit pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun keberadaan dan kinerja kelembagaan sebagai satu makrosistem yang saling terkait satu sama lain dan mempengaruhi persepsi masyarakat maupun investor seringkali menjadi kendala dalam upaya peningkatan iklim investasi.

Faktor pendukung investasi dilihat dari aspek kelembagaan adalah: a) Sudah adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan perizinan di Kabupaten Sumba Barat; dan b) Adanya pembagian yang jelas terkait tugas dan peran yang dilaksanakan terkait perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi.

Sedangkan faktor penghambat investasi dari aspek kelembagaan di Kabupaten Sumba Barat adalah: a) Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan; b) Belum adanya pengawasan yang ketat dalam berinvestasi; c) Masih kurangnya SDM pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.



### **6.1.3 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun tujuan pembangunan ketenagakerjaan ialah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

Ketersediaan sumber daya manusia selalu menjadi kebutuhan dunia usaha. Sumber daya manusia dibutuhkan sebagai penggerak operasional perusahaan dan kondisi lingkungan yang kondusif dibutuhkan agar tercipta iklim usaha yang aman dan kondusif. Para pengusaha dan investor selalu berharap bahwa di daerah mereka mendirikan bisnisnya terdapat tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Ketersediaan tenaga kerja dimaksud mencakup jumlah (kuantitas) dan mutu serta profesionalisme tenaga kerja (kualitas). Sayangnya tidak semua daerah mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar perusahaan. Karenanya, jumlah Angkatan kerja tidak selalu menjadi tolok ukur utama dalam upaya pengembangan investasi di suatu daerah apabila tidak ditopang dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Karenanya, jumlah/ketersediaan tenaga kerja perlu ditopang dengan dukungan sektor Pendidikan baik formal maupun non formal untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Adapun realisasi kinerja Kabupaten Sumba Barat dalam urusan tenaga kerja dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 6.1 berikut



Tabel 6.1  
Realisasi Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase penduduk yang bekerja	98,20	98,20	96,17	95,94	96,85
2	Jumlah pencari kerja PMI yang ditempatkan	85	106.	90	42	2
3	Jumlah pencari kerja terdaftar	178	210.	564	611	65
4	Jumlah pekerja/buruh peserta program BPJS Tenaga Kerja	-	1.042.	1.042.	1.568	1.568
5	Jumlah pekerja/buruh	49.59 8	49.59 8	44.12 1	48.92 9	55.23 1
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,38.	67,38.	58,77	63,97	69,80
7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,80	1,80	3,83.	4,06	3,15 %
8	Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	-	-	-	5.642	5.642
10	Tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Orang)	85	106	90.	68.	16
12	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	-	3,67	3,67	3,67
13	Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	15	2.	8	14.	6
14	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2021 – 2026

Dari indikator-indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang mengalami tren yang fluktuatif, misalnya pada indikator Rasio Penduduk yang Bekerja. Rasio ini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2019, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 96,85. Untuk jumlah pekerja buruh mengalami kenaikan dari tahun 2018 berjumlah 44.121 pekerja, tahun 2019 berjumlah 48.929 pekerja dan 2020 berjumlah 55.231 pekerja, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 dan 2020 yaitu 5.642 pekerja. Untuk Tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami penurunan



dari tahun 2018 berjumlah 90 orang, tahun 2019 berjumlah 68 orang dan tahun 2020 berjumlah 16 orang

Penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa keunggulan terkait dengan SDM tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Sumba Barat relative cukup banyak, sedangkan kelemahannya adalah kualitas dari SDM pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sangat sedikit yakni di tahun 2020 hanya 16 orang.

#### **6.1.4 Sosial Budaya Masyarakat dan Keamanan**

Kehidupan sosial budaya masyarakat Sumba secara umum tidak terlepas dari adat istiadat. Sistem kekerabatan dan gotong royong yang kuat menjadi faktor pendukung investasi di Kabupaten Sumba Barat. Selain itu faktor budaya dan adat istiadat yang tidak terlepas dari keberadaan ternak sebagai simbol dari suatu peradaban masyarakat adat, Ternak Kuda, Kerbau dan Babi merupakan jenis ternak yang selalu hadir dalam setiap rangkaian acara adat. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Sumba, kuda dan kerbau menjadi salah satu bagian penting dari perangkat belis (mahar) yang diberikan oleh pihak orangtua laki-laki kepada pihak orangtua perempuan. Dalam adat-istiadat kematian, kuda juga berfungsi sebagai "barang bawaan (buah tangan)". Kuda juga dianggap sebagai anggota keluarga dalam masyarakat Sumba. Dikandangan di bawah rumah inti, dimandikan, diberi makanan yang baik, dan dijadikan simbol harga diri dan kebanggaan. Bahkan sehari sebelum Pasola berlangsung, kuda secara khusus dibawa ke pantai untuk dimandikan dan didoakan. Sedangkan bagi orang Sumba memelihara babi (wawi) sudah menjadi kewajiban sosial yang mendarah daging sejarah nenek-moyang mereka. Babi mempunyai fungsi sosial budaya yang kuat pada masyarakat Sumba.

Sebagai faktor penghambat investasi ditinjau dari aspek sosial budaya adalah:

- a) Kuatnya sistem kekerabatan berdampak pula pada kepemilikan lahan yang juga masih dikuasi secara bersama-sama,
- b) Ternak yang menjadi yang dipelihara masih dimanfaatkan dan dikonsumsi sendiri belum menjadi faktor peluang investasi, dan
- c) adanya penyakit yang menyerang ternak membuat populasi ternak semakin berkurang khusus ternak babi.



Faktor pendukung iklim investasi terkait aspek keamanan adalah: 1) Adanya jaminan Keamanan Kegiatan Usaha karena adanya regulasi yang mengatur; 2) Dukungan Masyarakat Lingkungan Sekitar Tempat Kegiatan Usaha bagi kegiatan usaha. Sedangkan faktor Penghambat investasi ditinjau dari aspek keamanan adalah masih adanya kasus-kasus pencurian khususnya kasus pencurian ternak.

### 6.1.5 Infrastruktur

Infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting sebagai lokomotif pembangunan daerah dan nasional untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di suatu daerah infrastruktur akan mendorong peningkatan produktivitas, faktor-faktor produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Dampak ekonomi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyediaan, kualitas pelayanan serta efektivitas pengelolaan infrastruktur. Keadaan ini menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan jasa dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian. Meskipun perlahan telah bangkit dari krisis ekonomi, infrastruktur pembangunan masih menunjukkan perbaikan yang signifikan pada bidang hal-hal yang dapat menunjang kelancaran dan keberlanjutan usaha dari aspek, transportasi, komunikasi, dan elektrifikasi.

Kondisi infrastruktur Kabupaten Sumba Barat secara umum masih belum memadai dan masih terus dilakukan pembenahan-pembenahan oleh pemerintah daerah. Faktor pendukung investasi di bidang infrastruktur adalah dengan minimnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Sumba Barat juga menjadi daya Tarik tersendiri untuk berinvestasi di bidang infrastruktur

Tabel 6.2  
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan  
di Kabupaten Sumba Barat (Km) Tahun 2018-2020

Kondisi Jalan	2018	2019	2020
Baik	205,92	205,92	205,92
Sedang	97,13	97,13	97,13
Rusak	134,56	134,56	134,56
Rusak Berat	109,90	109,90	109,90
Jumlah	547,51	547,51	547,51

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2021



Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Sumba Barat sebagian besar dalam kondisi tidak baik. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, jalan yang dalam kondisi baik tidak pernah mencapai 50% dibanding total Panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat. Meskipun masih banyak jalan yang dalam kondisi tidak baik, akan tetapi telah ada upaya perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan rehabilitasi/derekonstruksi jalan sebesar 8% pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 6.2 di atas juga menunjukkan adanya factor penghambat bidang investasi adalah kondisi infrastruktur yang kurang memadai.

#### **6.1.6 Promosi Investasi**

Kegiatan promosi dilakukan dalam upaya menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu kegiatan promosi adalah dengan keikutsertaan dalam berbagai event pameran. Upaya promosi investasi tersebut telah dilaksanakan melalui bentuk keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi tingkat regional maupun skala nasional serta penyelenggaraan promosi peluang investasi melalui situs resmi pemerintah daerah dan media social lainnya.

Faktor penghambat dalam promosi Investasi adalah: a) Belum tersedianya datayang akurat terkait wilayah yang potensial untuk berinvestasi sehingga tidak menyulitkan para investot untuk menentukan wilayah yang cocok untuk berinvestasi; b) Media promosi yang belum terjangkau secara luas; c) SDM dan Kelembagaan yang melakukan promosi belum kompeten.

#### **6.1.7 Kondis Geografis dan Topografi Wilayah**

Kabupaten Sumba Barat memiliki luas wilayah daratan 737,42 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 441 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan dengan kecamatan terluas ialah Kecamatan Laboya Barat dengan luas daratan seluas 161,23 km<sup>2</sup> dan yang terkecil ialah Kecamatan Kota Waikabubak dengan luas daratan seluas 44,71 km<sup>2</sup>. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 63 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah desa terbanyak



berada di Kecamatan Tana Righu sebanyak 18 desa dan yang terkecil berada di Kecamatan Laboya Barat sebanyak 4 desa.

Wilayah di Sumba memiliki suhu yang bervariasi. Berdasarkan stasiun meteorologi Umbu Mehang Kunda, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2020 adalah 35,80C dan terendah adalah 17,80C. Secara umum daerah Di Sumba tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 26-290C. Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi Umbu Mehang Kunda tahun 2020 adalah antara 0-294 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari sebanyak 20 hari. Sedangkan pada Bulan Juni hingga Oktober tidak ada hari hujan

Topografi Kabupaten Sumba Barat berupa pesisir, rangkaian pegunungan dan bukit-bukit kapur yang curam. Sebagian besar wilayah pesisirnya berada di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Ketinggian wilayahnya antara 0-800 meter di atas permukaan air laut dengan karakteristik wilayah yang sama dengan wilayah lain di Pulau Sumba tergolong kering. Jenis tanah di Kabupaten Sumba Barat umumnya mediteran dengan jenis batuan batu gamping dengan kemiringan lahan 14°-40°. Sebanyak 94,34% wilayah Kabupaten Sumba Barat digunakan sebagai lahan kering.

Dengan jumlah kepadatan penduduk 196,763 jiwa/km<sup>2</sup> ini tergolong daerah dengan jumlah kepadatan yang sedang, yang memberikan peluang besar bagi para investor karena kesediaan lahan masih sangat luas untuk berinvestasi. Jenis investasi yang cocok adalah peternakan karena didukung oleh luasnya area padang penggembalaan. Faktor pendukung lainnya adalah keindahan pantai pasir putih dan gelombang laut yang menarik untuk menjadi obyek wisata yang terletak pada kecamatan lamboya dan wanokaka (pantai Lailiang, Pantai Kerewei, Pantai Nihiwatu dan Pantai Nihioaka)

Factor penghambatnya adalah apabila berinvestasi di bidang pertanian perlu biaya yang ekstra karena jenis tanahnya adalah mediteran yaitu Jenis tanah ini terbentuk oleh proses pelapukan batuan kapur, sehingga memiliki tingkat kesuburan yang cukup buruk sehingga perludanya sentuhan teknologi pengolahan dan pemupukan yang baik.



### 6.1.8 Kepemilikan Lahan

Di Sumba, setiap *kabihu* (klan) memutuskan sendiri penggunaan tanah *kabihunya* (tanah klan) di wilayah kekuasaan masing-masing yang diwariskan leluhurnya. Anggota suatu *kabihu* relative bebas memanfaatkan tanah *kabihunya* sedangkan anggota *kabihu* lain harus meminta ijin dari sesepuh *kabihu* pemilik lahan bila ingin menggunakannya. Namun demikian akses individu atas tanah *kabihunya* ditentukan oleh kedudukan individu tersebut dalam *kabihunya* yang terkait dengan kedudukan social tradisional berdasarkan: Geneologi, Gender dan Generasi. Makin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki internal *kabihu*, makin besar wewenangnya dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan distribusi dan alokasi lahan milik *kabihunya*.

Faktor pendukung investasi pada bidang kepemilikan lahan adalah masih tersedianya lahan untuk berinvestasi yang masih sangat luas, sedangkan factor penghambat adalah karena kuatnya system kekerabatan dan hak ulayat dikabupaten sumba Barat sehingga persoalan terkait pembebasan lahan harus berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat adat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

## 6.2 Faktor Eksteren

### 6.2.1 Minat Investasi

Dilihat dari aspek non ekonomi, Shiddiq (2007) mengatakan faktor terpenting dalam mempengaruhi investasi adalah keamanan dan stabilitas masyarakat, moralitas birokrat dan pengusaha, kebijakan fiskal dan moneter, sistem administrasi yang sederhana, cepat dan professional. Sedangkan Idris (2007), Fahri (2007) dan Ikhsan (2006) mengatakan bahwa berbagai faktor yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan investasi di wilayah adalah:

- I. Stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Terjadinya banyak gangguan keamanan seperti kerusuhan-kerusuhan baik yang ditimbulkan oleh aspek politik, kecemburuan sosial antar daerah ataupun karena



ambisi pribadi/golongan serta ancaman teroris dapat memperlemah daya tarik investasi di wilayah tersebut;

2. Penegakan hukum. Tidak adanya kepastian hukum akan menyebabkan para investor enggan menanamkan modalnya di wilayah tersebut;
3. Kasus-kasus perburuhan yang sering menimbulkan kontroversi karena sering dipolitisasi untuk kepentingan pribadi maupun golongan misalnya pemogokan kerja, demo buruh yang sering mempersulit kegiatan investasi di wilayah tersebut;
4. Tingkat *purchasing power* suatu wilayah terhadap wilayah lain. Para investor pada umumnya memilih wilayah investasi yang mengalami pertumbuhan pasar yang tinggi baik dalam pasar lokal maupun internasional, biaya produksi yang murah serta ketersediaan tenaga kerja yang relatif murah dan memadai.

Banyak sekali faktor-faktor yang sebagian besar saling terkait satu sama lain dengan pola yang sangat kompleks yang menyebabkan lambatnya pemulihan investasi di Indonesia hingga saat ini. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai dan kondisi perburuhan yang semakin buruk (Tambunan, 2006).

Minat Investor untuk berinvestasi di suatu daerah adalah faktor kepastian hukum dalam berinvestasi, Kepastian hukum yang berfungsi memberikan kerangka dasar dalam perilaku yang tertib, damai dan adil dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk para investor. Untuk itu, kepastian hukum yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan hukum dapat mengalirkan konsistensi. Konsistensi pada setiap produk hukum investasi dengan sendirinya dapat menciptakan kepercayaan diri investor dalam mempercayakan modalnya untuk ditanamkan dan kemudian akan manfaat dari adanya investasi tersebut di daerah, termasuk di dalamnya perizinan investasi. Produk hukum yang dimaksud mencakup banyak aspek termasuk di dalamnya adalah produk hukum tentang perizinan harus segera diperjelas jangka waktunya. Kejelasan terhadap waktu penyelesaian dan tidak bertele-telenya



perizinan investasi dapat menjadi solusi awal dalam memperbaiki iklim investasi

### **6.2.2 Ekonomi Global**

Bank Dunia yang baru saja merilis prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yakni minus 2% - minus 1,6% *year on year*, pun juga menjadi bukti bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah selama dua dekade terakhir. Jika melihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan kuartal II, bisa dilihat bahwa angka pertumbuhannya masih berada dalam level minus.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai minus 5,32% di kuartal II dan diperkirakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai minus 2,9% - minus 1%. Data ini menandakan Indonesia sudah dipastikan akan masuk ke jurang resesi. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih optimis, melihat dari data-data yang sudah didapat di kuartal I dan II, bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi yang positif menjelang Oktober sampai akhir tahun.

Upaya menghitung kondisi ekonomi Indonesia ini tidak luput dari tiga komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor.

Dari tiga komponen yang disebutkan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiganya saling berhubungan. Apabila ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan langsung berimbas kepada dua komponen lainnya. Inilah yang membuktikan peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di tengah pandemi sekarang ini.

Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Sepanjang semester I tahun 2020, BKPM mencatat bahwa sudah ada realisasi investasi sebesar Rp402,6 triliun yang mencakup 49,3% dari target realisasi di



tahun 2020. Ini merupakan kabar baik, mengingat kondisi yang kurang kondusif akibat pandemi. Melihat angka ini, BKPM pun optimis bahwa Indonesia mampu memenuhi target realisasi investasi 2020.

Peran investasi dalam pemulihan ekonomi secara mendetail adalah:

- 1). Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor.
- 2). Investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini.
- 3). Banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Sebenarnya ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM.

Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Bisa dikatakan, fokus pemerintah Indonesia sendiri bukan hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.



### **6.2.3 Keamanan dan Politik**

Dalam mendorong keamanan investasi di Indonesia harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas. Karena konflik dengan motif perebutan sumber daya ekonomi yang tidak ditanggulangi dengan baik, berdampak pada tingkat keamanan investasi yang semakin rendah dimata para investor. Lemahnya penegakan hukum membuat investasi menjadi memiliki banyak resiko keamanan, ketika investasi tidak dilindungi dengan penegakan hukum yang kuat dapat memicu konflik antara warga dengan para investornya. Apalagi, dengan kondisi hukum di Indonesia yang masih tumpang tindih, yang membuat seolah hukum hanya memihak investor besar dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki peluang investasi dengan hiruk pikuk politik yang tidak stabil. Saling adu kekuatan politik antar elit nasional membuat para investor menjadi ragu dan menunggu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena perlu diakui bersama, bahwa dinamika politik

Sejak era reformasi tahun 1998, situasi dan stabilitas politik dalam negeri memang naik-turun. Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah selalu dapat menekan pergolakan yang terjadi demi terciptanya negara yang sehat dan aman. Situasi yang kondusif bakal mempengaruhi tingkat keamanan investasi yang sedang berlangsung maupun yang akan dimulai. Investor jadi bertambah yakin untuk menanamkan modalnya bila dinamika politik yang terjadi masih menjamin keamanan investasi mereka. Sebaliknya, apa bila dinamika politik malah merusak iklim investasi, tingkat kepercayaan investor terhadap tingkat keamanan investasi mereka menurun, maka bisa jadi, para investor memindahkan modalnya kenegara lain yang dianggap lebih aman untuk keberlangsung bisnis mereka. Ketakutan para investor tersebut harus diterima dengan akal sehat. Karena dengan tidak adanya stabilitas politik pasti akan berujung pada ketidakpastian kebijakan atau ketidakjelasan penegakan hukum. Selama stabilitas politik masih diabaikan oleh para elit politik di negeri ini, akan semakin membuat investor cenderung enggan menanamkan modalnya. Oleh

**Laporan Akhir**  
**Penyusunan Peta Potensi Investasi**  
**Kabupaten Sumba Barat**



karena itu, demi terlaksananya percepatan investasi maka diperlukan jaminan keamanan bagi para investor ditengah kegaduhan politik yang sering terjadi di Indonesia.

# **BAB VII** **INVESTASI SEKTOR DAN** **KAWASAN INDUSTRI** **PRIORITAS**





Investasi atau penanaman modal sangat penting dalam pembangunan nasional, sehingga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pembangunan dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Van der Eng (2008) mengatakan bahwa dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, yang mana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat, yang kemudian mempercepat pertumbuhan laju ekonomi nasional.

Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah lama ditelusuri oleh Harrod dan Domar dengan membangun suatu model berdasarkan pengalaman negara maju. Mereka memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi melalui proses akselerasi dan proses multiplier. Pertama, menciptakan pendapatan yang juga disebut dampak permintaan dan kedua, memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan menciptakan stok kapital, yang juga dampak penawaran. Oleh karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, maka pendapatan riil dan output akan senantiasa meningkat (Sukirno, 2001).

Peningkatan investasi melalui peningkatan barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Sebab peningkatan stok barang modal secara nasional akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan juga dapat memperluas kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil, baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sejarah menunjukkan bahwa penemuan baru dalam bidang teknologi mendorong pengusaha untuk membeli barang modal baru termasuk juga pabrik-pabrik baru untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatnya investasi. Penerapan teknologi baru akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja dan modal meningkat. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan nasional secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Selanjutnya akan



berakibat meningkatnya permintaan investasi untuk menyediakan barang-barang konsumsi tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa meningkatnya investasi juga disebabkan karena meningkatnya pendapatan nasional (Sukirno, 2001).

Hasil analisis LQ menunjukkan peluang pengembangan investasi di Kabupaten Sumba Barat mengarah pada sektor primer dengan sub sektor pertanian dan perikanan, sektor sekunder dengan subsector industry pengolahan, serta sektor tersier dengan sub sektor penyedia akomodasi makan minum.

## **7.1. Investasi Sektor Primer**

### **7.1.1. Investasi Sektor Pertanian**

Secara nasional, pertanian masih merupakan sektor andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Secara statistik industri pertanian masih menjadi sektor andalan lewat peningkatan produksi pertanian dan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Pada tahun 2017 saja, tercatat ada peningkatan produksi padi sebesar 10,5 juta ton yang memiliki nilai setara dengan USD3,23 miliar. Peningkatan produksi pertanian berujung pada meningkatnya ekspor komoditas pertanian. Pada 2017, nilai ekspor pertanian naik 24% dari tahun 2016. Di tahun 2018, volume ekspor komoditas pertanian sudah naik 7,38% di bulan April saja. Kondisi positif tersebut bersamaan dengan kenaikan NTP dan NTUP yang merupakan indikasi peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum, peningkatan NTP menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani meningkat. Pada Februari 2018, NTP naik 2,01% dari tahun sebelumnya, sementara NTUP naik 1,87%. Sinyal positif ini terus menguat sesuai dengan visi misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai Negara agraris dan maritim, sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Pembangunan pada sektor pertanian di Indonesia diarahkan pada upaya peningkatan mutu, produksi dan pemasaran hasil pertanian serta mengembangkan usaha tani terpadu guna memantapkan swasembada pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan komoditi-komoditi ekspor, komoditi bahan-bahan industri dalam negeri,



meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta menanamkan modalnya untuk mengembangkan potensi pertanian.

Selaras dengan kebijakan otonomi, dalam rangka pengembangan investasi sektor pertanian, maka setiap daerah diharapkan mampu menarik sebanyak mungkin investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan daerah masing-masing. Pelayanan pengembangan investasi pertanian antara lain dilakukan melalui penyediaan data/informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/ agroindustri, berbagai kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat luas, terutama calon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta fasilitasi perencanaan investasi. Dengan demikian diharapkan dapat lebih mendorong calon investor untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) pada bidang usaha agribisnis/ agroindustri di Indonesia. Peluang yang sangat besar investasi pada agribisnis/ agroindustri adalah pada subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, industri pangan, dan pengolahan hasil hutan.

Investasi di sektor pertanian mempunyai potensi yang tinggi untuk ditingkatkan karena prospek pasar komoditas yang makin baik (harga cukup tinggi). Subsektor peternakan, perikanan, tanaman bahan makanan serta hortikultura masih memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan fasilitas investasi. Untuk meningkatkan pendapatan petani, investasi di sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan dan perkebunan, dengan pemilikan lahan yang sangat sempit (sekitar 30 are per petani), dapat dimanfaatkan melalui kelompok tani (Poktan), sekaligus memberdayakannya lembaga tersebut untuk lebih mensejahterakan petani. Melalui kelompok tani (Poktan) akan dapat dimusyawarahkan mengenai rencana penggunaan investasi tersebut, komoditas apa yang diusahakan, ke mana dipasarkan, dan lain sebagainya.

Beberapa hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa Investasi di sektor pertanian telah terbukti berperan secara ekonomis, yaitu meningkatkan



PDB, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor atau industri lainnya melalui multiplier effect dan efek keterkaitan (linkages). Berdasarkan uraian di atas diharapkan pemerintah terus berupaya menggairahkan penanaman modal atau investasi di sektor pertanian daerah, yaitu dengan memperbaiki iklim investasi, antara lain dengan mempermudah perijinan, mengurangi birokrasi, menyediakan data/ informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/agroindustri serta memperbaiki infrastruktur.

Investasi pertanian merupakan jenis investasi yang layak dipertimbangkan, mengingat terdapat sekitar 41% warga Indonesia yang bekerja di bidang pertanian. Pemanfaatan potensi di bidang pertanian memang belum maksimal, namun seharusnya hal tersebut membuat lebih banyak orang mulai melakukan investasi pertanian. Meskipun belum dimanfaatkan dengan optimal, investasi pertanian membawa banyak keuntungan antara lain:

**a. Tingkat keamanan modal dan risiko**

Keuntungan investasi pertanian yang pertama adalah tingkat keamanan modal yang tinggi serta tingkat risiko yang rendah. Banyak orang ragu berinvestasi karena risiko kerugian yang tinggi. Melalui investasi pertanian, investor bisa merasa lebih aman. Investasi pertanian bisa menjadi jawaban bagi investor yang lebih peduli terhadap keamanan modal di dalam periode gejolak pasar yang mungkin dirasa cukup mengkhawatirkan.

Investasi pertanian didukung oleh aset solid dalam pasokan terbatas yang nilainya tidak mungkin turun. Secara historis, investasi pertanian memperlihatkan karakteristik perlindungan modal yang kuat selama periode waktu yang lama. Tidak seperti investasi pada sumber daya lainnya seperti pertambangan maupun minyak & gas, lahan pertanian yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber daya yang sepenuhnya terbarukan dan akan tetap produktif selamanya.



**b. Berkorelasi positif dengan inflasi**

Sebagai kelas aset agregat, lahan pertanian telah terbukti memiliki korelasi positif dengan inflasi. Secara historis, nilai-nilai tanah pertanian umumnya meningkat lebih cepat dibanding inflasi, membuat tanah pertanian menjadi pelindung nilai inflasi yang efektif dan bisa membuat modal lebih aman. Keuntungan ini mungkin menarik bagi investor yang khawatir terhadap *inflationary government policies* atau kebijakan pemerintah inflasi (kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jumlah uang beredar dan monetisasi utang pemerintah).

**c. Aset penghasil pendapatan yang stabil**

Tidak seperti *inflationary hedges* (lindung nilai inflasi) populer lainnya seperti logam mulia, lahan pertanian dapat memberikan pendapatan reguler kepada investor, menjadikannya pengganti yang berguna bagi pendapatan “bebas risiko” yang hilang pada deposito tunai dan obligasi karena suku bunga rendah. Aset riil pertanian menawarkan tingkat pendapatan yang dapat diandalkan di atas 5% setiap tahun.

Meskipun investasi pertanian tidak selalu menghasilkan pendapatan tertinggi dalam sektor *real estate*, namun pendapatan yang diperoleh dari investasi pertanian tidak mungkin terdepresiasi nilainya. Investasi pertanian juga menawarkan potensi pertumbuhan modal yang kuat dan tingkat hunian penyewa mendekati 100% (tidak seperti properti komersial, permintaan kualitas lahan pertanian selalu tinggi, terlepas dari lingkungan ekonomi).

**d. Investasi lahan pertanian memberikan volatilitas pendapatan yang lebih rendah**

Dengan memasukkan tanah pertanian dalam portofolio aset campuran, investor dapat mengurangi kemungkinan kekurangan pendapatan selama periode ketika aset lain mungkin menghasilkan sedikit atau tanpa pendapatan. Keuntungan ini khususnya dapat dirasakan dalam model penyewaan lahan pertanian.



Sementara tren kenaikan jangka panjang dalam harga komoditas pertanian ditangkap dalam apresiasi modal aset (yang mungkin lebih fluktuatif). Sewa tetap memiliki efek memperlancar volatilitas siklus jangka pendek dalam harga komoditas karena risiko harga *input* dan *output* ditanggung oleh petani penyewa, bukan pemilik tanah.

**e. Investasi lahan pertanian menghasilkan pengembalian total yang tinggi**

Investasi lahan pertanian menangkap pengembalian operasi dan modal melalui kombinasi pendapatan sewa dan apresiasi nilai aset. Secara historis, total hasil dari lahan pertanian telah berulang kali mengungguli aset utama termasuk saham, obligasi, dan *real estate* komersial di berbagai pasar dan skala waktu, meskipun tingkat risikonya relatif rendah (diukur berdasarkan standar deviasi tingkat pengembalian tahunan).

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang bercorak agraris. Hasil analisis LQ terhadap sektor-sektor penyumbang PDRB Kabupaten Sumba Barat menunjukkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan untuk pengembangan investasi melalui konsep pengembangan agroindustri. Pengembangan agroindustri merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap dapat membantu pembangunan sektor ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat seperti:

- a) Menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian
- b) Meningkatkan penerimaan devisa
- c) Menciptakan lapangan kerja
- d) Memperbaiki pembagian pendapatan
- e) Menciptakan sektor pertanian yang tangguh dan unggul

Sebagai motor penggerak pembangunan, pertanian, agrobisnis dan agroindustri akan memainkan peranan penting dalam kegiatan pembangunan, baik dalam sasaran pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan melihat dan tanggap terhadap potensi yang ada,



diharapkan pelaku bisnis dapat melihat peluang yang tinggi dan kesempatan yang besar untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan dalam pertanian di Indonesia yang menjadi komoditas ekspor.

Sektor agribisnis wilayah pedesaan sampai saat ini masih dirasakan sebagai sektor ekonomi rakyat yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat di pedesaan, maupun sebagai andalan dalam perolehan devisa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan masyarakat petani di pedesaan adalah pengembangan sistem produksi, agribisnis dan agroindustri dari komoditas yang unggul di wilayah tersebut secara terencana dengan baik (Saragih, 2001: 14).

Mengingat jenis industri pertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan memiliki peluang yang besar, maka perlu diprioritaskan pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi, baik bagi pembangunan nasional maupun pembangunan ekonomi daerah pada umumnya, khususnya pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Berbagai peluang yang ada untuk menumbuhkan wawasan agribisnis dan agroindustri di pedesaan ini antara lain mencakup berbagai aspek, seperti: lingkungan strategis, permintaan, sumber daya, dan teknologi. Untuk itu semua tentunya tidak terlepas betapa besarnya peranan swasta, khususnya perbankan sebagai sumber permodalan dalam pembangunan agroindustri.

Prospek investasi sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas kondisi eksisting wilayah ini sebagai wilayah yang kaya akan potensi pertaniannya. Pada tahun 2020 penduduk yang bekerja di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 51,49% berada pada sektor pertanian. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian sebesar 26,93 persen terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (sumber: Kabupaten Sumba Barat dalam angka).

Prospek pengembangan investasi sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat mencakup sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura dengan beragam jenis komoditi yang tercakup di dalamnya.



Kriteria kelayakan bagi pengembangan investasi sektor pertanian sangat ditentukan pula oleh ciri dan karakteristik wilayah, iklim, curah hujan, dan jenis tanah sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

No.	Sub Sektor Pertanian	Persyaratan Agroekologi
1.	Tanaman Pangan	Dataran rendah hingga dataran tinggi (<1000 m dpl), kedalaman efektif lapisan tanah 30 cm, topografi lahan cenderung datar (Kelerengan <25%), memiliki sarana irigasi yang memadai (terutama untuk tanaman padi), jenis tanah bisa beragam, kebutuhan curah hujan cenderung sedang (1500 – 4000 mm/tahun).
2.	Hortikultura	Dataran rendah hingga dataran tinggi (<1500 m dpl), kedalaman efektif lapisan tanah 30 cm (Hortikultura tanaman semusim) dan 2 m (Hortikultura tanaman tahunan), topografi lahan datar atau kemiringan lahan <25% (tanaman semusim), ketersediaan air cukup, jenis tanah bisa beragam, kebutuhan curah hujan cenderung sedang hingga tinggi (1500 – 4000 mm/tahun).
3.	Perkebunan	Dataran rendah hingga dataran tinggi, topografi lahan memiliki kemiringan 10-40%, tak memerlukan sarana irigasi, kedalaman air tanah ( <i>water table</i> ) 1-2m, jenis tanah bisa beragam, kebutuhan curah hujan $\pm$ 1500 mm/tahun.

Beragam karakteristik sebagaimana dijelaskan dalam table di atas menjadi dapat acuan bagi rencana pengembangan investasi sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat. Rata-rata wilayah di Kabupaten Sumba Barat merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata antara 15-25%. Topografi lahan cenderung datar dengan ketinggian rata-rata 100-200 mdpl. Meskipun curah hujan di Kabupaten Sumba Barat terkategori rendah, namun pada bulan-bulan tertentu yakni bulan Januari-April dan bulan November-Desember curah hujannya cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian. Berbagai pertimbangan karakteristik wilayah tersebut menjadi prasyarat kelayakan investasi sektor pertanian di Kabupaten Sumba Barat.

#### a. Sub Sektor Tanaman Pangan

Luas area tanaman pangan per Kecamatan per komoditi di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020 dapat dilihat melalui table berikut.



Tabel 7.1  
Luas lahan Tanaman pangan per komoditi per Kecamatan di Kabupaten  
Sumba Barat Tahun 2020 (Ha)

Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Lamboya	800	231	580	0	0	0	56	0
Wanokaka	1,673	232	650	0	1	2	226	0
Laboya Barat	154	2,153	933	0	0	1	34	0
Loli	2,523	366	1,396	0	0	0	165	42
Kota Waikabubak	2.272	73	502	0	0	2	14	6
Tana Righu	25	598	1,950	0	3	3	53	15
Sumba Barat	7,447	3,653	6,911	0	4	8	548	63

Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Sumba Barat, 2021

Table di atas menunjukkan bahwa luas area tanaman pangan untuk jenis komoditi padi sawah terdapat di wilayah Kecamatan Loli (2.523 Ha), Kota Waikabubak (2.272 Ha), dan Wanokaka (1.637Ha). Luas lahan untuk jenis komoditi padi ladang terbesar terdapat di Kecamatan Laboya Barat (2,153 Ha). Luas lahan untuk jenis komoditi jagung terbesar terletak di Kecamatan Tanah Righu (1.950 Ha) dan Kecamatan Loli (1.396 Ha). Sedangkan luas lahan untuk jenis komoditi ubi kayu terbesar terdapat di Kecamatan Wanokaka (226 Ha) dan Kecamatan Loli (165 Ha). Data tersebut memperlihatkan luas area beragam jenis komoditi tanaman pangan seperti padi sawah, padi ladang, jagung, dan ubi kayu hampir semuanya tersedia di Kecamatan Loli dengan luasan area yang cukup besar. Artinya, Kecamatan Loli menjadi wilayah yang dapat dipertimbangkan bagi pengembangan investasi budidaya (agrobisnis) untuk berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Sedangkan data produktivitas tanaman pangan Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut.

Table 7.2  
Produktivitas Tanaman pangan per komoditi per Kecamatan di Kabupaten  
Sumba Barat Tahun 2020 (Ton)

Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Lamboya	30.4	24	29.3	0	0	0	98.9	0
Wanokaka	30.5	24	29.4	0	9.6	7.2	95.8	0

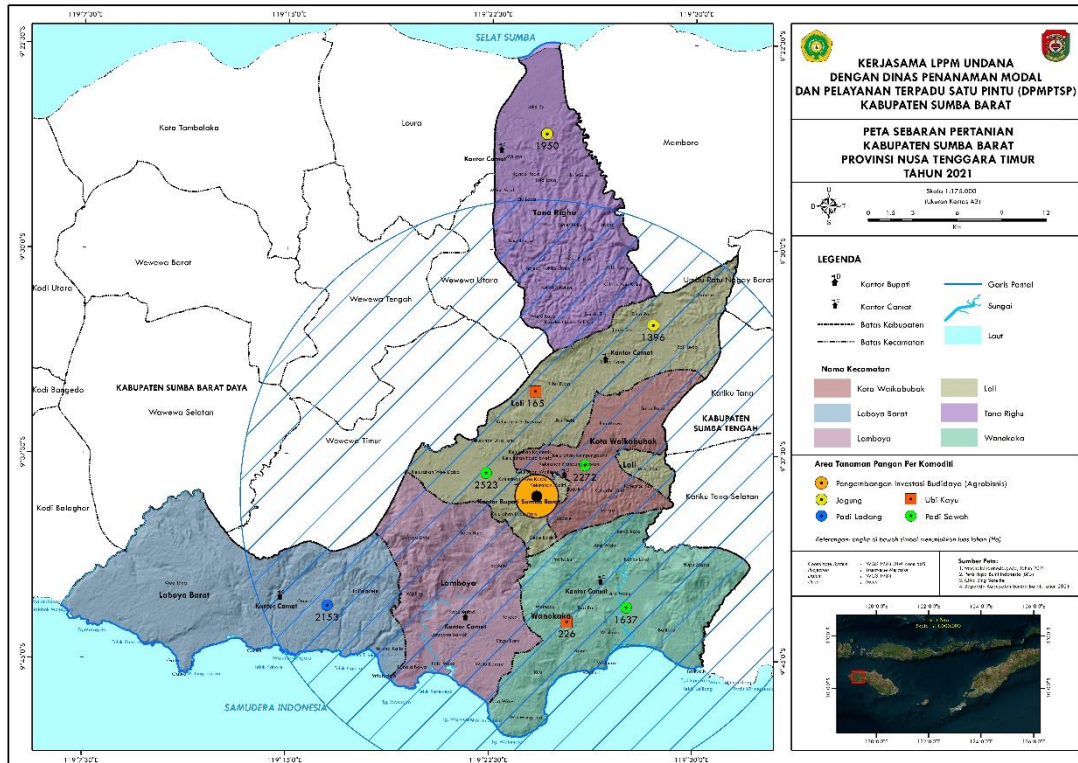


Laboya Barat	30.4	27.5	30.4	0	0	7.3	96.9	0
Loli	30.5	25.3	29.2	0	0	0	94.7	72.2
Kota Waikabubak	30.4	24	28.3	0	0	7.1	93.6	72.2
Tana Righu	30.4	24.2	30.1	0	9.4	7.2	96.8	72.2
Sumba Barat	182.6	149	176.8	0	19	28.8	576.7	216.6

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, 2021*

Berdasarkan data produktivitas berbagai jenis komoditi tanaman pangan per kecamatan sebagaimana terlihat pada table di atas, dapat disimpulkan bahwa luas lahan tidak sebanding dengan tingkat produktivitas. Hal itu bisa diakibatkan oleh beragam factor di antaranya curah hujan, kondisi tanah, perawatan dan pemeliharaan dan sebagainya. Namun permasalahan-permasalahan tersebut umumnya dapat diatasi melalui pendekatan teknologi yang intensif dan teratur. Selain untuk menjaga stabilitas produksi, penggunaan teknologi juga dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka memenuhi keberlanjutan kebutuhan dan pasar industry maupun rumah tangga.

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu prasyarat dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar terutama sebagai penyedia bahan baku bagi sektor industry pengolahan. Dengan demikian peluang bagi peningkatan nilai tambah berbagai jenis komoditi dimaksud sangat dimungkinkan dengan hadirnya sektor industry. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan keberlanjutan ketersediaan bahan baku (produksi) sehingga mata rantai perdagangan tetap terjaga keberlanjutannya. Hal tersebut menjelaskan keberlanjutan investasi sektor tanaman pangan dapat menumbuhkan minat untuk berinvestasi di sektor-sektor lainnya seperti sektor industry pengolahan dan penyedia akomodasi makan minum.



**Gambar 7.1**  
**Peta sebaran Tanaman Pangan Kabupaten Sumba Barat**  
*Sumber: Olah data sekunde, 2021*

**b. Sub Sektor Tanaman Perkebunan**

Kabupaten Sumba Barat memiliki beragam komoditi pada sub sektor tanaman perkebunan seperti Kopi, kakao, jambu mete, kelapa kemiri, dan pisang. Luas lahan untuk setiap jenis komoditi tanaman perkebunan dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 7.3**  
**Luas lahan tanaman perkebunan per komoditi per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 (Ha dan rumpun)**

Kecamatan	Kopi	Kakao	Jambu mete	Kelapa	Kemiri	Pisang (rumpun)
Lamboya	228	214	355	635	33	13.440
Wanukaka	217	15	240	591	33	4.643
Kota Waikabubak	41,11	56	27	34	170	679
Loli	285	6	46	105	395	2825
Tana Righu	328,33	46	588	540	498	142.200
Laboya Barat	170	360	560	755	29	1.749

*Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Sumba Barat, 2021*



Table di atas menunjukkan luas lahan terbesar untuk jenis komoditi kopi, jambu mete, kemiri dan pisang terdapat di Kecamatan Tana Righu. Sedangkan untuk jenis komoditi kakao dan kelapa terdapat di Kecamatan Laboya Barat.

Sementara produktivitas per komoditi untuk sub sektor tanaman perkebunan dapat dilihat pada table berikut.

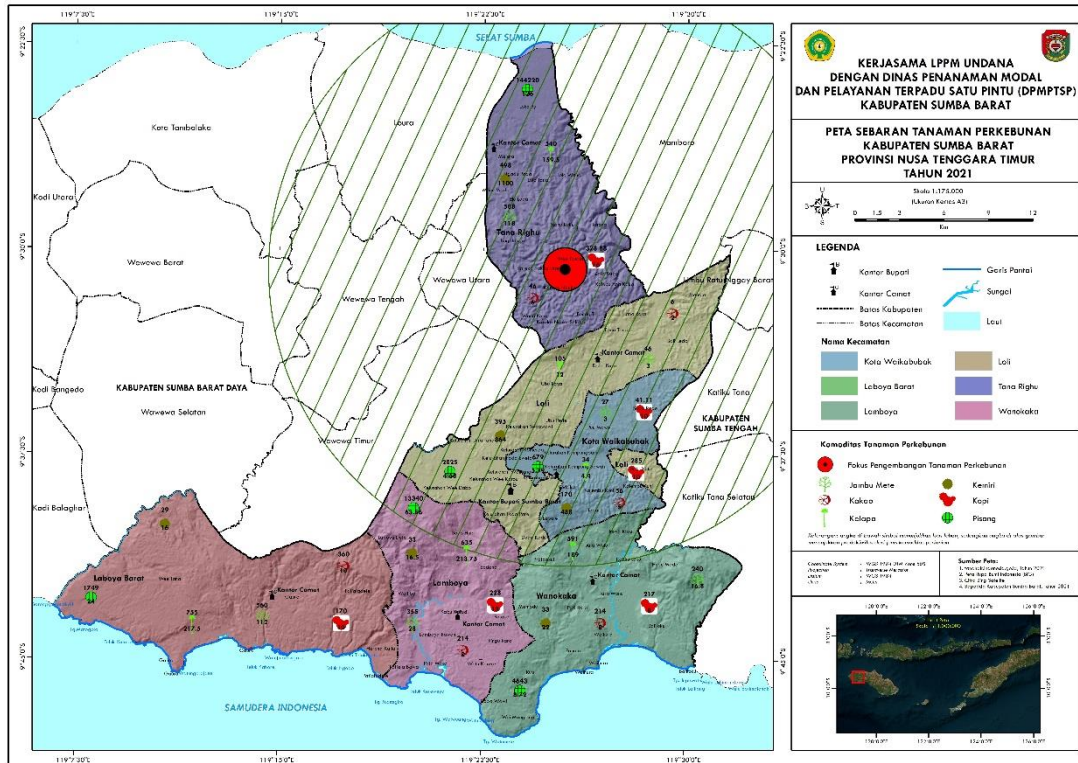
Tabel 7.4  
Produktivitas Tanaman Perkebunan per Kecamatan per komoditi di  
kabupaten sumba Barat Tahun 2020 (Ton)

Kecamatan	Kopi	Kakao	Jambu mete	Kelapa	Kemiri	Pisang
Lamboya	18	8	28	213,75	16,5	63,56
Wanukaka	8	3	16,8	189	22	8,72
Kota Waikabubak	10	5	3	4,4	448	5,79
Loli	10	2	3	12	864	4,68
Tana Righu	16	6	118	159,5	1.100	126.00
Laboya Barat	10	10	112	217,5	16	24

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, 2021

Data produksi tanaman perkebunan per komoditi sebagaimana tampak pada table di atas menunjukkan kecenderungan yang sebanding dengan luas lahan. Artinya semakin luas lahan semakin tinggi pula tingkat produksinya. Kondisi tersebut mengalami pengecualian pada jenis komoditi kopi yang tingkat produksi paling tingginya terdapat di kecamatan Lamboya dengan luas lahan yang tidak seluas lahan di Kecamatan Tana Righu. Hal itu bisa disebabkan oleh beragam factor antara lain, tingkat kesuburan tanah, curah hujan, perawatan dan pemeliharaan, dan sebagainya. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan teknologi untuk menjamin keberlanjutan dan produksi dan peningkatan produktivitas komoditi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar industry maupun kebutuhan domestic rumah tangga.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting wilayah (lahan dan tingkat produksi/produktivitas tanaman perkebunan), maka penentuan wilayah untuk pengembangan investasi sektor tanaman perkebunan berpusat di Kecamatan Tana Righu dengan melihat potensi yang ada. Sedangkan jenis komoditi yang layak untuk dikembangkan di sektor ini adalah kopi, jambu mete, kelapa, kemiri, dan pisang.



**Gambar 7.2**  
**Peta sebaran Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sumba Barat**  
*Sumber: Olah data sekunder, 2021*

**c. Sub Sektor Peternakan**

Struktur social dan tradisi budaya masyarakat Kabupaten Sumba Barat erat kaitannya dengan prospek pengembangan investasi sub sektor peternakan. Beberapa jenis komoditi ternak seperti babi, sapi, kuda dan kerbau memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi ketika dihadapkan dengan urusan adat seperti urusan kematian dan urusan pernikikahan (*belis*). Peluang investasi pada sub sektor peternakan tidak hanya diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan penyedia bahan baku daging untuk kebutuhan sektor industry dan penyedia akomodasi makan minum, tetapi juga untuk dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan social masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba pada umumnya. Dalam kurun waktu setahun atau pada saat momen acara adat berlangsung, perputaran uang untuk pembelian hewan ternak dapat mencapai miliaran rupiah jika dikalkuliaskan berdasarkan harga satuan setiap jenis hewan. Harga ternak babi di Kabupatn Sumba Barat berkisar antara 11-17 juta rupiah, ternak sapi



dan kerbau berkisar antara 17-23 juta rupiah, dan ternak kuda berkisar antara 14-15 juta rupiah. Apabila setiap hajatan adat membutuhkan ratusan bahkan ribuan ternak maka dapat dikalkulasikan pengeluaran masyarakat untuk mendapatkan hewan-hewan dimaksud. Tidak heran apabila populasi beberapa jenis ternak di Kabupaten Sumba Barat semakin berkurang. Sayangnya, sejauh ini, aktivitas beternak di kabupaten Sumba Barat dan Sumba pada umumnya masih bersifat tradisional dan parsial dengan pola penggembalaan yang masih cenderung bergantung pada alam.

Statistic peternakan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada table berikut.

**Table 7.5**  
Jumlah populasi ternak per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

Keterangan	Uraian	Kecamatan					
		Lamboya	Wanokaka	Laboya Barat	Loli	Waikabubak	Tana Righu
Sapi Potong	Populasi	266	414	233	289	143	523
Kerbau	Polulasi	2.995	2.570	1.503	2.408	1.762	1.120
Kuda	Populasi	1.434	405	616	592	353	488
Kambing	Populasi	1.828	720	528	303	279	1.515
Domba	Populasi	11	0	0	0	0	0
Babi	Populasi	1.066	411	253	1.229	602	2.809
<b>Total Populasi Ternak</b>		<b>7.600</b>	<b>4.520</b>	<b>3.133</b>	<b>4.812</b>	<b>3.139</b>	<b>6.455</b>
Ayam Kampung	Populasi	58.789	54.854	28.088	49.495	47.189	34.612
Ayam Pedaging	Populasi	1631	4.372	1.336	26.601	25.584	15.857
Itik	Populasi	370	1.095	317	1.654	1.671	958
<b>Total Populasi Unggas</b>		<b>60.790</b>	<b>60.321</b>	<b>29.741</b>	<b>77.750</b>	<b>74.444</b>	<b>51.427</b>

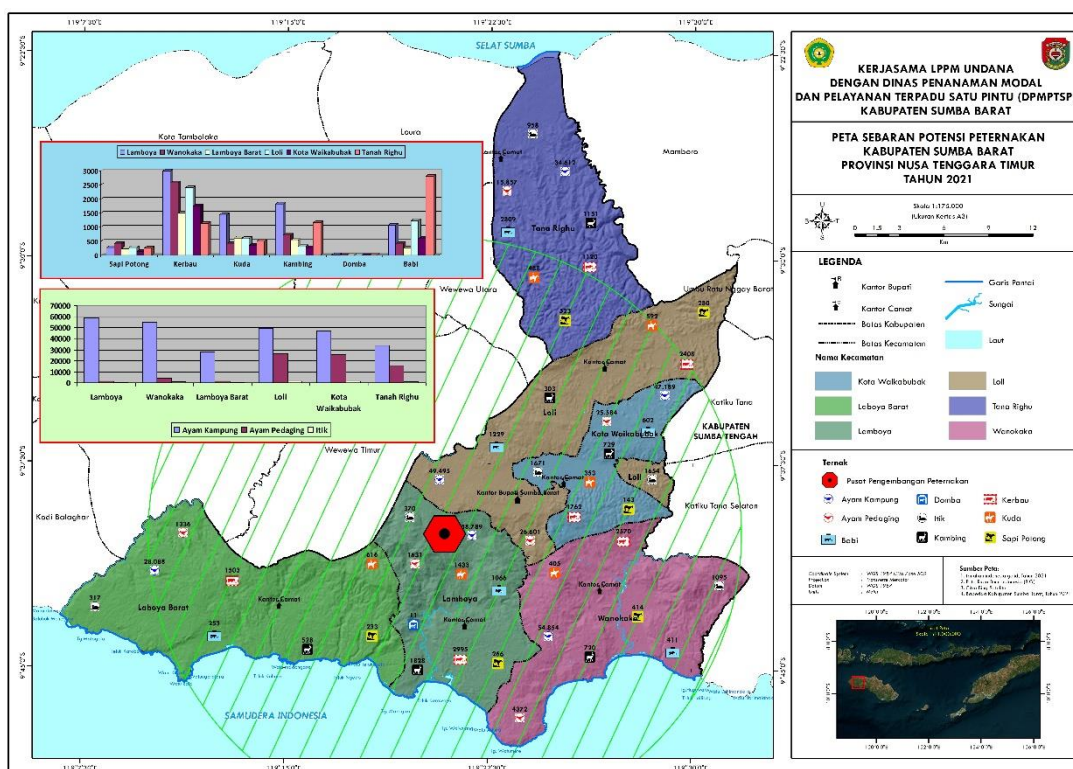
Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

Table di atas menunjukkan jumlah populasi ternak besar terbanyak terdapat di Kecamatan Lamboya dengan total jumlah ternak sebanyak 7.600 yang didominasi oleh jenis ternak kerbau, kuda, kambing, dan babi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik wilayah Kecamatan Lamboya berada pada dataran rendah dan cenderung datar dengan area padang rumput penggembalaan yang masih luas. Syarat agroekologi bagi pengembangan ternak antara lain berada pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Membutuhkan lahan cukup luas untuk perkandangan. Untuk ternak hewan besar lokasi tidak boleh berada di dekat pemukiman. Kebutuhan



topografi lahan cenderung datar (kelerengan <10%), dibutuhkan cukup air untuk minum dan kebersihan, dekat dengan lahan sumber pakan.

Permentan No. 56 Tahun 2016 mempertegas beberapa hal terkait persyaratan pengembangan ternak yang terdiri dari, tingkat produktivitas ternak, syarat geografis, topografis, klimatologis, sosiologis, dan ketersediaan lahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka peluang investasi sektor peternakan di Kabupaten Sumba Barat idealnya dikembangkan di Kecamatan Lamboya.



**Gambar 7.3**  
 Peta sebaran ternak di kabupaten Sumba Barat Daya (Hasil olah data sekunder)

### 7.1.2. Investasi sektor perikanan

Salah satu sektor yang prospektif dan potensial untuk dikembangkan dan diusahakan di kabupaten Sumba barat adalah sektor perikanan baik jenis perikanan laut maupun darat. Aktivitas kepariwisataan yang sedang menggeliat di wilayah ini memberi peluang bagi investasi di sektor perikanan. Hotel, rumah makan, restoran, warung, dan berbagai jenis usaha jasa

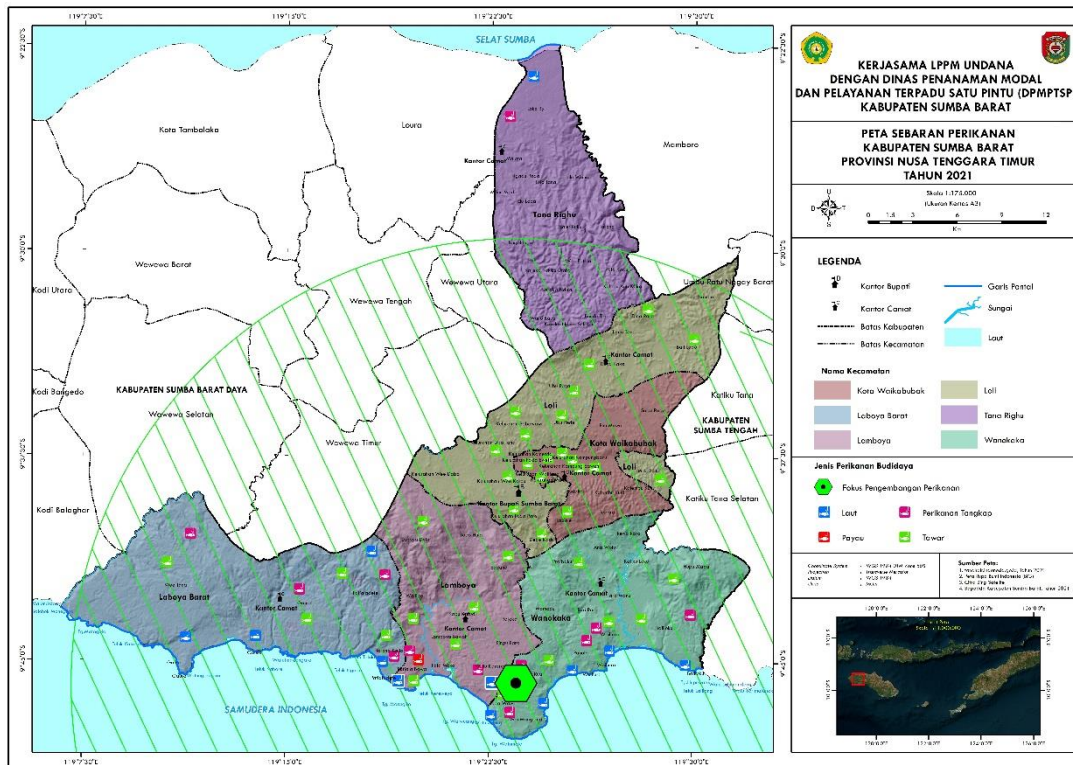


penyedia makan minum lainnya sangat membutuhkan pasokan sektor ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa terutama untuk urusan makan minum. Statistic perikanan Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 7.6  
Jumlah rumah tangga perikanan, produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan per Kecamatan di Kabupaten sumba Barat Tahun 2020

Keterangan	Uraian	Kecamatan					
		Lamboya	Wanokaka	Laboya Barat	Loli	Kota Waikabubak	Tanah Righu
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Perikanan Tangkap di Laut	389	1157	122	0	0	30
	Perikanan Perairan Umum Daratan	22	76		177	96	11
Produksi Perikanan Ton	Perikanan Tangkap di Laut	490	1582	840	0	0	106
	Perikanan Perairan Umum Daratan	0.8	7.63	0	5.63	8.08	0.27
Nilai Produksi Perikanan (Juta Rupiah)	Perikanan Tangkap di Laut	24,500	79,100	42,000	0	0	53,000
	Perikanan Perairan Umum Daratan	40	381		281	404	13
Produktivitas Hasil Perikanan		1.25	389	1157	122	0	0

Table di atas memperlihatkan jumlah rumah tangga perikanan dan produksi perikanan untuk jenis perikanan tangkap di laut tertinggi di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 terdapat di Kecamatan Wanokaka, Lamboya, dan Laboya Barat. Secara geografis, ketiga wilayah kecamatan tersebut merupakan Kawasan pesisir yang langsung berbatasan dengan wilayah perairan laut selatan sehingga ketiga wilayah dimaksud sangat berpotensi bagi pengembangan investasi di sektor perikanan terutama untuk memenuhi permintaan pasar. Sedangkan untuk jenis perikanan perairan umum daratan tertinggi berada di Kecamatan Loli, Kota Waikabubak, dan Wanokaka.



**Gambar 7.4**

Peta potensi perikanan Kabupaten Sumba Barat (*Olah sata sekunder, 2021*)

## 7.2. Investasi Sektor Sekunder (Industri Pengolahan)

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia yang pada tahun 1991 selama pembangunan jangka pendek I telah mengalami perubahan struktur perekonomian yang pada awalnya berbasis sektor pertanian menjadi sektor industri. Di dalam pelaksanaannya, sektor industri pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Sektor industri pengolahan di Indonesia di satu pihak memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi, dan nilai investasi yang tertanam cukup besar.

Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperkirakan investasi sektor industri pengolahan di tahun 2021 diproyeksikan akan tetap naik hingga mencapai Rp 323,56 triliun. Beberapa sektor yang masih jadi primadona para



investor untuk menanamkan modalnya pada antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik.

Kemperin mencatat, nilai investasi sektor industri periode Januari-September 2020 mencapai Rp 201,9 triliun atau berkontribusi 33% dari total nilai investasi nasional sebesar Rp 611,6 triliun. Penanaman modal di sektor industri pada sembilan bulan tersebut meningkat 37% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sekitar Rp 147,3 triliun. Adapun subsektor yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian investasi tersebut di antaranya adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri makanan, industri kimia dan farmasi, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi, serta industri mineral non-logam. Selama ini investasi sektor industri membawa dampak yang luas bagi perekonomian nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja. Hingga Agustus 2020, jumlah tenaga kerja di sektor industri sebanyak 17,48 juta pekerja atau berkontribusi 13,61% dari total tenaga kerja nasional.

Data investasi sektor industri pengolahan untuk periode triwulan II tahun 2021 mencapai Rp 78,9 triliun, naik sebesar 20,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Dari nilai investasi tersebut, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 35,4% terhadap total investasi Indonesia triwulan II tahun 2021 yang mencapai Rp 223,0 triliun.

Sesuai dengan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi arus globalisasi dan regeonalisasi ekonomi tersebut adalah sektor industry yang mempunyai kaitan langsung dengan sektor pertanian (agroindustri). Sektor agroindustri sekarang ini sedang mendapat perhatian besar dari khalayak dan pemerintah untuk dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan.

Agroindustri adalah pengolahan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian sebagai sumber agrobisnis. Menurut Soekartawi (1991) ada enam subsistem dari agrobisnis, yaitu:



- a) Penyediaan sarana produksi dan peralatan
- b) Usaha tani
- c) Pengolahan hasil (agroindustri)
- d) Pemasaran
- e) Sarana
- f) Pembinaan

Keenam subsistem agrobisnis ini perlu dikembangkan karena sangat menunjang dalam melaksanakan pembangunan. Agroindustri merupakan fase pertumbuhan setelah pembangunan pertanian, berlanjut ke tahapan pembangunan industri. Agroindustri dapat dibedakan menjadi dua yakni industri yang baku utamanya dari produk pertanian dan industri yang merupakan kelanjutan dari pembangunan pertanian, tetapi sebelum mencapai tahapan pembangunan industri.

Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri dengan demikian mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP), Industri Peralatan Dan Mesin Pertanian (IPMP) dan Industri Jasa Sektor Pertanian.

Pengembangan agroindustri merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap dapat membantu pembangunan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat seperti:

- a) Menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian
- b) Meningkatkan penerimaan devisa



- c) Menciptakan lapangan kerja
- d) Memperbaiki pembagian pendapatan
- e) Menciptakan sektor pertanian yang tangguh dan unggul

Prospek agroindustri dan bisnis ini diperkirakan akan mendominasi perkembangan sektor industri di Indonesia, termasuk hasil ekspor industrinya. Apaun yang menjadi pilihan industri di masa depan sebagai andalan, adanya kebijakan yang mencakup “*broad spectrum*” ragam industri yang memiliki potensi ekspor non migas, ataupun penentu industri andalan dengan produk andalan. Jalur agroindustri tidak banyak menghadapi saingan untuk *tropicalculture*.

Dalam hal ini ada beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan, seperti: bahan baku, teknologi, sarana, peralatan, dana, investasi, pasar, dan sumber daya manusia. Bahkan dalam GBHN telah mengamanatkan tentang perlunya pengembangan industri pengolahan (agroindustri) menjadikan salah satu prioritas dalam Pembangunan Nasional di dalam sektor pertanian.

Permasalahan dalam pengembangan agroibisnis dan agroindustry adalah lemahnya keterkaitan antara subsistem di dalam agrobisnis, yaitu distribusi dan penyediaan faktor produksi, proses produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran. Dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik serta ekonomi perlu ditingkatkan dan diperluas, sedang keterpaduan perencanaan dan pelaksanaannya harus terus ditingkatkan.

Kualitas sumber daya manusia khususnya di pedesaan yang jumlahnya terbatas memerlukan adanya pelatihan profesionalisme usaha dan pendidikan manajemen serta peranan lembaga finansial yang mendukung pengembangan agrobisnis perlu segera ditingkatkan,

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diragukan lagi, sangat diperlukan dalam pengembangan agrobisnis yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam hal ini maka ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diarahkan pada penemuan dan rekayasa teknologi yang bisa diterpkan dalam pengembangan agrobisnis dan agroindustri.



Beberapa permasalahan agroindustri tersebut, khususnya adalah permasalahan yang ada di dalam negeri, seperti :

- a) Kurang tersedianya bahan baku yang cukup dan continue
- b) Kurang nyatanya peranan agroindustri di pedesaan karena masih berkonsentrasi pada agroindustri di perkotaan
- c) Kurangnya konsisten kebijakan pemerintah terhadap agroindustri
- d) Kurangnya fasilitas permodalan (kredit), walaupun ada, prosedur yang digunakan terlalu berbelit dan sangat mempersulit peminjam
- e) Keterbatasan pasar
- f) Lemahnya infrastruktur
- g) Kurangnya perhatian terhadap penelitian dan pengembangan
- h) Lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir
- i) Kualitas produksi dan processing yang belum mampu bersaing
- j) Lemahnya *entrepreneurship*

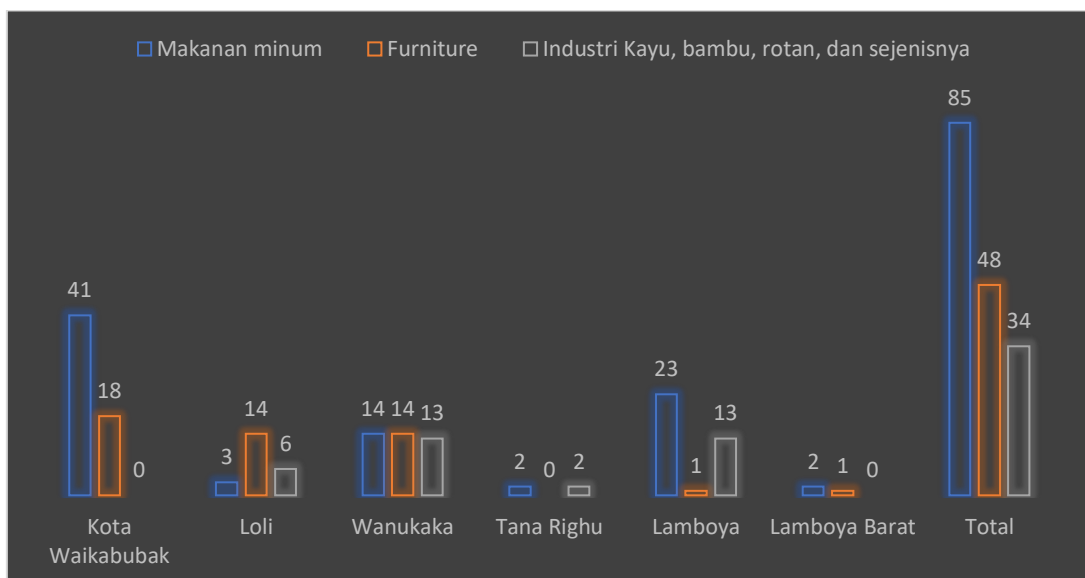
Adapun yang menjadi prioritas solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, diantaranya adalah :

- a) Identifikasi kebutuhan tenaga, yang meliputi bidang keahlian, skala usaha, dan jenis kelembagaan usaha yang mengacu pada tahapan perencanaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang
- b) Diperlukan koordinasi antara pemakai (swasta, koperasi, dan pemerintah) dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam rangka ketenagaan agroindustri
- c) Reorientasi wawasan dan arah pengembangan ketenagaan, mengacu kepada penciptaan lapangan kerja. Untuk itu kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan harus menampung kebutuhan terjadinya transformasi sektor usaha dari tradisional yang berorientasi produk bahan mentah ke sektor modern dengan pemberian nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil, baik teknis, manajerial, maupun sosialnya.

Prospek pengembangan investasi sektor industry pengolahan (agroindustry) di Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari kondisi riil Kabupaten Sumba



Barat yang merupakan daerah agraris dengan potensi sektor pertanian yang beragam serta tersebar di seluruh wilayah Kecamatan. Sektor industry yang berkembang di Kabupaten Sumba Barat saat ini rata-rata bergerak di bidang industry makan minum, furniture, pengolahan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya. Rata-rata sektor industry pengolahan yang ada bergerak dalam skala usaha kecil dan menengah dan belum menjangkau kebutuhan pasar nasional dan internasional. Hasil produk olahan yang dihasilkan umumnya dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat lokal dan sebagiannya menjangkau pasar lintas Kabupaten dengan skala produksi yang masih terbatas..



**Gambar 7.5**

**Jumlah Industri pengolahan per Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020**

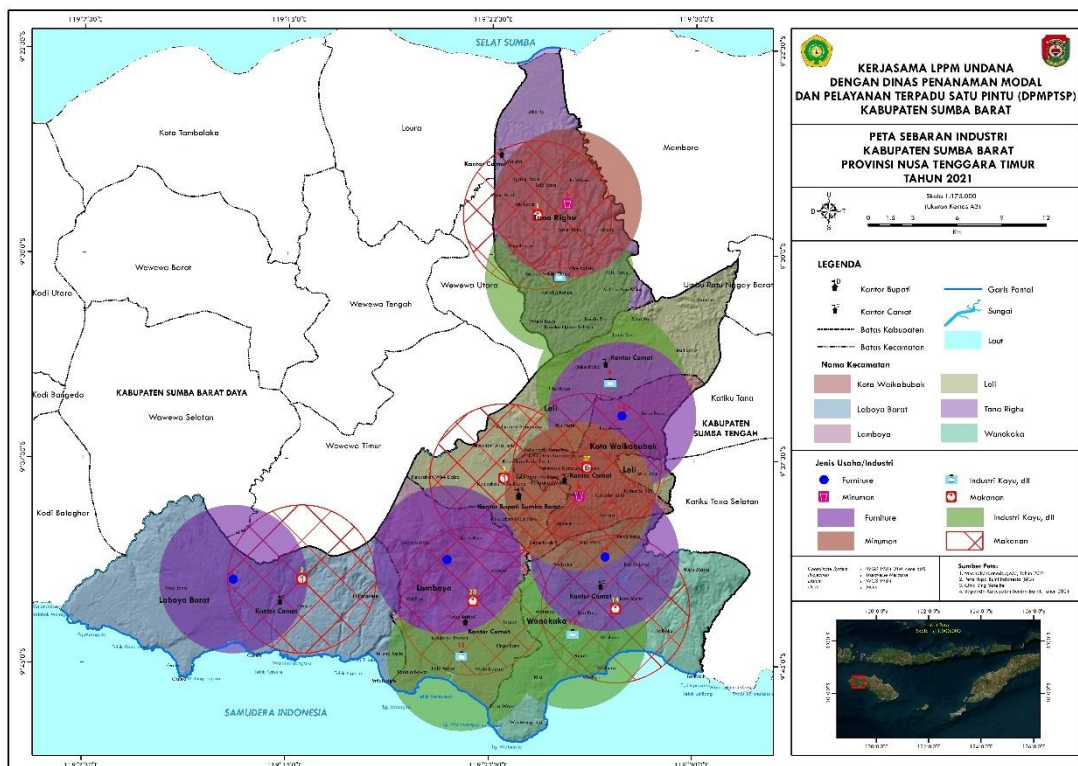
*Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Sumba Barat, 2021*

Grafik tersebut menampilkan ragam jumlah dan jenis industry pengolahan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Sumba Barat. Total sektor industry pengolahan yang ada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 167 yang terdiri dari 85 jenis industry makan minum, 48 jenis industry furniture, dan 34 jenis industry pengolahan kayu, babu, rotan dan sejenisnya. Industry makan minum dan furniture terbanyak berada di Kecamatan Kota Waikabubak. Sedangkan industry pengolahan kayu, babu, rotan dan sejenisnya paling banyak berada di Kecamatan Wanukaka dan Lamboya. Perbedaan jumlah sebaran industry penngolahan tersebut tentu tidak



terlepas dari kondisi ketersediaan bahan baku penunjang, seperti bahan baku makanan/minuman, bahan baku kayu, bamboo, rotan, dan berbagai jenis bahan baku yang diperlukan dalam aktivitas industry dimaksud. Selain itu, ketersediaan teknologi penunjang, tenaga kerja, pasar, Lembaga keuangan, serta kondisi infrastruktur untuk memperlancar sirkulasi, distribusi, dan informasi hasil olahan juga turut menentukan sebaran titik-titik aktivitas industry di kabupaten Sumba Barat.

Secara geografis, sebaran industry pengolahan di Kabupaten Sumba Barat per Kecamatan dapat dilihat pada peta berikut.



**Gambar 7.6**  
**Peta sebaran industry pengolahan di Kabupaten Sumba Barat (Hasil Olah data sekunder, 2021)**

Penentuan lokasi potensial bagi pengembangan industry pengolahan di Kabupaten Sumba Barat erat kaitannya dengan kondisi ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang. Beberapa wilayah yang diproyeksikan layak untuk pengembangan sektor pertanian (Loli untuk tanaman pangan, Tana Righu untuk tanaman perkebunan, Lambuya untuk budidaya peternakan, dan



Wanukaka untuk budidaya perikanan laut dan darat) menjadi acuan dalam menentukan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan terutama dalam kaitannya dengan factor-faktor penunjang seperti konektivitas antarwilayah untuk kebutuhan distribusi, kesiapan teknologi untuk kebutuhan produksi, ketersediaan dan jangkauan pasar untuk kebutuhan ekonomis, dan ketersediaan Lembaga keuangan untuk permodalan. Berbagai factor tersebut perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya penumpukan aktivitas di suatu lokasi dan meminimalisir ketimpangan pembangunan di daerah.

Melihat kondisi riil saat ini di mana Kecamatan Kota Waikabubak menjadi sentra pengembangan industri pengolahan, maka diperlukan arah kebijakan baru untuk mendesain skema pengembangan industri yang berbasis potensi bahan baku lokal tanpa mengabaikan aspek-aspek lain yang mendukung upaya peningkatan sektor industri di Kabupaten Sumba Barat. Jika memungkinkan, maka pengembangan sektor industri idealnya disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku untuk mempermudah rantai pasok sekaligus dalam rangka mengakomodir tenaga kerja lokal dan menghidupkan iklim usaha di level masyarakat akar rumput, sekaligus menghidupkan sektor-sektor lain yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas industri. Jika demikian maka prospek investasi sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumba Barat dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok yakni:

- a) Industri Pengolahan tanaman pangan
- b) Industri pengolahan tanaman perkebunan
- c) Industri pengolahan tanaman hortikultura
- d) Industri pengolahan hasil hutan
- e) Industri pengolahan hasil perikanan

Sedangkan titik-titik yang diproyeksikan bagi pengembangan sektor industri pada kelima sub sektor dimaksud dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi. analisis ekonomis dan agronomis sebagaimana dijelaskan sebelumnya.



### 7.3. Investas Sektor Tersier (Akomodasi makan minum)

Pertumbuhan investasi sektor tersier terutama sektor penyedia akomodasi makan minum maupun sektor jasa lainnya sangat ditentukan oleh trend kunjungan tamu atau arus migrasi. Sementara trend kunjungan atau arus migrasi sangat ditentukan oleh daya Tarik suatu wilayah. Dalam hal ini, sektor pariwisata menjadi penggerak bertumbuh dan berkembangnya investasi di sektor tersier terutama penyediaan akomodasi makan minum maupun usaha jasa pariwisata lainnya.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam Kawasan strategis pariwisata nasional dengan berbagai potensi wisata yang dimilikinya. Artinya daerah ini menjadi salah satu daerah yang diminati para wisatawan baik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara. Trend kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada table berikut.

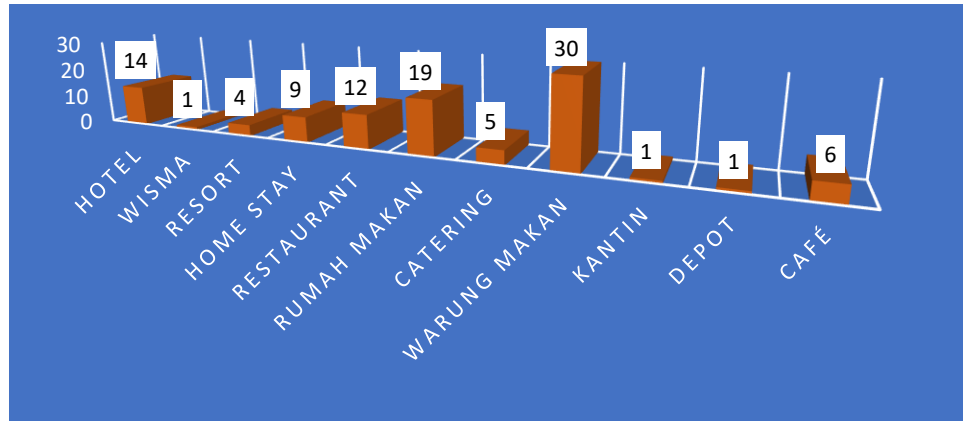
Tabel 7.7

Jumlah Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2018-2020

<b>Kategori wisatawan (Jiwa)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara	3,711	3,432	555
Jumlah perkembangan kunjungan wisatawan domestik	4,561	4,052	1,451

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026

Table di atas menunjukkan trend jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2018-2020 yang cenderung menurun. Penurunan signifikan dialami untuk kategori wisatawan mancanegara. Penurunan tersebut terjadi secara signifikan pada tahun 2020 dikarenakan bencana covid 19. Banyaknya wisatawan maupun pengunjung yang berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat selama ini dilayani oleh sejumlah layanan akomodasi makan minum sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.



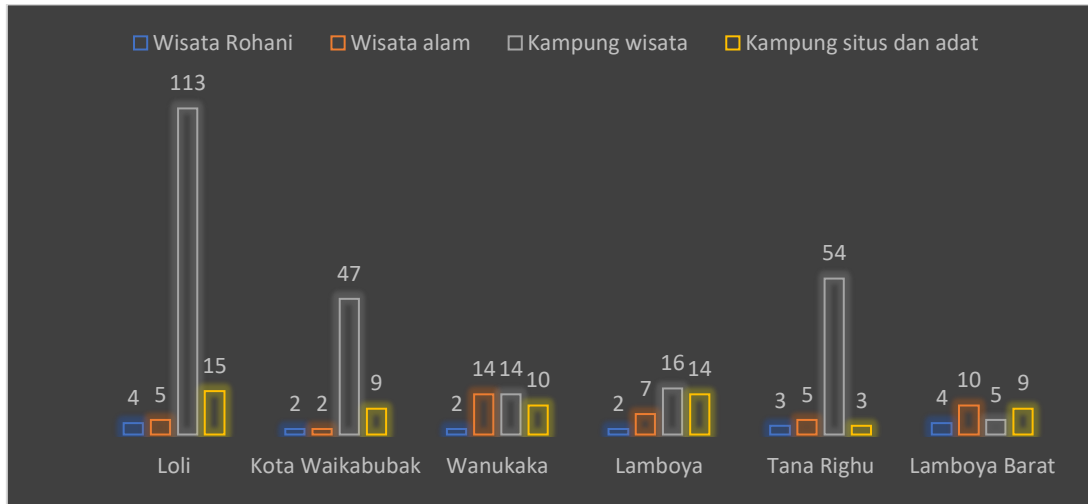
**Gambar 7.7**

**Jumlah fasilitas penyedia akomodasi makan minum di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020**

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumba Barat, 2021*

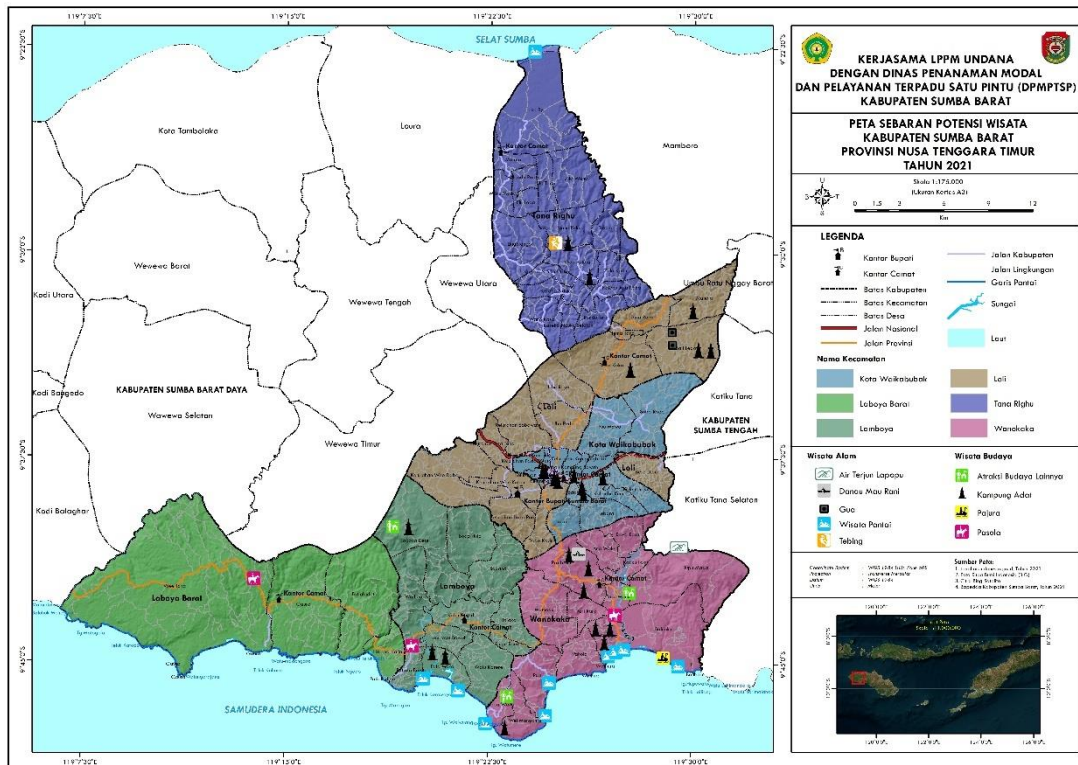
Sebagian besar layanan akomodasi makan minum di Kabupaten Sumba Barat terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak sebagai pusat administrasi pemerintahan dan perekonomian. Sementara berbagai jenis objek wisata di Kabupaten Sumba Barat hampir menyebar di semua wilayah Kecamatan. Meskipun jarak antara kecamatan dan ibukota Kabupaten tidak terbilang jauh, namun dengan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana akomodasi makan minum di sekitar lokasi wisata menyebabkan rendahnya penghasilan masyarakat lokal di sekitar objek wisata dari aktivitas kepariwisataan. Karenanya pemerintah daerah mulai mengembangkan konsep desa wisata dengan kelompok-kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk menangkap peluang ekonomi dari aktivitas kepariwisataan yang berlangsung di lokasi wisata.

Kabupaten Sumba Barat memiliki sejumlah destinasi wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata rohani, Kampung wisata, serta kampung situs dan adat. Sebaran destinasi wisata di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada beberapa grafik berikut.



**Gambar 7.8**  
**Sebaran Destinasi Wisata kabupaten Sumba Barat tahun 2020**  
*Sumber: Dinas Pariwisata kabupaten Sumba Barat, 2021*

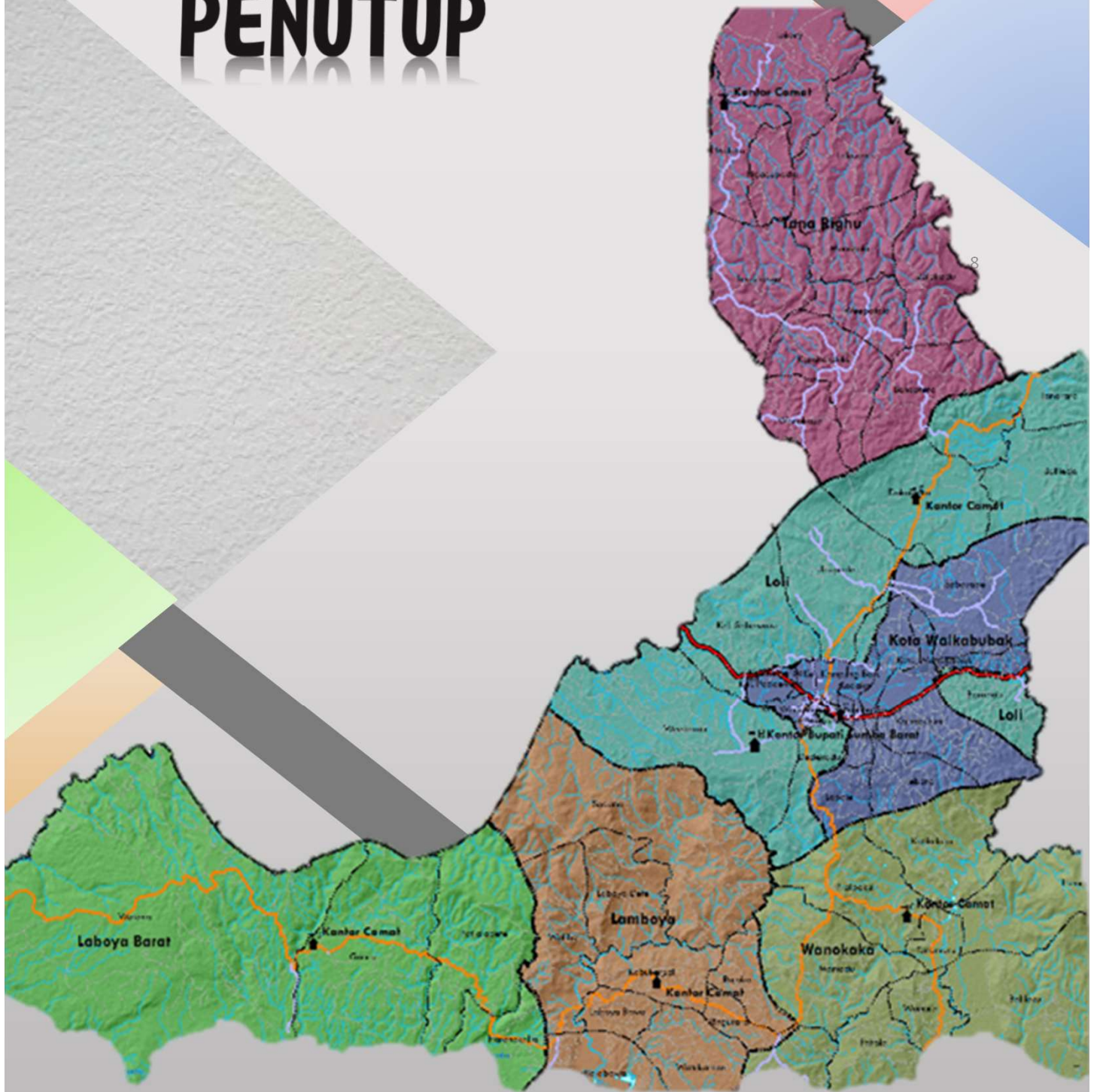
Garafik di atas memperlihatkan bahwa destinasi wisata yang paling dominan di kabupaten Sumba Barat adalah wisata berbasis social kultur masyarakat (kampung adat) yang paling banyak terdapat di Kecamatan Loli. hal ini menjelaskan bahwa, Kabupaten Sumba Barat dan Sumba pada umumnya masih sangat berpegang teguh pada tradisi adat. Selain kampung adat, Kabupaten Sumba Barat juga memiliki sejumlah sdestinasi yang tidak kalah menarik seperti wisata alam dan wisata rohani. Wisata alam terbanyak terdapat di Kecamatan Wanukana dan kecamatan Laboya Barat. Sementara penyedia jasa akomodasi makan minum untuk kebutuhan wisatawan justru bertumpuk di Kota Waikabubak. Karenanya, pengembangan investasi sektor penyedia akomodasi makan minum ke depannya hendaknya mempertimbangkan aspek keruangan, terutama jarak dan tingkat keamanan dan kenyamanan berwisata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kualitas dan dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, elektrifikasi, informasi dan komunikasi untuk menunjang aktivitas kepariwisataan harus juga diperhatikan dan bahkan bisa menjadi peluang baru bagi para investor untuk berinvestasi.



**Gambar 7.9**  
**Peta Potensi wisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020**  
*(Hasil Olah data Sekunder, 2021)*

Selain beberapa sektor prioritas pengembangan investasi di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah dijelaskan tersebut, prospek investasi di Kabupaten Sumba Barat juga dapat diarahkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti infrastruktur untuk menunjang konektivitas, elektrifikasi untuk menunjang aktivitas perindustrian dan pariwisata, informasi dan telekomunikasi untuk menunjang kebutuhan informasi, Pendidikan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja), real estate untuk menunjang kebutuhan hunian, konstruksi untuk menunjang aktivitas pembangunan fisik, penyediaan air, pengolahan sampah dan daur ulang untuk menunjang kelestarian lingkungan, dan berbagai sektor lainnya yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Prinsipnya, investasi merupakan sebuah aktivitas yang dapat memberikan efek domino terhadap berkembangnya sektor-sektor lain selama sektor-sektor tersebut saling terkait satu sama lain. Untungnya, semua sektor yang ada di daerah memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga kebijakan apapun terkait investasi pasti akan mampu menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya.

# BAB VIII PENUTUP





## 8.1 Simpulan

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang saat ini sedang dalam upaya membangun iklim investasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah awal yang telah ditempuh adalah dengan melakukan penataan internal kelembagaan DPMPTSP sebagai basis orientasi pelayanan di bidang investasi. Beberapa langkah selanjutnya telah ditempuh melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal [RUPM] sebagai acuan dalam upaya peningkatan iklim investasi.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan potensi investasi sebagai dasar penentuan kebijakan investasi di Kabupaten Sumba Barat ke depan. Berdasarkan hasil kajian, ditetapkan beberapa sektor potensial pengembangan investasi di Kabupaten Sumba Barat. Penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama ketersediaan lahan, tingkat produktivitas, dukungan infrastruktur, ketenagakerjaan, dukungan permodalan, dukungan teknologi, prospek pasar, kesesuaian lahan, rencana tata ruang, dan berbagai persyaratan agronomis lainnya dalam rangka pengembangan berbagai sektor dan komoditi yang selama ini telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Barat.

Sektor-sektor sebagaimana dimaksud dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yakni sektor primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dielaborasi menjadi sub sektor dan komoditi unggulan/andalan yang dimiliki dari setiap sektor dan sub sektor yang ada.

### a. Sektor Primer

Sektor primer merupakan sektor andalan di Kabupaten Sumba Barat selama ini. Meskipun nilai dan kontribusi sektor ini cenderung menurun setiap tahun, namun sebagai daerah yang bercorak agraris dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sektor ini tetap menjadi sektor yang diharapkan dapat dikembangkan ke depannya. Sektor yang termasuk dalam kategori sektor primer adalah sektor pertanian dan perikanan

#### 1) Pertanian

Sektor pertanian dibagi ke dalam empat sub sektor yakni tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Beberapa komoditi yang



potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sumba Barat berdasarkan kondisi ketersediaan lahan dan tingkat produktivitas adalah: 1) Tanaman Pangan yakni, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau yang ketersediaannya hampir tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan analisis lokasi, ketersediaan lahan, kecocokan lahan, dukungan sarana prasarana, prospek pasar, serta dampak ekonomisnya, maka lokasi ideal untuk pengembangan budidaya tanaman pangan adalah Kecamatan Loli; 2) Tanaman Perkebunan yakni, kopi, kelapa, kakao, jambu mete, kemilri, kelapa, dan pisang. Berdasarkan analisis lokasi, ketersediaan lahan, kecocokan lahan, dukungan sarana prasarana, prospek pasar, serta dampak ekonomisnya, maka lokasi ideal untuk pengembangan budidaya tanaman pangan adalah Kecamatan Tana Righu; 3) Peternakan yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Beberapa jenis ternak seperti kerbau, kuda, dan babi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di kabupaten Sumba Barat dan Sumba pada umumnya karena selain untuk dikonsumsi, ternak-teenak dimaksud memiliki nilai sosio-kultural yang tinggi. Berdasarkan analisis lokasi, ketersediaan lahan, kecocokan lahan, dukungan sarana prasarana, prospek pasar, serta dampak social ekonomisnya, maka lokasi ideal untuk pengembangan budidaya peternakan adalah Kecamatan Lamboya.

## 2) Perikanan

Potensi perikanan ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat (RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031). Dimana arah pengembangan wilayah tersebut dijelaskan bahwa potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka. Ketiga daerah tersebut berada pada wilayah kawasan pesisir selatan dengan luas 421 km<sup>2</sup> dan panjang pantai ± 56 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.



## **b. Sektor Sekunder**

Sektor sekunder adalah salah satu sektor ekonomi bersama dengan sektor primer dan sektor tersier. Bentuk kegiatannya umumnya adalah pengolahan bahan baku dan pengadaan barang setengah jadi. Sektor sekunder berpusat pada industri pengolahan, pengadaan listrik, gas dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah hasil daur ulang. Sektor sekunder umumnya mulai menggantikan peran sektor primer pada masa peralihan sistem perekonomian dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Pengurangan peran pada sektor primer merupakan salah satu metode pencapaian pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural. Tenaga kerja dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Fenomena transformasi structural tersebut dialami hampir di semua wilayah tidak terkecuali di Kabupaten Sumba Barat.

Potensi pengembangan investasi sektor sekunder di Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari kondisi sektor primer dengan beragam sub sektor dan komoditi andalannya. Melihat berbagai potensi sektor primer yang ada di Kabupaten Sumba Barat, maka prospek investasi sektor sekunder di Kabupaten Sumba Barat diarahkan dalam rangka pengembangan sektor industry pengolahan berbagai jenis komoditi andalan sehingga nilai jual dari berbagai jenis komoditi mengalami peningkatan dan dapat bertahan lebih lama. Karenanya diperlukan dukungan infrastruktur seperti listrik, sarana informasi dan telekomunikasi, serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Lokasi ideal bagi pengembangan sektor industry pengolahan disesuaikan dengan potensi bahan baku yang ada untuk mempermudah rantai pasok bahan baku sekaligus memperlancar proses distribusi dan pemasaran hasil produk.

## **c. Sektor Tersier**

Sektor tersier (juga dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa) adalah satu dari tiga sektor ekonomi. Dalam ekonomi, sektor tersier merupakan lapangan pekerjaan yang saling berkaitan dengan dua sektor ekonomi lainnya yaitu sektor sekunder (manufaktur) dan sektor primer (pertambangan, pertanian dan perikanan). Definisi umum mengenai sektor tersier adalah sektor ekonomi yang



bergerak dalam kegiatan menghasilkan suatu jasa. Sektor tersier tidak mengutamakan produksi terhadap produk akhir seperti halnya pada sektor sekunder.

Prospek pengembangan investasi sektor tersier di Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari potensi pariwisata yang ada di kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam Kawasan strategis pariwisata nasional dengan berbagai potensi wisata yang dimilikinya. Artinya daerah ini menjadi salah satu daerah yang diminati para wisatawan baik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara. Pertumbuhan investasi sektor tersier terutama sektor penyedia akomodasi makan minum maupun sektor jasa lainnya sangat ditentukan oleh trend kunjungan tamu atau arus migrasi. Sementara trend kunjungan atau arus migrasi sangat ditentukan oleh daya Tarik suatu wilayah. Dalam hal ini, sektor pariwisata menjadi penggerak bertumbuh dan berkembangnya investasi di sektor tersier terutama penyediaan akomodasi makan minum maupun usaha jasa pariwisata lainnya di Kabupaten Sumba Barat.

Prospek pengembangan investasi di Kabupaten Sumba Barat juga sangat ditentukan oleh beberapa factor. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi Investasi di Kabupaten Sumba Barat yang digolongkan menjadi Faktor internal dan Faktor eksternal. Factor internal antara lain: Regulasi, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya Masyarakat dan Keamanan, Infrastruktur, Promosi Investasi, Kondis Geografis dan Topografi Wilayah, dan Kepemilikan Lahan. Sedangkan faktor eksternal mencakup: Minat Investasi, Stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri, Penegakan hukum, dan perkembangan ekonomi global. Beberapa factor sebagaimana telah disebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah, para stakeholder, termasuk masyarakat untuk sama-sama menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga wilayah kabupaten Sumba Barat ke depannya menjadi wilayah yang ramah investasi.



## **8.2 Rekomendasi**

Beberapa point rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam upaya peningkatan iklim Investas di Kabupaten Sumba Barat ke depannya adalah:

1. Peningkatan dukungan sarana-prasarana terutama infrastruktur seperti listrik, informasi dan telekomunikasi
2. Penataan kelembagaan birokrasi terutama dalam kaitannya dengan system, mekanisme, dan prosedur perizinan untuk memudahkan para investor berinvestasi.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk menjamin kebutuhan tenaga kerja.
4. Pemanfaatan teknologi tepat guna khususnya sektor primer dan sekunder dalam rangka peningkatan produktivitas usaha.
5. Pemberian jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi para investor terutama menyangkut status lahan.
6. Peningkatan promosi investasi
7. Membangun kerja sama lintas sektor terutama dengan Lembaga-lembaga keuangan baik koperasi maupun perbankan untuk mendukung permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah.
8. Penguatan regulasi terutama terkait tata ruang wilayah untuk menjamin kepastian area pengembangan investasi, pajak daerah, dan jaminan keamanan bagi para pelaku usaha.
9. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap aktivitas invetasi yang sudah dan sedang berjalan sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai aktivitas usaha yang ada dalam lingkup wilayah kabupaten Sumba Barat.
10. Peningkatan pelayanan di bidang perizinan melalui system layanan prima/mall pelayanan (Jangka Panjang)

## Daftar Pustaka

- A.F.Elly Erawaty. 1989. *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung,. Seri Tinjauan dan Gagasan No.10.
- Aminuddin Ilmar. 2004. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asep Warlan Yusuf. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Administrasi*, (Makalah yang dipresentasikan di Fakultas Hukum Unpar).
- Ateng Syafrudin. 1975. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- BPS Kabupaten Sumba Barat, 2021
- Erman Rajagukguk. 2005. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harjono, Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal. Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*
- Jaja Ahmad Jayus. 2001. *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung).
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori makro ekonomi* . Jakarta: Penerbit Erlangga
- N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Renstra BKPM 2020-2024
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Sjahan Basah. 1994. *Perizinan di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional tentang Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNAIR Surabaya pada tanggal 11-17 Januari 1994, FH. UNAIR, Surabaya.
- Sukirno, S. (2008). *Mikro ekonomi. Teori pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumba Barat Dalam Angka 2021

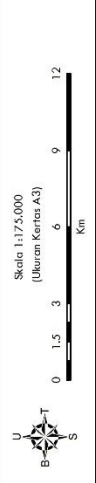
Tirta Nugraha Mursitama. 2010. Desy Hariyati, dan Sigit Indra Prianto (Tim Peneliti), *Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota* (Purbalingga, Makassar, dan Banjarbaru).

Todaro, P. M. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.



**KERJASAMA LPPM UNDIANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

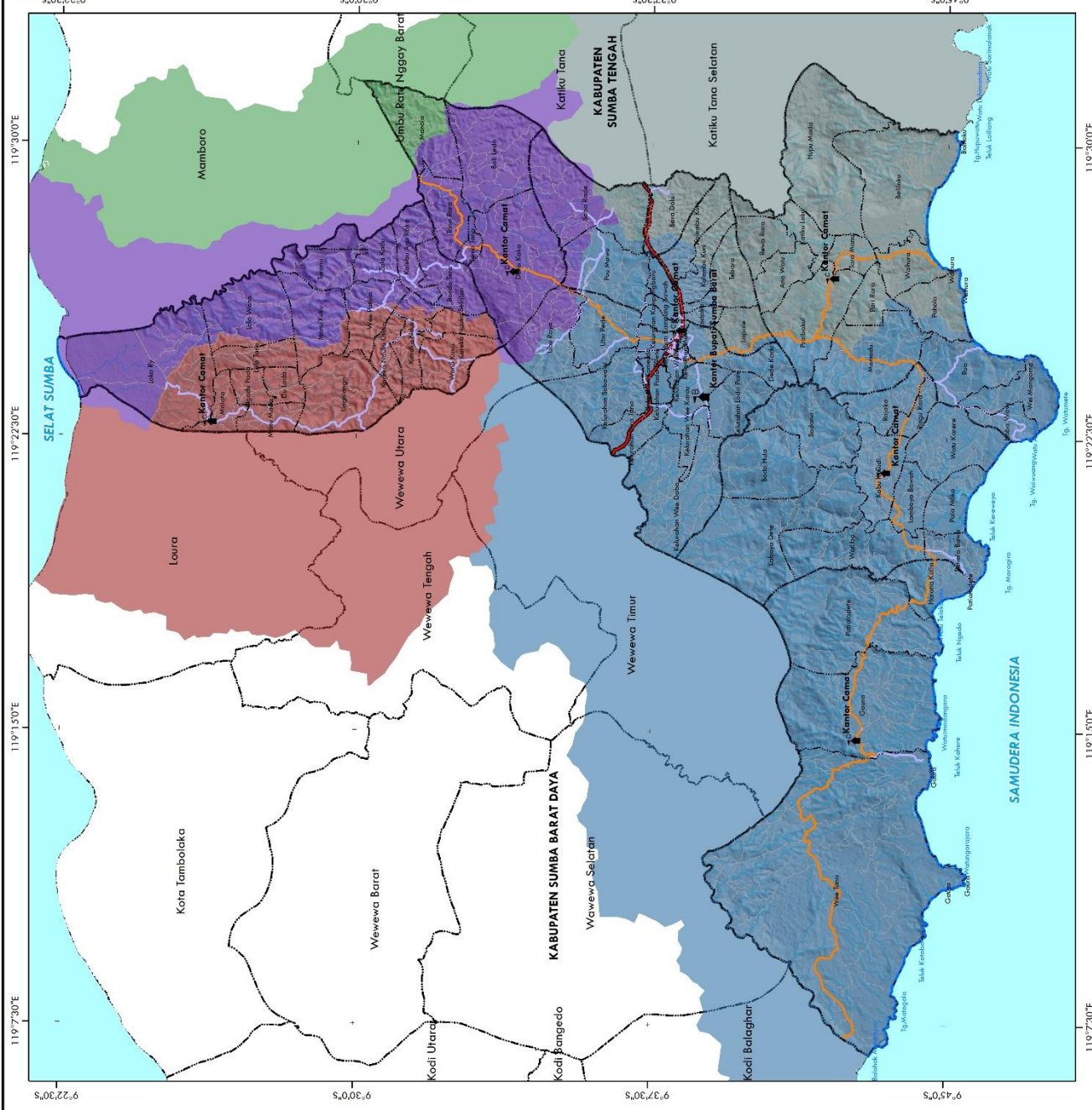
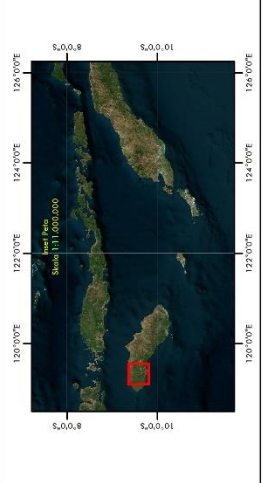
	Kantor Bupati		Jalan Kabupaten
	Kantor Camat		Jalan Lingkungan
	Batas Kabupaten		Garis Pantai
	Batas Kecamatan		Sungai
	Batas Desa		Laut
	Jalan Nasional		
	Jalan Provinsi		

**Nama DAS**

	Karendi
	Karawala
	Polapare
	Wanokaka

Coordinate System : WGS 1984 UTM Zone 50S  
 Projection : Pseudocylindrical  
 Datum : WGS 1984  
 Unit : Meter

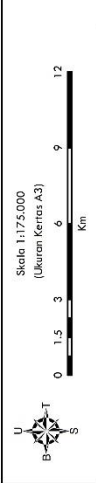
**Sumber Peta:**  
 1. Topografi Indonesia (Topo), Tahun 2021  
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)  
 3. Citra Bing Satellite  
 4. Baseedit Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021  
 5. www.indonesia.go.id/petaonline





**KERJASAMA LPM UMDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA JARINGAN INTERNET  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Caris Pantai
- Sungai
- Laur

**Nama Kecamatan**

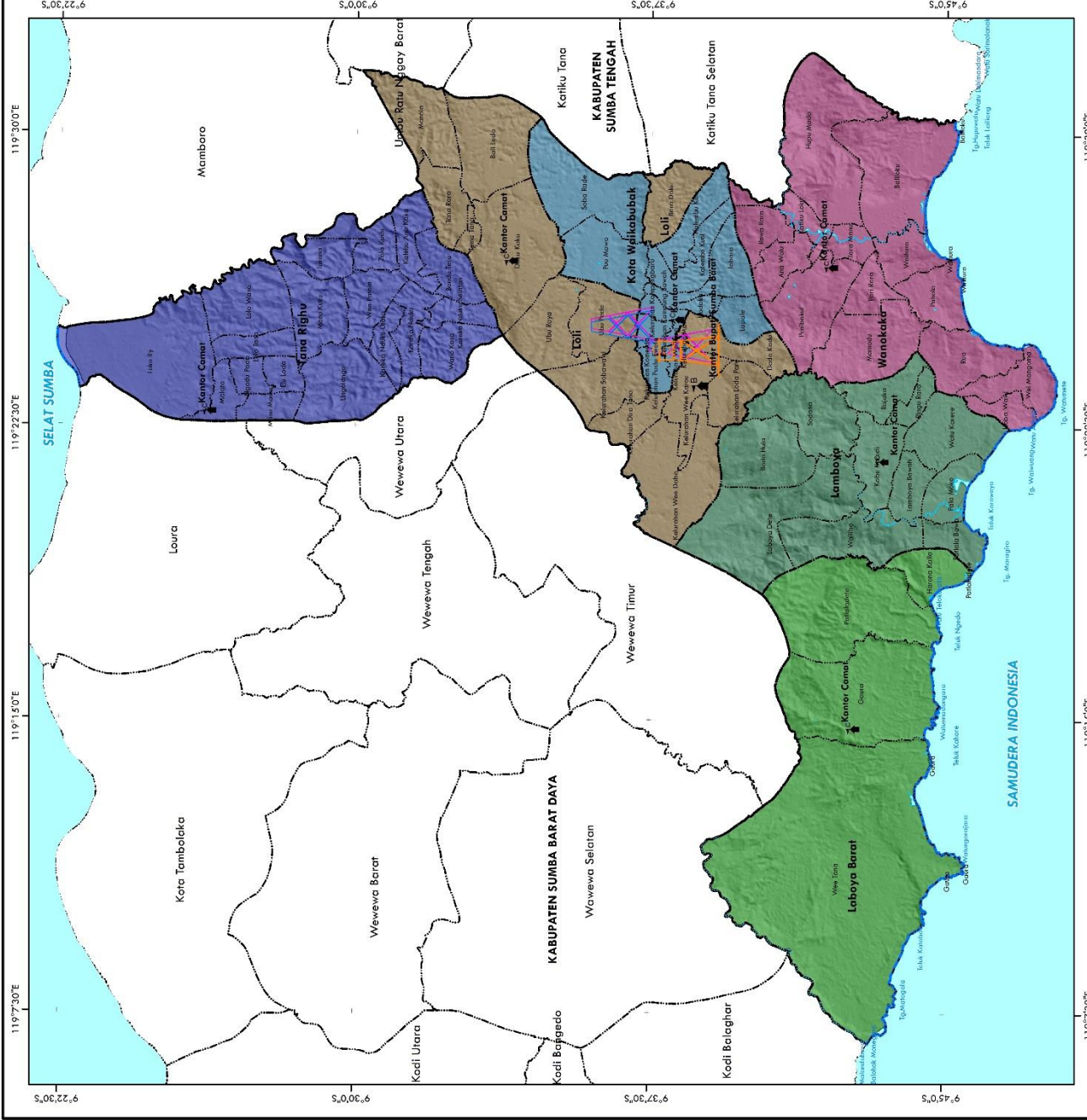
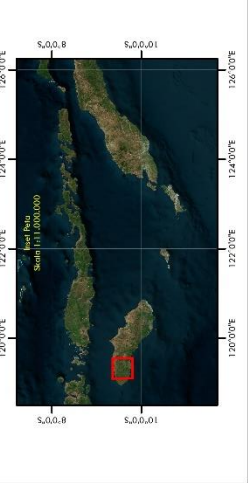
- Kota Waikabubak
- Laboya Barat
- Lambuya
- Loli
- Tana Righu
- Wanakaka

**Titik Tower Telekomunikasi**

- Menara Telekomunikasi
- Menara Transmisi TVRI
- Tower Indosat

**Sumber Peta:**

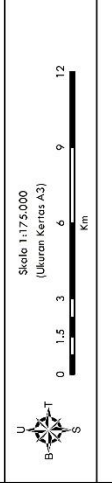
- WCS 1994 (Jawa: SIS)
- Open Street Map (OSM) Tahun 2021
- Open Street Map (OSM) Tahun 2021
- Open Street Map (OSM) Tahun 2021
- Open Street Map (OSM) Tahun 2021



Coordinates: 119°15'0"E, 119°22'30"E, 119°30'0"E, 119°37'30"E, 119°45'0"E, 9°22'30"S, 9°30'0"S, 9°37'30"S, 9°45'0"S

**KERJASAMA LPPM UNDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA SARANA TRANSPORTASI  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

	Kantor Bupati		Jalan Kabupaten
	Kantor Camat		Jalan Lingkungan
	Batas Kabupaten		Garis Pantai
	Batas Kecamatan		Sungai
	Batas Desa		Laut
	Jalan Nasional		
	Jalan Provinsi		

**Nama Kecamatan**

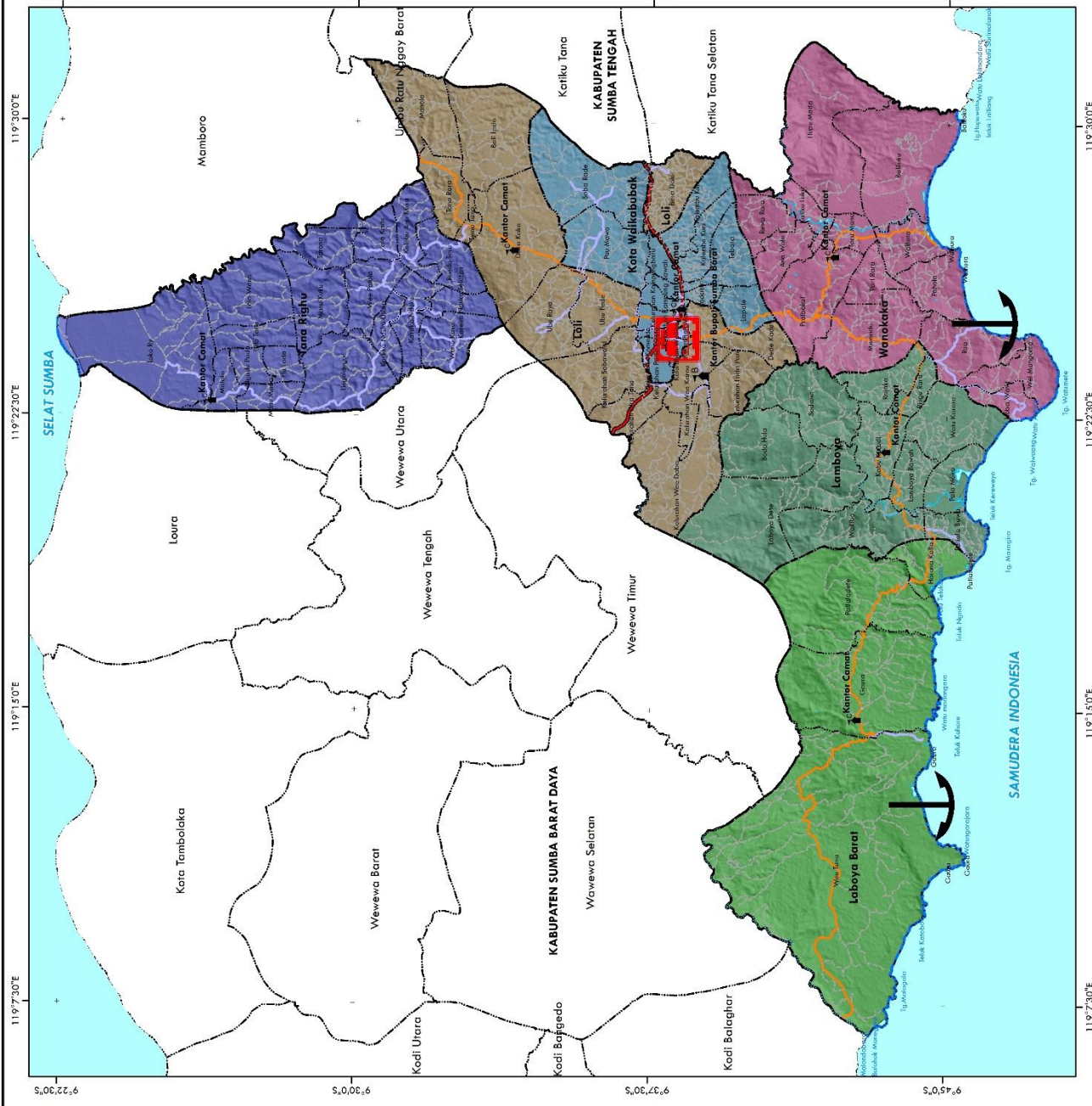
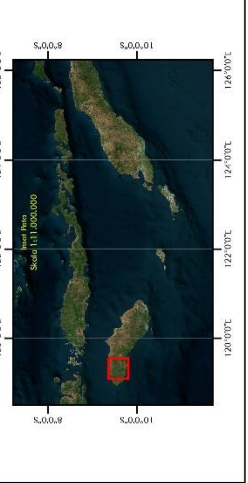
	Kota Waikabubak		Loli
	Laboya Barat		Tana Righu
	Lambaya		Wanokaka

**Sarana Transportasi**

- Pelabuhan Nelayan
- Terminal Bus Waikabubak

**Sumber Peta:**

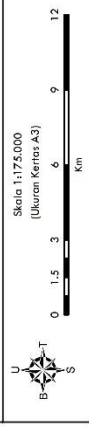
1. MGS 1984 (UM, Zon, SJS)
2. Peta Baku Bumi Indonesia (PBI)
3. E-Tra Bing Satellite
4. Hasil Pengamatan Satelit Bumi Sat, Tahun 2021





**KERJASAMA LPPM UNDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA JARINGAN ELEKTRIFIKASI  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



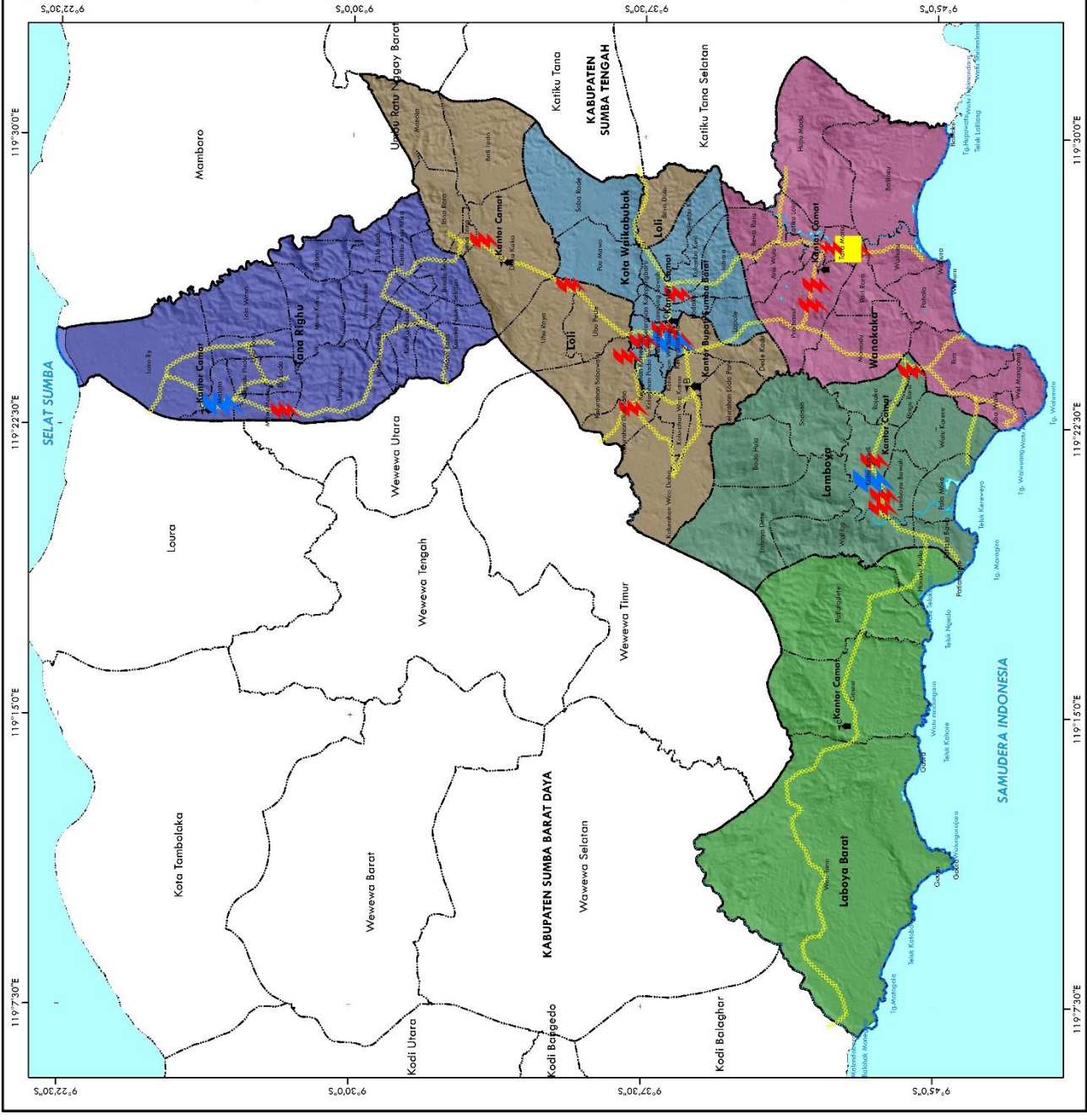
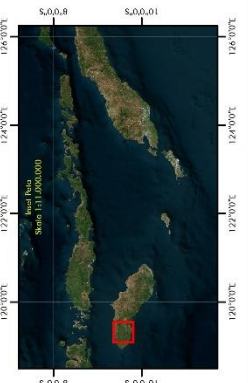
**LEGENDA**

- Kantor Bupati
  - Kantor Camat
  - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - Garis Pantai
  - Sungai
  - Laur
- Nama Kecamatan**
- Kora Waikabubak
  - Laboya Barat
  - Lamboya
  - Loli
  - Tana Righu
  - Wanakaka

**Jaringan Elektrifikasi**

- PLN Cabang Wanakaka
- PLTD
- Tink Listrik
- Jaringan Listrik

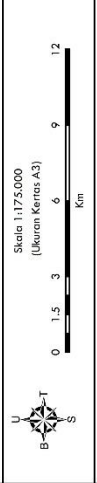
- Sumber Peta:**
1. WGS 1984 UTM Zone 48S
  2. WGS 1984 UTM Zone 48S
  3. Citra Bing Satellite
  4. Laporan Kompartemen Sumbawa Barat, tahun 2021
- Coordinate System**
- 1. WGS 1984 UTM Zone 48S
  - 2. WGS 1984 UTM Zone 48S
  - 3. Citra Bing Satellite
  - 4. Laporan Kompartemen Sumbawa Barat, tahun 2021





**KERJASAMA LPPM UNDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA SEBARAN PERIKANAN  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai
- Laut

**Nama Kecamatan**

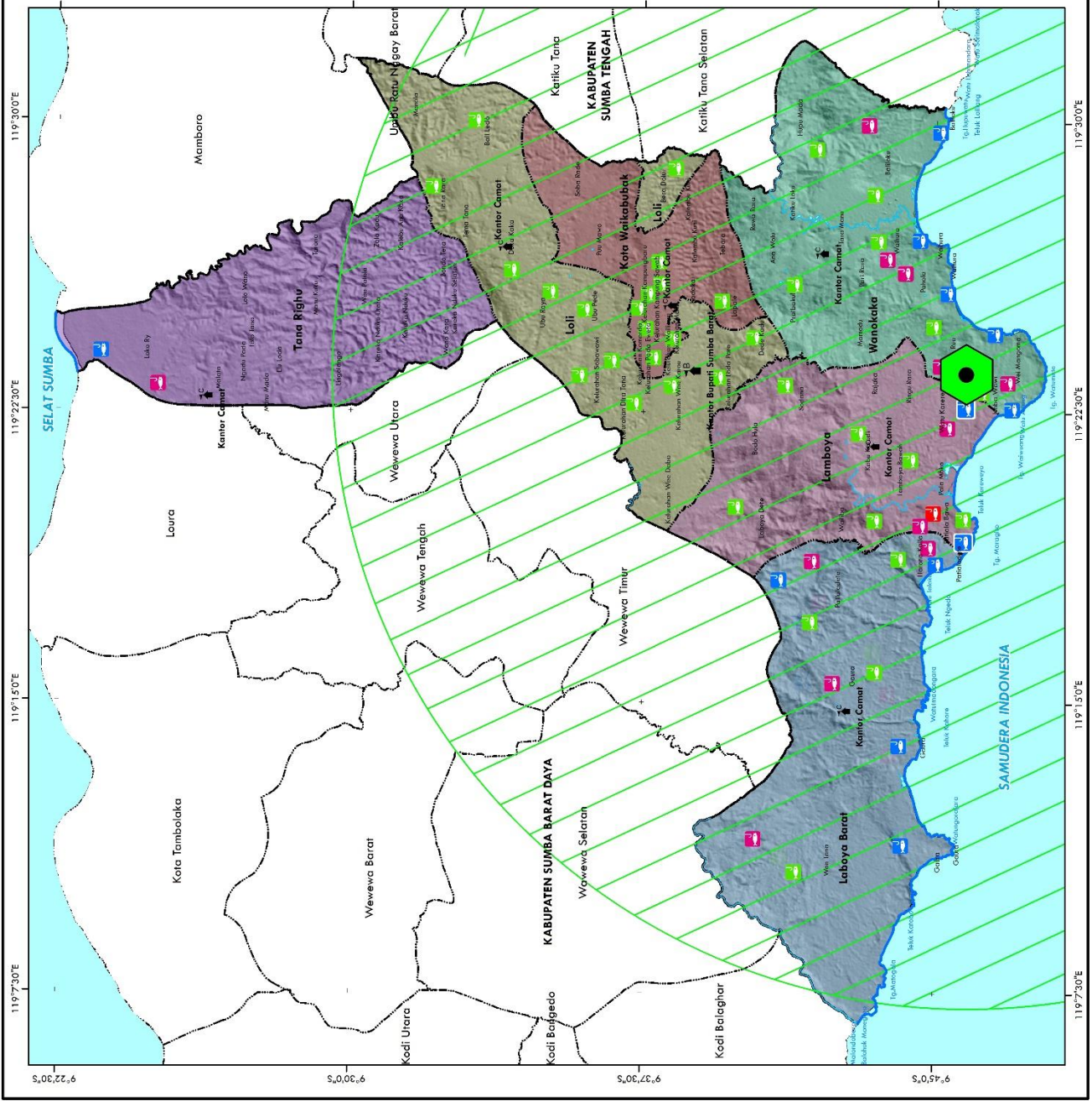
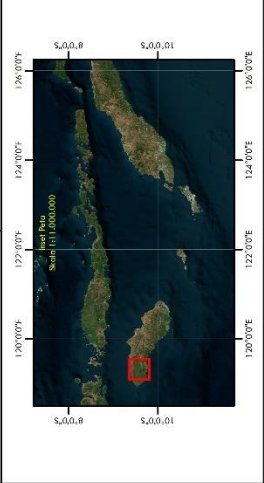
- Kota Waikabubak
- Laboya Barat
- Lambuya
- Loli
- Tana Righu
- Wanokaka

**Jenis Perikanan Budidaya**

- Fokus Pengembangan Perikanan
- Laut
- Poyau
- Perikanan Tangkap
- Tawar

**Sumber Peta:**

- WGS 1984 UTM Zone 50S
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2014
- Citra Bing Satelit
- Informasi Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021





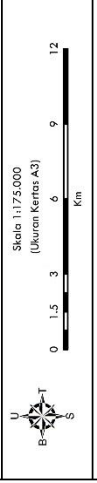






**KERJASAMA LPPM UNDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA SEBARAN PERTANIAN  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai
- Laut

**Nama Kecamatan**

- Kota Waikabubak
- Laboya Barat
- Lambuya
- Loli
- Tana Righu
- Wanokaka

**Area Tanaman Pangan Per Komoditi**

- Pengembangan Investasi Budi daya (Agrobiobias)
- Jagung
- Ubi Kayu
- Padi Ladang
- Padi Sawah

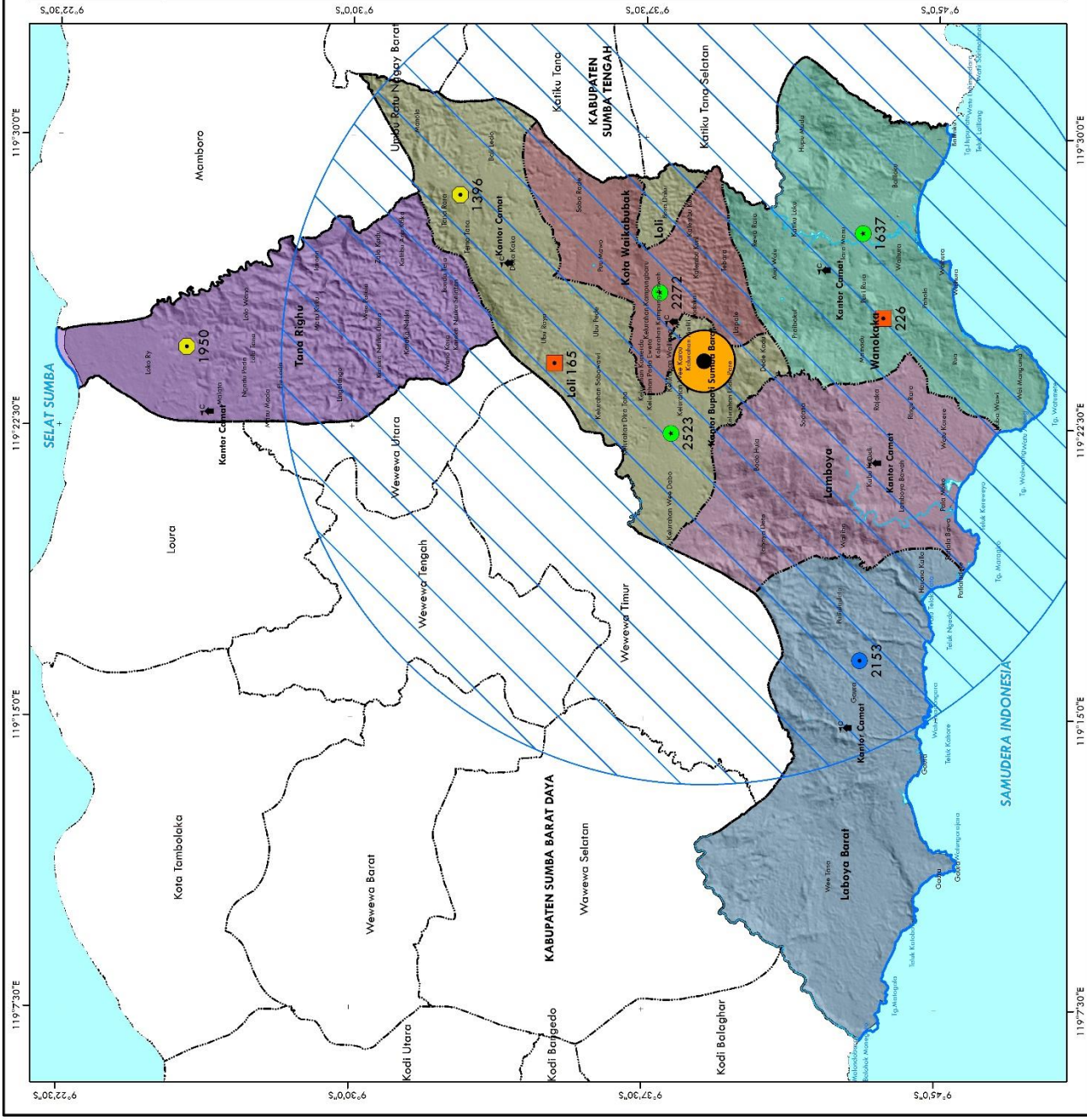
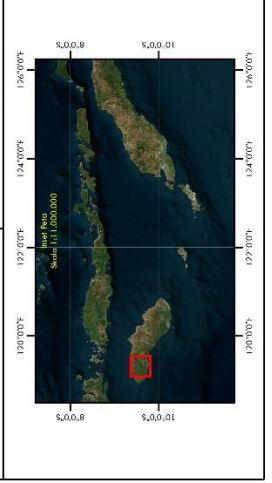
*Keterangan: angka di bawah simbol menunjukkan luas lahan (Ha)*

**Sumber Peta:**

- WGS 1984 UTM Zone 50S
- Imajinasi satelit (tahun 2021)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (BRI)
- WGS 1984
- Desain

UHM:

- Repositori Kabupaten Sumba Barat, tahun 2021



Coordinates: 119°30'0"E, 119°22'30"E, 119°15'0"E, 119°7'30"E; 9°45'0"S, 9°37'30"S, 9°30'0"S, 9°22'30"S

**KERJASAMA LPPM UNDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA SEBARAN POTENSI WISATA  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

	Kantor Bupati		Jalan Kabupaten
	Kantor Camat		Jalan Lingkungan
	Batas Kabupaten		Garis Pantai
	Batas Kecamatan		Sungai
	Batas Desa		Laur
	Jalan Nasional		Kata Waikabubak
	Jalan Provinsi		Laboya Barat
	Nama Kecamatan		Lamboya
	Kata Waikabubak		Lali
	Laboya Barat		Tana Righu
	Lamboya		Wanekaka

	Air Terjun Loppou		Atraksi Budaya Lainnya
	Danau Mau Rani		Kampung Adat
	Gua		Pejura
	Wisata Pantai		Pesolo
	Tebbing		

**Sumber Peta**

1. WGS 1984 UTM Zone 50S
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
3. Peta Topografi
4. Hasil Riset Lapangan Sumba Barat, Tahun 2021

**Coordinate System**

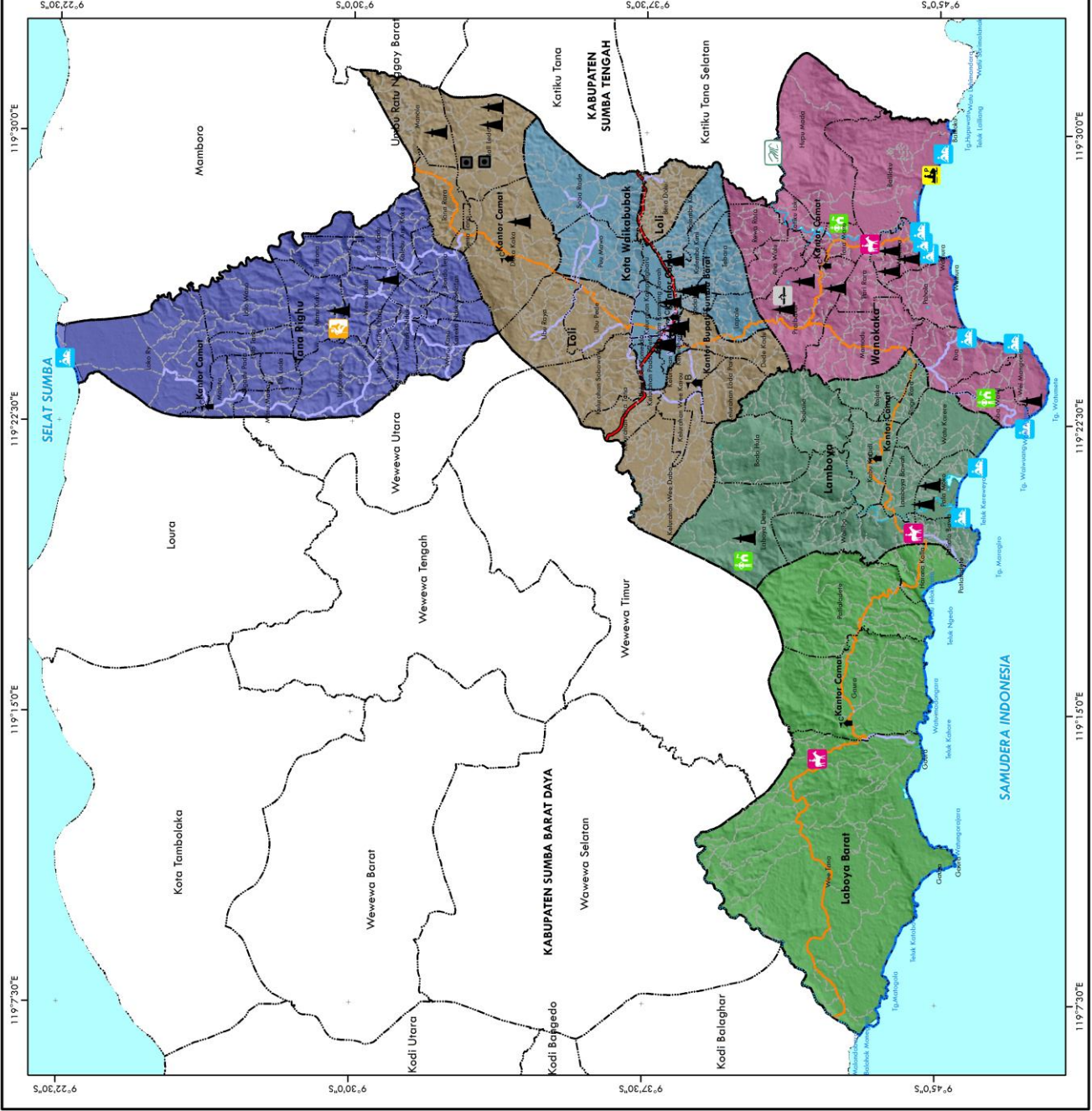
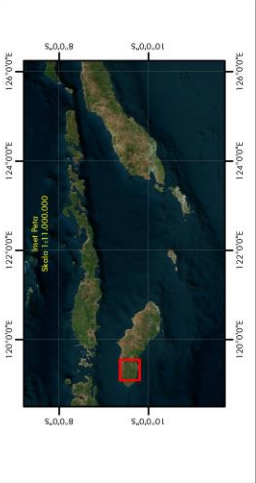
1. WGS 1984 UTM Zone 50S
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
3. Peta Topografi
4. Hasil Riset Lapangan Sumba Barat, Tahun 2021

**Projection**

1. UTM
2. UTM
3. UTM
4. UTM

**Units**

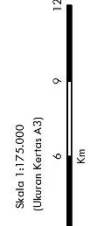
1. Meter
2. Meter
3. Meter
4. Meter





**KERJASAMA LPPM UNDANA  
DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**PETA JARINGAN JALAN  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**



**LEGENDA**

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lingkungan
- Garis Pantai
- Sungai
- Laur

- Nama Kecamatan**
- Kota Waikabubak
  - Laboya Barat
  - Lambuya
  - Loli
  - Tana Righu
  - Wanokaka

Coordinate System : WGS 1984 UTM, Zone 50S  
 Projection : UTM  
 Units : Meter

**Sumber Peta:**

1. Badan Informasi Geospasial, Tahun 2021
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Cina Bing Satellite
4. Bappeda Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021

